

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR 1**

**TAHUN 2019**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 - 2023**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 1**

**TAHUN 2019**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah ... 4



22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
9. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majalengka.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

11. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Majalengka adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Majalengka.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
26. Program Prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
27. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada RPJPD;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Penyusunan Renstra-PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. Penyusunan Renja-PD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
  - a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;

b. Menetapkan ... 7



- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra-PD, Renja-PD dan perencanaan penganggaran;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut:

#### BAB I       PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, faktor-faktor yang menjadi dasar penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Majalengka dan sistematika penulisan.

#### BAB II       GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan dasar-dasar analisis berupa profil umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

#### BAB III      GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

#### BAB IV      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

#### BAB V       VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2018-2023.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat di peroleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator Kinerja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX PENUTUP**

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang telah disusun dan ditetapkan.

**BAB V  
ISI DAN URAIAN RPJMD**

**Pasal 5**

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



**AHMAD SODIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT  
(1/97/2019).





RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2018 - 2023



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antara Dokumen .....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-22
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-28
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-67
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-1
3.1.2 Neraca Daerah .....	III-8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-10
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-13
3.2.2 Analisis Pembiayaan .....	III-14
3.3 Kerangka Pendanaan .....	III-17
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III-17
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-22



<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b>	
4.1 Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.1.1 Urusan Wajib .....	IV-1
4.1.2 Urusan Pilihan .....	IV-7
4.2 Isu Strategis .....	IV-9
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
5.1 Visi .....	V-1
5.2 Misi .....	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-5
5.4 Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 .....	V-13
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	VI-1
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial .....	VI-10
6.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 .....	VI-16
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..</b>	VII-1
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	VIII-1
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	X-1





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.....	I-7
Gambar 2.1	Batas wilayah administratif Kabupaten Majalengka .....	II-1
Gambar 2.2	Peta wilayah administratif Kabupaten Majalengka .....	II-2
Gambar 2.3	Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat 2025 .....	II-3
Gambar 2.4	Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017 .....	II-6
Gambar 2.5	Kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya .....	II-8
Gambar 2.6	Perkembangan gini rasio Kabupaten majalengka tahun 2013-2017 .....	II-25
Gambar 2.7	Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-26
Gambar 2.9	Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-26
Gambar 2.10	Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka 2013-2017..	II-30
Gambar 2.11	Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka 2013-2017...	II-30
Gambar 2.12	Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3Kab. Majalengka Tahun 2013-2017 .....	II-72
Gambar 6.1	Posisi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 .....	V-8
Gambar 6.2	Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Majalengka .....	V-9

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka.....	II-2
Tabel 2.2	Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka.....	II-3
Tabel 2.3	Potensi air permukaan di Kabupaten Majalengka.....	II-5
Tabel 2.4	Potensi air bawah tanah (ABT) di Kabupaten Majalengka .....	II-6
Tabel 2.5	Perkembangan penggunaan lahan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-7
Tabel 2.6	Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan kabupaten majalengka.....	II-13
Tabel 2.7	Data potensi bencana di wilayah Kabupaten majalengka .....	II-16
Tabel 2.8	Data potensi bencana akibat abrasi di wilayah Kabupaten Majalengka.....	II-18
Tabel 2.9	Jumlah penduduk, LPP dan kepadatan kabupaten majalengka tahun 2013-2017 .....	II-19
Tabel 2.10	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kab Majalengka tahun 2017 ...	II-20
Tabel 2.11	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-21
Tabel 2.12	persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki tahun 2013-2017 .....	II-21
Tabel 2.13	PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-22
Tabel 2.14	Nilai sektor dalam PDRB tahun 2013-2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 dan atas dasar harga berlaku Kabupaten Majalengka.....	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2013- 2017 atas dasar harga berlaku dan harga konstan Kabupaten ajalengka.....	II-23
Tabel 2.16	Laju inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017.....	II-24
Tabel 2.17	Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-24
Tabel 2.18	Angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2018.....	II-25
Tabel 2.19	Angka harapan hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018 .....	II-27
Tabel 2.20	Persentase balita gizi buruk Kabupaten Majalengka.....	II-27
Tabel 2.21	Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017.....	II-28
Tabel 2.22	Perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Majalengka 2013-2017 ...	II-28
Tabel 2.23	Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017.....	II-29
Tabel 2.24	Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017.....	II-31



Tabel 2.25	Perkembangan kondisi bangunan sekolah Kabupaten Majalengka 2013-2017...	II-31
Tabel 2.26	Kesediaan sekolah & penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-32
Tabel 2.27	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-32
Tabel 2.28	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten majalengka tahun 2013-2017 .....	II-33
Tabel 2.29	Perkembangan rasio posyandu di Kabupaten Majalengka .....	II-34
Tabel 2.30	Jumlah rumah sakit, puskesmas, pustu dan poliklinik di Kabupaten Majalengka tahun 2017 .....	II-34
Tabel 2.31	Rasio dan cakupan puskesmas, poliklinik dan pustu Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-35
Tabel 2.32	Jumlah tenaga medis dokter di Kabupaten Majalengka tahun 2017 .....	II-36
Tabel 2.32a	Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-37
Tabel 2.33	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Majalengka tahun 2013 - 2017 .....	II-38
Tabel 2.34	Persentase pasien miskin yang ditangani Kabupaten Majalengka .....	II-38
Tabel 2.35	Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-39
Tabel 2.36	Jumlah kondisi bangunan air pada jaringan irigasi di bawah 1000 ha di Kabupaten Majalengka tahun 2017 .....	II-39
Tabel 2.37	Jaringan irigasi di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-40
Tabel 2.38	Kondisi pemanfaatan ruang Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-40
Tabel 2.39	Kondisi perumahan (rumah tangga) di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-41
Tabel 2.40	Kondisi rumah layak huni di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-41
Tabel 2.41	Indikator pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-41
Tabel 2.42	Data penanganan masalah sosial Kabupaten Majalengka .....	II-42
Tabel 2.43	Data situasi ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka .....	II-44
Tabel 2.44	Capaian ketahanan pangan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-45
Tabel 2.45	Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut golongan luas lahan yang disukai .....	II-47



Tabel 2.46	Indikator kinerja pembangunan daerah kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-47
Tabel 2.47	Data keluarga berencana dan keluarga sejahtera Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-49
Tabel 2.48	Kondisi perhubungan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-49
Tabel 2.49	Struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka tahun 2017.....	II-50
Tabel 2.50	Indikator perhubungan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-51
Tabel 2.51	Data komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-51
Tabel 2.52	Jumlah tower telekomunikasi di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-51
Tabel 2.53	Jumlah koperasi yang masih aktif di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017..	II-52
Tabel 2.54	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-52
Tabel 2.55	Data kategori perusahaan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-53
Tabel 2.56	Perkembangan data kepenmudaan dan olahraga Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-53
Tabel 2.57	Ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-53
Tabel 2.58	Kegiatan bidang kebudayaan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-54
Tabel 2.59	Data perpustakaan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-54
Tabel 2.60	Data kinerja kearsipan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-55
Tabel 2.61	Luas tanam komoditas tanaman pangan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-56
Tabel 2.62	Luas panen komoditas tanaman pangan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-56
Tabel 2.63	Produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-56
Tabel 2.64	Luas Tanam dan Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka 2013-2017.....	II-57
Tabel 2.65	Produksi komoditas tanaman hortikultura Kabupaten Majalengka 2013-2017...	II-57
Tabel 2.66	Luas tanam komoditas tanaman buah buahan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-58
Tabel 2.67	Luas panen komoditas tanaman buah buahan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-59





Tabel 2.68	Produksi komoditas tanaman buah buahan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-59
Tabel 2.69	Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-59
Tabel 2.70	Populasi peternakan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-60
Tabel 2.71	Produksi peternakan Kabupaten Majalengka 2013-2017.....	II-60
Tabel 2.72	Luas tanam komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-61
Tabel 2.73	Produksi komoditas tanaman perkebunan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-61
Tabel 2.74	Produksi ikan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-62
Tabel 2.75	Objek wisata Kabupaten Majalengka .....	II-62
Tabel 2.76	Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-64
Tabel 2.77	Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-65
Tabel 2.78	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-65
Tabel 2.79	Jenis industri dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Majalengka tahun 2017....	II-65
Tabel 2.80	Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Majalengka tahun 2013-2015.....	II-68
Tabel 2.81	Indikator perhubungan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-69
Tabel 2.82	Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-69
Tabel 2.83	Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017.....	II-70
Tabel 2.84	Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-71
Tabel 2.85	Jumlah kriminalitas di Kabupaten Majalengka tahun 2017 .....	II-71
Tabel 2.86	Jumlah demonstrasi di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-72
Tabel 2.87	Rasio ketergantungan/angka beban tanggungan di Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017 .....	II-73
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2019 .....	II-75
Tabel 3.1	Rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.....	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.....	III-5



Tabel 3.3	Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.....	III-7
Tabel 3.4	Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 .....	III-8
Tabel 3.5	Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 .....	III-14
Tabel 3.6	Defisit riil anggaran Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.....	III-15
Tabel 3.7	Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 .....	III-15
Tabel 3.8	Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 .....	III-16
Tabel 3.9	Proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018-2023 .....	III-19
Tabel 3.10	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 .....	III-28
Tabel 5.1	Visi RPJPD Kabupaten Majalengka, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.....	V-1
Tabel 5.2	Perbandingan Misi RPJMN, RPJMD Pro5insi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Majalengka .....	V-2
Tabel 5.3	Misi pembangunan pada RPJMN, RPJMD Pro5insi, RPJMD kabupaten majalengka .....	V-3
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan dan sasaran draft RPJMD Kabupaten Majalengka.....	V-5
Tabel 5.5	Komparasi tujuan dan sasaran antar dokumen perencanaan yang terkait .....	V-6
Tabel 5.6	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Majalengka.....	V-11
Tabel 6.1	Kerangka perumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan Evaluasi RPJPD	VI-2
Tabel 6.2	Misi, tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 .....	VI-4
Tabel 6.3	Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka .....	VI-12
Tabel 6.4	Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif .....	VI-18
Tabel 7.1	Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten majalengka tahun 2019-2023.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi rencana program prioritas yang disertasi kebutuhan pendanaan Kabupaten majalengka tahun 2019.....	VII-3
Tabel 7.3	Indikasi rencana program prioritas yang disertasi kebutuhan pendanaan Kabupaten majalengka tahun 2018-2023.....	VII-14
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 .....	VIII-3



Tabel 8.2	Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023....	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tingkat Dampak/Impact .....	VIII-5
Tabel 8.4	Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome .....	VIII-7



BAB I  
PENDAHULUAN





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat mewujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Majalengka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Karna Sobahi dan Tarsono Mardiana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 19 Desember 2018.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang terdiri dari empat tahapan pembangunan. Pada tahap keempat ini, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan difokuskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang stabil berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Secara substansi, RPJMD berisi penjabaran visi misi kepala daerah terpilih termasuk di dalamnya tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dihadapkan kepada berbagai isu strategis yang tengah berkembang, baik di tingkat global, nasional, regional maupun lokal. Isu-isu strategis tersebut diantaranya menyangkut pendudukan percepatan kinerja pemerintah yang telah ditentukan dalam 9 agenda prioritas pembangunan Nawacita dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta dihadapkan dengan fenomena khusus yang berada di daerah, diantaranya pembangunan sejumlah infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Aerocity Kertajati, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta penumbuhkembangan daya saing daerah.

Penyusunan RPJMD juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang dinamis terkait Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Desa, Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Keseluruhannya itu merupakan tuntutan dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah dengan arah pembangunan yang mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi daerah dan pengelolaan isu maupun permasalahan yang ada melalui penciptaan solusi sehingga mampu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Dari uraian di atas dan untuk menghasilkan sebuah perencanaan jangka menengah daerah yang membumi dan implementatif, selain memiliki keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dilakukan melalui beberapa pendekatan.

Dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah, yaitu (1) berorientasi proses dan (2) berorientasi



substantif. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah berorientasi proses, terdiri atas:

1. Politik, pendekatan ini menitikberatkan pada program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Sedangkan pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah berorientasi substantif terdiri atas:

1. Holistik-Tematik, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3. Spasial, pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berdasarkan berbagai pendekatan tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target pembangunan di Kabupaten Majalengka. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ini pun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan demikian penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ini disusun sesuai ketentuan yang terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dari RPJMD Kabupaten Majalengka adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh



ketentuanperaturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang–undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan





- RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  19. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2101 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

#### 1.3.1. Hubungan RPJMD KabupatenMajalengkadengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RancanagnRPJMD KabupatenMajalengka Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi,tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalamRPJMD KabupatenMajalengka dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dankarakteristik daerah.

#### 1.3.2. Hubungan RPJMD KabupatenMajalengka dengan RPJMD ProvinsiJawa Barat

PenyusunanRPJMDKabupatenMajalengkaTahun 2018-2023 mempedomani RPJMD provinsi, sebagaimanadiamanatkanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 2017 dilakukandengancaramenyelaraskanvisi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategidanprogrampembangunanjangkamenengahdaerahkabupatendenganarahsertaprioritaspembangunandaerahprovinsi,arahkebijakan, danprioritasuntukbidangpembangunan, danpembangunankewilayahansesuaيدengankewenangan, kondisi, dankarakteristik Daerah.

#### 1.3.3. Hubungan RPJMD KabupatenMajalengka dengan RPJPD, RKPD,RenstraPerangkat Daerah dan RenjaPerangkat Daerah

RPJPD KabupatenMajalengka Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misidan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depanmerupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD KabupatenMajalengkaTahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakanpembangunan tahap IV RPJPD KabupatenMajalengkaTahun2005-2025.

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis(Renstra)Perangkat Daerah. RenstraPerangkat Daerah merupakan rencana kerja 5(lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunanperangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaranpembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD sertapenyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunanlima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiapperangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Penjabaran rencana tahunanperangkat daerah termuat dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

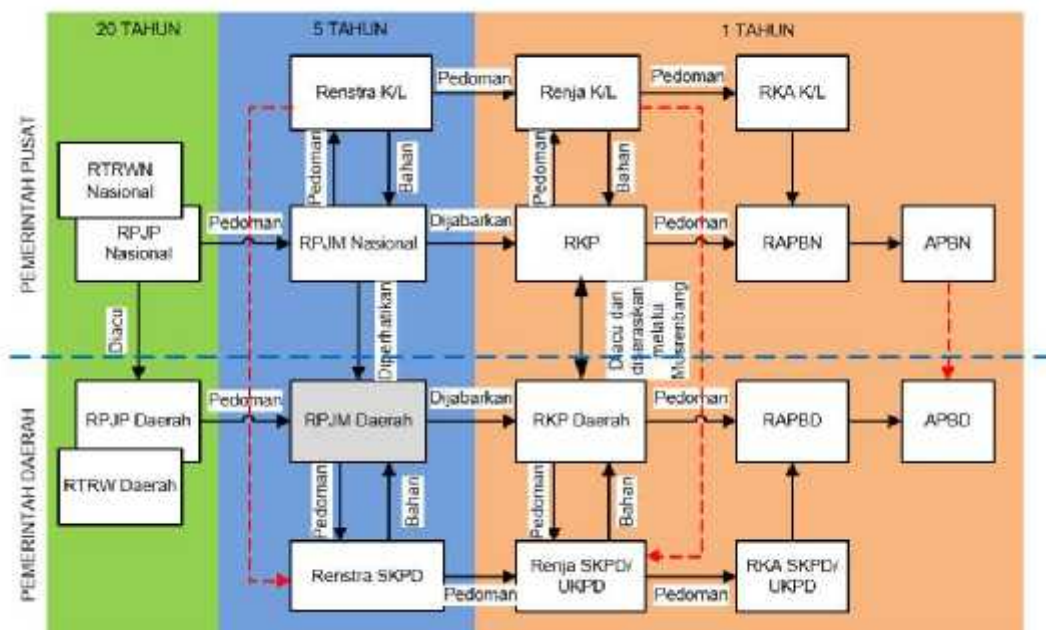
#### 1.3.4. Hubungan RPJMD KabupatenMajalengka dengan RTRW KabupatenMajalengka

Penyusunan RPJMD KabupatenMajalengka Tahun 2018-2023memperhatikan RTRW KabupatenMajalengkaTahun2011-2031 yang ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031

Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan,sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah KabupatenMajalengka dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

#### 1.3.5. Hubungan RPJMD KabupatenMajalengka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD KabupatenMajalengka

Penyusunan RPJMDKabupatenMajalengkaTahun 2018-2023di dalamnyamencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD KabupatenMajalengkaTahun 2018-2023. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh danpartisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutantelah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayahdan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS denganmemperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunanrekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/ataukompensasi program dan kegiatan dalam RenstraPerangkat Daerah.



Gambar 1.1.  
Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD KabupatenMajalengkaTahun2018-2023adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengahKabupatenMajalengka 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratifdan berbasis spasial.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD KabupatenMajalengkaTauhun 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah daerah KabupatenMajalengkaTahun2014-2018.
2. Menelaah kinerja keuangan KabupatenMajalengkaTahun2014-2018 dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah KabupatenMajalengka.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal KabupatenMajalengka.
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakanpembangunan KabupatenMajalengka 5 (lima) tahun kedepan.
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaranpembangunan.
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci(IKK) beserta target untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, faktor-faktor yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka dan sistematika penulisan.

##### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan dasar-dasar analisis berupa profil umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah.

##### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.





- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**  
Bab ini menyajikan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2018-2023.
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator Kinerja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.
- BAB IX PENUTUP**  
Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMDKabupaten Majalengka Tahun2018-2023 yang telah disusun dan ditetapkan.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KONDISI DAERAH**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dinamika pembangunan Kabupaten Majalengka menunjukkan pertumbuhan yang positif ditandai keberhasilan pembangunan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan. Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat dengan luas 1.204,24 km<sup>2</sup> atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km<sup>2</sup>). Secara geografis, Kabupaten Majalengka berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan titik koordinat 6<sup>0</sup>32'16,39" Lintang Selatan sampai dengan 7<sup>0</sup>4'24,75" Lintang Selatan dan 108<sup>0</sup>2' 30,87" Bujur Timur sampai dengan 108<sup>0</sup>24' 32,84" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa, dengan batas wilayah, sebelah utara: Kabupaten Indramayu; sebelah timur: Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebelah selatan: Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; dan sebelah barat: Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.1.  
Batas wilayah administratif Kabupaten Majalengka

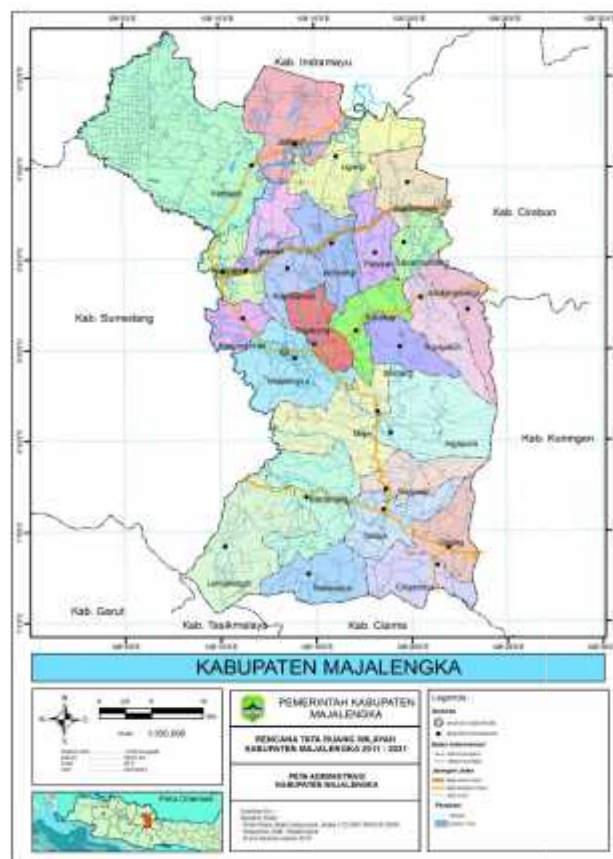


Secara administratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa, secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.  
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Majalengka	4	10	14.	Sindangwangi	10	-
2.	Panyingkiran	9	-	15.	Sukahaji	13	-
3.	Kadipaten	7	-	16.	Sindang	7	-
4.	Dawuan	11	-	17.	Cigasong	7	3
5.	Kasokandel	10	-	18.	Maja	18	-
6.	Kertajati	14	-	19.	Argapura	14	-
7.	Jatitujuh	15	-	20.	Banjaran	13	-
8.	Jatiwangi	16	-	21.	Talaga	17	-
9.	Palasah	13	-	22.	Cikijing	15	-
10.	Ligung	19	-	23.	Cingambul	13	-
11.	Sumberjaya	15	-	24.	Bantarujeg	13	-
12.	Leuwimunding	14	-	25.	Lemahsugih	19	-
13.	Rajagaluh	13	-	26.	Malasma	11	-
Jumlah		Kecamatan				26	
		Desa				330	
		Kelurahan				13	

Sumber: Kabupaten Majalengka dalam Angka 2018, yang dikelola dalam SIPD.



Gambar 2.2.  
Peta wilayah administratif Kabupaten Majalengka



Adapun untuk mengetahui luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Majalengka adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.  
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase	No.	Nama Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Majalengka	57,00	4,73	14.	Sindangwangi	31,76	2,64
2.	Panyingkiran	22,98	1,91	15.	Sukahaji	32,52	2,7
3.	Kadipaten	21,86	1,82	16.	Sindang	23,97	1,99
4.	Dawuan	23,80	1,98	17.	Cigasong	24,17	2,01
5.	Kasokandel	31,61	2,62	18.	Maja	65,21	5,42
6.	Kertajati	138,36	11,49	19.	Argapura	60,56	5,03
7.	Jatitujuh	73,66	6,12	20.	Banjaran	41,98	3,49
8.	Jatiwangi	40,03	3,32	21.	Talaga	43,50	3,61
9.	Palasah	38,69	3,21	22.	Cikijing	43,54	3,62
10.	Ligung	62,25	5,17	23.	Cingambul	37,03	3,07
11.	Sumberjaya	32,73	2,72	24.	Bantarujeg	66,52	5,52
12.	Leuwimunding	32,46	2,7	25.	Lemahsugih	78,64	6,53
13.	Rajagaluh	34,37	2,85	26.	Malausma	45,04	3,74
Kabupaten Majalengka		Luas Kabupaten Majalengka (Km <sup>2</sup> )				1204,24	
		Persentase				100,00	

Sumber: BPS Majalengka, 2017, yang dikelola dalam SIPD.



Gambar 2.3.

Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam Rencana Struktur Ruang Jawa Barat 2025

Secara geostrategis, Kabupaten Majalengka diapit oleh 2 PKN, yakni PKN Cirebon Raya dan Bandung Raya, serta berada di perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbang Kertosusila. Kondisi wilayah Kabupaten Majalengka yang strategis, didukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui agenda pembangunan Nawacita serta sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati Aerocity, Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), kawasan industri dan jalur kereta api diharapkan mampu mengakselerasi perwujudan koridor sekaligus mengurangi beban aktivitas ekonomi di Jawa Barat Bagian Barat (melalui PKW Kadipaten). Sinergitas setiap kebijakan dan program pemerintah di tingkat daerah hingga nasional dibutuhkan guna mendukung realisasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan pengembangan Jawa Barat Bagian Timur.

Berdasarkan karakteristik topografinya, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat ketinggian dan kemiringan. Secara umum wilayah Kabupaten Majalengka terbagi menjadi 3 klasifikasi ketinggian dan kemiringan, yaitu dataran rendah (0-100 mdpl, kemiringan 5-8%), dataran sedang (100-500 mdpl, kemiringan 15-25%) dan dataran tinggi (>500 mdpl, kemiringan 25-40%). Wilayah yang terkategori dataran rendah seluas 28,7%; dataran sedang/menengah 31,27% dan dataran tinggi yang luasnya mencapai 40,03% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Majalengka (Bappeda Kab. Majalengka, 2017).

Kondisi bentang alamnya sebagian besar melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan aliran sungai dan mata air mengalir ke arah utara, sehingga areal persawahan tumbuh subur di wilayah bagian utara Kabupaten Majalengka. Sedangkan perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di sekitar lereng Gunung Ciremai dan Gunung Cakrabuana. Kondisi ini selain sangat berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang dan pengembangan potensi wilayah, juga menyebabkan adanya daerah rawan longsor. Adapun distribusi ketiga topografi yang ada di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Dataran rendah, mempunyai kemiringan tanah antara 0-15% meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kecamatan yang mempunyai kemiringan 0-15% seluruh wilayahnya terdiri atas Kecamatan Cigasong, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kertajati, Ligung dan Palasah.
2. Berbukit gelombang, kemiringan tanahnya berkisar antara 15%-40%, meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Kasokandel, Lemahsugih, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, dan Talaga.
3. Perbukitan terjal, kemiringan tanahnya >40%, meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindangwangi, Sukahaji, Sindang, Sumberjaya, dan Talaga.



Berdasarkan sebaran dan struktur batuan, kondisi geologis Kabupaten Majalengka meliputi: Aluvium seluas 17.162 Ha (14,25%), Pleistocene SedimentaryFacies seluas 13.716 Ha (13,39%), Miocene Sedimentary Facies seluas 23,48 Ha(19,50%), Undiferentionet Vulcanic Product seluas 51.650 Ha (42,89%), PlioceneSedimentary Facies, seluas 3.870 Ha (3,22%), Liparite Dacite seluas 179 Ha (0,15%), Eosene, seluas 78 Ha (0,006%), Old Quaternary Volkanik Product seluas 10.283 Ha(8,54%). Kondisi geologi Kabupaten Majalengka juga terdapat formasi Sesar Baribis yang berada di sekitar Gunung Ciremai dan berpotensi menyebabkan patahan rawan gempa, terutama untuk daerah Selatan dan Timur.

Kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka meliputi sumber daya air dan potensi ketersediaan air. Sumber daya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan yang menjadi sumber utama kebutuhan air, khususnya untuk pengairan sawah diperoleh dari dua sungai besar, yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung, serta beberapa anak sungai lainnya. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang dan Talagaherang. Sementara potensi air permukaan lainnya berada di sejumlah tempat yang memiliki debit air tinggi yang berasal dari sumber mata air. Pada umumnya sumber mata air tersebut berada di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Secara umum kondisi ketersediaan sumber mata air bawah tanah (ABT) cukup baik, meskipun beberapa kecamatan masih kurang baik seperti Kertajati, Dawuan dan Ligung.

Tabel 2.3.  
Potensi air permukaan di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
1	Cilutung	Kamun	9.289	50,73	0,41
2	Cideres	Tirtanegara, Cigasong	2.741	3,94	0,65
3	Cikeruh	Cikeruh, Cebutul	3.354	10,68	0,99
4	Ciherang	Ciherang	1.009	1,76	0,3
5	Cikadongdong	Cikemangi, Cikondang	2.411	1,47	0,4
6	Ciwaringin	Ciwaringin	3.387	6,36	0,44
7	Cilongkrang	Ciminggiri	Suplai ke Bd Ciawi	0,79	0,29
8	Ciawi	Ciawi	151	1,02	0,28
9	Cimanuk	Rentang	571	900	500
10	Cihikeu	Citeureup	348	1.252	0,26
11	Cihieum	Cihieum	556	4.512	0,25
12	Cisampora	Cimingking	383	1.439	0,18
JUMLAH			24.230	8.179,75	504,45

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.4.  
Potensi Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Majalengka

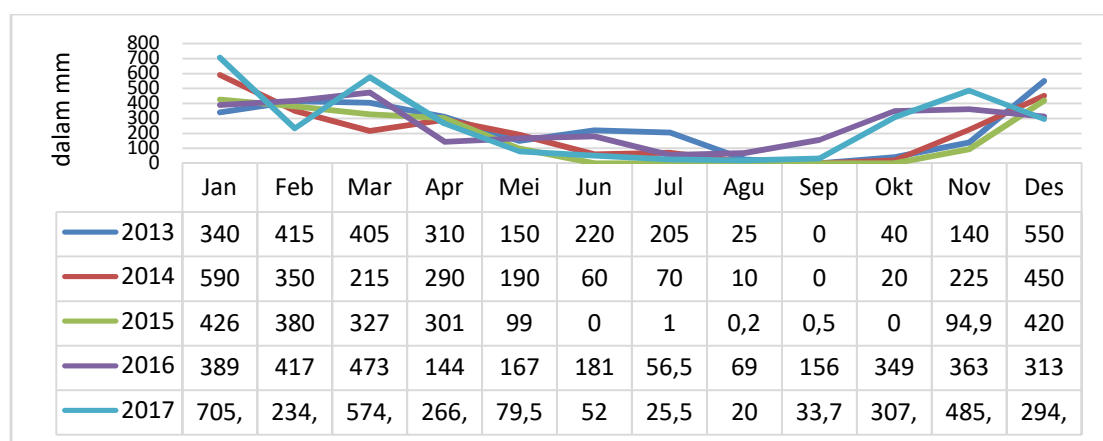
No.	Kisaran Indeks Rata-rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1	1,64 – 2,01	Kertajati – Ligung – Dawuan dan Kasokandel - Jatiwangi	D	Kurang Berpotensi
2	2,01 – 2,31	Palasah – Leuwimunding – Panyingkiran – Majalengka – Cigasong – Sukahaji dan Sindang – Bantarujeg dan Malausma – Talaga - Cingambul	C	Potensi Sedang
3	2,31 – 2,61	Sumberjaya – Rajagaluh – Maja – Lemahsugih - Banjaran	B	Berpotensi
4	2,61 - 3,14	Kadipaten – Sindangwangi – Argapura – Jatitujuh - Cikijing	A	Sangat Berpotensi

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031

Kondisi klimatologis di Kabupaten Majalengka pada tahun 2017, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 705,8 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 20 mm. Kecepatan angin rata-rata berkisar 4 knot dan kecepatan tertinggi 24 knot dan kecepatan angin terendah 3 knot dengan arah angin berhembus dari barat hingga utara. Kabupaten Majalengka terkenal dengan sebutan Kota Angin karena memang pada bulan-bulan tertentu di musim kemarau angin berhembus dengan kecepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Suhu terendah di Kabupaten Majalengka pada tahun 2017 mencapai 22,9°C dan suhu tertinggi mencapai 24,6°C. Sementara kelembaban udara terendah mencapai 64% dan kelembaban udara tertinggi mencapai 86%.

Gambar 2.4.  
Data Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber: BMKG Jatiwangi, 2018

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan





yang ada. Kabupaten Majalengka merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang dipergunakan untuk area persawahan. Luas lahan sawah pada tahun 2017 sebesar 50.405 Ha, dengan luas area yang menggunakan irigasi mencapai 36,870%. Sedangkan untuk luas tadah hujan mencapai 13.535 Ha.

Berdasarkan Data Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2017 mulai didominasi lahan non sawah, yaitu sebesar 70.019%, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.694 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingiat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2017 seluas 50.405 Ha merupakan penggunaan lahan terbesar kedua, dengan rincian luas sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan irigasi non PU sebesar 36.870 Ha dan tadah hujan seluas 13.535 Ha. Wilayah kecamatan yang memiliki luas areal sawah tertinggi adalah Kertajati dan Ligung. Secara lebih jelas, dinamika pola penggunaan lahan di Kabupaten Majalengka dari tahun 2013-2017 terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5.  
Perkembangan penggunaan lahan Kabupaten Majalengka tahun 2013-2017

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Lahan Sawah						
1	Irigasi Teknis	36.513	36.232	36.244	36.924	36.870
2	Irigasi ½ Teknis					
3	Irigasi Sederhana Milik PU					
4	Irigasi Non PU					
5	Tadah Hujan	14.449	14.102	13.791	13.535	13.535
6	Polder dan sawah lainnya	-	-	-	-	-
Luas Lahan Sawah		50.962	50.334	50.035	50.459	50.405
Lahan Bukan Sawah						
1	Pekarangan/bangunan	13.030	13.045	13.413	13.512	13.566
2	Tegal/Kebun	23.499	22.058	22.694	23.694	23.694
3	Ladang/Huma	-	2.066	2.066	1.928	1.928
4	Pengembalaan/Padang Rumput	495	495	495	495	495
5	Sementara tdk diusahakan	28	-	-	-	-
6	Ditanami pohon/Hutan Rakyat	5.682	5.702	5.622	5.602	5.622
7	Hutan Negara	17.203	17.203	16.203	14.641	14.641
8	Perkebunan	739	739	739	739	739
9	Lahan lainnya	7.359	7.957	7.658	7.734	7.714
10	Rawa-rawa	99	99	99	99	99
11	Tambak	-	-	-	-	-
12	Kolam/empang	1.328	726	1.400	1.521	1.521
Luas Lahan Bukan Sawah		69.462	70.090	70.389	69.965	70.019
Luas Lahan Keseluruhan		120.424	120.424	120.424	120.424	120.424

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2017 didominasi lahan non sawah, yaitu seluas 70.019 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.694 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Luas lahan sawah pada tahun 2017 seluas 50.405 Ha menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka masih pada sektor pertanian.

### 2.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.5.  
Kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan budidaya



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Berdasarkan Perda dimaksud kawasan budidaya Kabupaten Majalengka terdiri atas :

a) Kawasan peruntukkan hutan produksi.

Kawasan peruntukkan hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 12.934 hektar. Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 10.779 Ha, meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Rajagaluh; dan Kecamatan Bantarujeg. Kawasan peruntukkan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.135 Ha hektar, meliputi: Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Talaga; Kecamatan Cingambul; dan Kecamatan Lemahsugih

b) Kawasan peruntukkan pertanian.

Kawasan peruntukkan pertanian seluas 43.946 Ha terdiri atas :

a) Kawasan Peruntukkan Pertanian Tanaman Pangan;



- b) Kawasan Peruntukkan Hortikultura;
- c) Kawasan Peruntukkan Perkebunan; dan
- d) Kawasan Peruntukkan Peternakan.

Adapun uraian dari kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan; terdiri atas; kawasan peruntukkan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukkan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.190 Ha berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:
  - a) Sawah Irigasi Teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Sindang; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; Kecamatan Bantarujeg; dan Kecamatan Lemahsugih.
  - b) Sawah Irigasi Setengah Teknis meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Palasah; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Maja; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Malausma; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg.
  - c) Sawah Tadah Hujan meliputi: Kecamatan Kertajati; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Malausma; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cingambul.
2. Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering; seluas kurang lebih 626 Ha berada di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukkan hortikultura seluas kurang lebih 1.465 Ha berada di seluruh kecamatan dan tidak terdapat di Kecamatan Kadipaten;
3. Kawasan peruntukkan perkebunan seluas 1.881 hektar, meliputi: kawasan peruntukkan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 1.357 hektar berada di seluruh kecamatan; dan kawasan peruntukkan perkebunan dengan fungsi lindung seluas kurang lebih 524 hektar berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut meliputi: Kecamatan Lemahsugih; Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Malausma; Kecamatan Argapura; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Sindang



4. Kawasan peruntukkan peternakan seluas kurang lebih 784 hektar meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Lemahsugih; dan Kecamatan Panyingkiran.

c) Kawasan peruntukkan perikanan.

Kawasan peruntukkan perikanan seluas 1.717 hektar, terdiri atas:

1. Peruntukkan kawasan perikanan tangkap, berupa sungai sepanjang 536 km meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Kadipaten dan situ dan rawa seluas 266 Ha dengan prioritas pengembangan meliputi Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh;
2. Peruntukkan kawasan perikanan budidaya, meliputi : 1) kolam air tenang seluas 696 hektar dan kolam air deras seluas 35 hektar dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Rajagaluh; Kecamatan Sindangwangi; dan Kecamatan Jatitujuh; 2) sungai sepanjang kurang lebih 536 kilometer dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kertajati; dan Kecamatan Kadipaten; 3) situ dan rawa dengan luas kurang lebih 266 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Rajagaluh dan 4) Sawah atau mina padi seluas kurang lebih 219 hektar dengan prioritas pengembangan meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Maja; Kecamatan Palasah; dan Kecamatan Sindangwangi.
3. Pengembangan pengolahan perikanan.

d) Kawasan peruntukkan pertambangan.

Kawasan peruntukkan pertambangan seluas kurang lebih 1.724 hektar meliputi:

1. Kawasan peruntukkan mineral dan batuan terdiri atas : 1) Logam berupa emas meliputi: Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Maja; dan Kecamatan Argapura; 2) Non Logam, terdiri atas: a) Batu gamping, meliputi: Kecamatan Dawuan; dan Kecamatan Cigasong; b) Lempung, meliputi: Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Palasah; Kecamatan Ligung; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; Kecamatan Cigasong; Kecamatan Sindang; Kecamatan Maja; Kecamatan Banjaran; Kecamatan Leuwimunding; 3) Batuan, terdiri atas: a) Batuan beku, meliputi: Kecamatan Argapura; Kecamatan Bantarujeg; Kecamatan Cikijing; Kecamatan Talaga; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Sindangwangi; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Majalengka; b) Batu pasir, meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Majalengka; c) Pasir endapan sungai purba, meliputi: Kecamatan Majalengka; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Panyingkiran; d) Pasir endapan alluvial meliputi: Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Ligung; e) Sirtu, meliputi: Kecamatan Panyingkiran; Kecamatan Majalengka;



Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Sukahaji; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Kasokandel;

2. Kawasan peruntukkan minyak dan gas bumi, meliputi : Desa Bongas Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Maja; dan Desa Kodasari di Kecamatan Ligung; dan
3. Kawasan peruntukkan panas bumi berada di Kecamatan Cikijing.

e) Kawasan peruntukkan industri.

Kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 1.324 hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukkan industri besar, meliputi : Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah;
2. Kawasan peruntukkan industri menengah, meliputi : 1) sebaran lokasi kawasan peruntukkan industri menengah berada di : Kecamatan Jatitujuh; Kecamatan Kadipaten; Kecamatan Kertajati; Kecamatan Ligung; Kecamatan Dawuan; Kecamatan Kasokandel; Kecamatan Jatiwangi; Kecamatan Sumberjaya; Kecamatan Leuwimunding; dan Kecamatan Palasah; 2) pengembangan klaster Industri Kecil Menengah (IKM) berupa mebel dan konveksi; dan 3) pengembangan agroindustri;
3. Kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro, berada di seluruh kecamatan pengembangan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi: wisata industri; dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan.
4. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Terpadu berada di Kecamatan Kertajati.

f) Kawasan peruntukkan pariwisata.

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas:

1. Pariwisata budaya, meliputi : Jatiwangi Festival Budaya Kreatif Tradisional (Jatiwangi Art Factory) berada di Kecamatan Jatiwangi; Kuliner Nusantara Kecap Majalengka berada di Kecamatan Majalengka; Petilasan PrabuSiliwangi berada di Kecamatan Rajagaluh; Situ Sangiang eko-religi berada di Kecamatan Banjaran;
2. Pariwisata alam, meliputi : Bendung Rentang Water Festival berada di Kecamatan Jatitujuh; Curug Muara Jaya berada di Kecamatan Argapura; Agrowisata Gedong Gincu Panyingkiran berada di Kecamatan Panyingkiran; Agrowisata Sadarehe berada di Kecamatan Rajagaluh; Eko Wisata Batu Luhur berada di Kecamatan Sindangwangi; Sindangwangi Mina Wisata berada di Kecamatan Sindangwangi; dan Situ Cipanten di Kecamatan Sindang.
3. Pariwisata buatan, meliputi : Majalengka Spektakuler berada di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka; Jabar Edu Park berada di Kecamatan Sindangwangi; Jurassic Park Lemah Putih berada di Kecamatan Lemahsugih; Gagaraji Internasional Sircuit berada di Kecamatan Jatitujuh; Galery Bola Majalengka berada di





Kecamatan Kadipaten; dan Sang Raja Child Competition berada di Kecamatan Cigasong.

g) Kawasan peruntukkan permukiman.

Kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 13.455 hektar terdiri atas:

1. Permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.480 hektar meliputi: permukiman perkotaan PKW; permukiman perkotaan PKL; dan permukiman perkotaan PPK termasuk pembangunan kawasan permukiman di Kertajati Aerocity;
2. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.975 hektar meliputi: permukiman perdesaan PPL; dan permukiman desa.

h) Kawasan peruntukkan lainnya.

Kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas:

1. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, meliputi: pengembangan perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan PKW dan PKL; peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional apabila dikaitkan dengan pembangunan BIJB, Jalan Tol, dan Jalur Kereta Api; peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien; peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor;
2. Kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity, meliputi: pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 hektar; dan pengembangan kawasan Kertajati Aerocity seluas kurang lebih 3.200 hektar; dan
3. Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan, meliputi: Batalyon Infanteri 321 di Kecamatan Cigasong; Komando Distrik Militer (Kodim) 0617 di Kecamatan Majalengka; Pangkalan Udara S. Sukani di Kecamatan Ligung; dan Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh wilayah kabupaten.

Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

a. Pusat Kegiatan Perkotaan :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di Perkotaan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.

b. Pusat Kegiatan Perdesaan :

Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.  
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka

No.	Pusat Kegiatan / Kecamatan	Fungsi Pelayanan
A.	Pusat Kegiatan Perkotaan	
1.	Pusat Kegiatan Wilayah	
	a. PKW Kadipaten (Kec. Kadipaten dan Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri.
2.	Pusat Kegiatan Lokal	
	a. Perkotaan Majalengka (Kec. Majalengka, Cigasong, Panyingkiran)	Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	b. Perkotaan Kertajati (Kec. Kertajati, Jatitujuh, Ligung)	Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.
	c. Perkotaan Jatiwangi (Kec. Jatiwangi, Kasokandel, Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding)	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan dan pertanian.
	d. Perkotaan Rajagaluh (Kec. Rajagaluh, Sukahaji, Sindang, Sindangwangi)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.
	e. Perkotaan Cikijing (Kec. Cikijing, Cingambul, Banjaran, Argapura)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata,



No.	Pusat Kegiatan / Kecamatan	Fungsi Pelayanan
		pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional dan industri kecil.
	f. Perkotaan Talaga (Kec. Talaga, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan	
	a. Perkotaan Kasokandel (Kec. Kasokandel)	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan dan pertanian.
	b. PerkotaanLeuwimunding (Kec. Lewimunding)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, industri dan pendukung kawasan perumahan.
	c. Perkotaan Palasah (Kec. Palasah)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri, pendukung kawasan perumahan dan pertanian.
	c. Perkotaan Jatitujuh (Jatitujuh)	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri, pendukung komersial dan pertanian.
	e. Perkotaan Ligung (Kec. Ligung)	Sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial dan pertanian.
	f. Perkotaan Sumberjaya (Kec. Sumberjaya)	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan, pelayanan sosial dan pertanian.
	g. Perkotaan Sindangwangi (Kec. Sindangwangi)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	h. Perkotaan Sukahaji (Kec. Sukahaji)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan.
	i. Perkotaan Lemahsugih (Kec. Lemahsugih)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), serta pengembangan pariwisata.
	j. Perkotaan Bantarujeg (Kec. Bantarujeg)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata.
	k. Perkotaan Maja (Kec. Maja)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata dan terminal regional.
	l. Perkotaan Argapura (Kec. Argapura)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata.



No.	Pusat Kegiatan / Kecamatan	Fungsi Pelayanan
	m. Perkotaan Banjaran (Kec. Banjaran)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata.
B.	Pusat Kegiatan Perdesaan	
1.	Pusat Pelayanan Lingkungan	
	a. PPL Sindang (Kec. Sindang)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan.
	b. PPL Malausma (Kec. Malausma)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan.
	c. PPL Cingambul (Kec. Cingambul)	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil.

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.

### 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum dilihat dari kondisi geografis, wilayah Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian 400 - 500 m diatas permukaan laut dan berbahaya relatif panas.

Berdasarkan posisi tersebut di atas, maka hampir seluruh Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bencana yang mungkin dapat terjadi setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana tersebut akan terjadi. Kabupaten Majalengka termasuk daerah rawan terjadinya bencana seperti halnya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi geologisnya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat perbukitan dan aliran sungai yang cukup besar.

Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka yang kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan sangat berpotensi terjadinya longsor bencana pergeseran tanah di daerah ini, sesuai hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat.

Sedangkan wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekwensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai – sungai kecil yang bermuara di sungai – sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir.

Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta benda masyarakat.

Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan. Banyaknya

korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena – fenomena diatas, Kabupaten Majalengka yang relative tidak aman dari bencana, namun demikian harus tetap waspada agar dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.  
Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	BENCANA
1	Kec. Argapura	
	Cikaracak; Sukamanah	Longsor bahan rombakan, Vulkanik : Potensi terlenda hujan abu dan lontaran batu KRBI
	Cibunut	Longsor bahan rombakan
	Argamukti; Argalingga; Mekarwangi; Gunungwangi	Longsor bahan rombakan; Vulkanik : Potensi aliran awal panas, lava, lahar (KRB II) dan potensi terlenda hujan abu dan lontaran batu KRB I
	Cibunut; Haurseah; Tejamulya; Sukasari Kidul; Sukadana; Sadasari	Longsor bahan rombakan
2	Kec. Bantarujeg Sukamenak; Gunung larang; Babakan Sari; Cikidang; Haurgelis; Bantarujeg; Wado wetan; Salawangi; Cimanggu hilir; Sindang hurip; Cipeuteuy; Siliwangi	Longsor bahan rombakan
3	Kec. Banjaran Sangiang; Cimeong; Girmulya; Kareo; Genteng; Sindangpala; Panyindangan	Potensi terlenda hujan abu dan lontaran batu KRB I
4	Kec. Cingambul	
	Sedaraja	Longsor bahan rombakan
	Cikondang; Nagara Kembang; Wangkelang; Cintaasih; Rawa; Cingambul; Kondang mekar; Maniis	Longsor bahan rombakan
5	Kec. Cikijing Cipulus; Kasturi; Cilancang; Sindangpanj; Jagasari	Longsor bahan rombakan





NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	BENCANA
6	Kec. Lemahsugih Kalapadua; Sukajadi; Lemahputih; Sadawangi; Margajaya; Dayehwangi; Padarek ; Kepuh; Mekarwangi; Sinargalih; Cigaleuh; Bangbayang; Borogojol; Sindangwangi; Margajaya; Mekarmulya; Cibulan; Cipasung; Mangajaya; Cisolak	Longsor bahan rombakan
7	Kec. Maja	
	Cengal	Longsor bahan rombakan; Tektonil : Retakan
	Anggrawati; Gunungmanik; Banjaran; Wanahayu; Cicalung; Cihaur ; Nunuk; Nunuk Baru;	Longsor bahan rombakan
8	Kec. Majalengka	
	Cibodas; Sidamukti	Longsor bahan rombakan; Tektonik : Retakan
	Munjul; Babakanjawa; Cicurug; Kulur	Longsor bahan rombakan
9	Kec. Malausma	
	Ciranca; Lebakwangi	Nendatan dan retakan
	Cimuncang	Longsor bahan rombakan;
	Buninagara; Werasari; Malausma; Jagamulya	Longsor bahan rombakan
10	Kec. Panyingkiran Panyingkiran	Tektonik : Retakan
11	Kec. Rajagaluh Sindangpano; Rajagaluhlor; Cipinang; Cisetu; Rajagaluh; Rajagaluh kidul; Kumbung; Singawada; Babakan Kareo; Sadomas; Payung; Pajajar.	Longsor bahan rombakan, retakan
12	Kec. Sindangwangi Ujungberung; Bantaragung; Lengkong Kulon; Balagedog; Leuwilaja; Buah Kapas; Jeruk leueut; Sindang wangi.	Longsor bahan rombakan
13	Kec. Sindang	
	Pasirayu	Vulkanik : Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I
	Heubeulisuk; Mekarwangi	Longsor bahan rombakan
14	Kec. Talaga	
	Gunung manik	Vulkanik : Potensi terlanda hujan abu dan lontaran batu KRB I
	Cibeureum; Talaga kulon; Ganeas; Lampuyang; Talaga; Margamukti; Kertarahayu.	Longsor bahan rombakan
15	Kec. Ligung Wana salam; Ligung; Ampel; Deber; Leuwiliang; Sukamana; Majasari.	Longsor bahan rombakan
16	Kec. Leuwimunding	
	Ciparay; Parung jaya; Leuwimunding; Karang asem; Heuleut; Mirat; Tanjungsari; Leuwikujang; Nanggerang; Mindi; Rajawangi; Lame; Mindi.	Longsor bahan rombakan
17	Kec. Jatitujuh Biyawak; Pasindangan; Panongan.	Longsor bahan rombakan



NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	BENCANA
18	Kec. Kadipaten Cipaku; Karangsambung	Longsor bahan rombakan
19	Kec. Cigasong Cigasong; Batujaya; Karayunan; Babakan manjeti; Kutamunggu; Cicenang; Simpeureum; Tenjolayar; Tajur.	Longsor bahan rombakan
20	Kec. Dawuan Karanganyar; Salawana; Pasirmalati; Balida; Genteng; Sinarjati; Baturuyuk.	Longsor bahan rombakan
21	Kec. Kertajati Sukawana	Longsor bahan rombakan
22	Kec. Palasah Tarikolot	Longsor bahan rombakan
23	Kec. Sumberjaya Rancaputat; Banjaran; Parapatan; Paningkiran; Sepat; Garawangi; Cidenok;	Longsor bahan rombakan
24	Kec. Kasokandel Jatimulya	Longsor bahan rombakan
25	Kec. Jatiwangi Sukaraja kulon; Jatiwangi ; Sukaraja Wetan.	Longsor bahan rombakan
26	Kec. Sukahaji Cikalong	Longsor bahan rombakan

Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2018

Potensi bencana lainnya di wilayah Kabupaten Majalengka disebabkan oleh adanya abrasi, adapun wilayah yang termasuk kedalam bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.  
Data Potensi Bencana Akibat Abrasi di Wilayah Kabupaten Majalengka

NO	KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	ABRASI	KETERANGAN
1	KEC. CIGASONG		
	Cigasong	Pengikisan tanah	Sungai cideres
	Cicurug	Pengikisan tanah	Sungai Cideres dan Sungai Cijurey
2	KEC. MAJALENGKA		
	Tonjong; Tonjong; Tarikolot; Cijati; Babakan jawa; Munjul; Cibodas; Kulur; Sindangkasih.	Pengikisan tanah	Sungai Cideres
3	KEC. PANYINGKIRAN		
	Pasirmuncang; Jatipamor; Panyingkiran; Bantarasana; Leuwiseeng.	Pengikisan tanah	Sungai Cijurey
	Bonang	Pengikisan tanah	Sungai Cijurey dan Sungai Cilitung
4	KEC. KERTAJATI		
	Pakubereum; Sukawana; Kertajati; Bantarjati; Palasah; Kertawinangun; Babakan; Pasiripis; Mekarjaya; Syahbandar; Sukamulya.	Pengikisan tanah	Sungai Cimanuk
5	KEC. LIGUNG		
	Ligung Lor; Ligung; Bantarwaru;	Pengikisan tanah	Sungai Cikeruh



NO	KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	ABRASI	KETERANGAN
	Leweunghapi; Sukawera; Wanasalam.		
6	KEC. JATITUJUH		
	Jatitujuh; Randegan Wetan; Randegan Kulon; Panongan; Panyindangan.	Pengikisan tanah	Sungai Cimanuk
7	KEC. SUMBERJAYA		
	Loji Kobong; Bongaswetan	Pengikisan tanah	Sungai Cikamangi
	Pancasuji	Pengikisan tanah	Sungai Cikamangi, Cibugang
	Panjalin Kidul; Banjaran; Gelokmulya; Rancaputat.	Pengikisan tanah	Sungai Cikadongdong
	Sumberjaya; Garawangi	Pengikisan tanah	Sungai Cibugang
8	KEC. LEUWIMUNDING		
	Mirat; Patuanan; Leuwimunding.	Pengikisan tanah	-

Sumber : BPBD Kabupaten Majalengka, Tahun 2018

Untuk data banjir berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, daerah yang rawan terkena bencana banjir, sebarannya adalah di sepanjang tanggul di Desa Pakubeureum (Sungai Cimanuk) sampai Bendung Rentang, diantaranya melalui wilayah Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh dikarenakan jebolnya tanggung di Sungai tersebut.

### 2.1.3 Demografi

Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mencapai 1.278.753 jiwa, terdiri dari 645.435 jiwa laki-laki dan 633.318 jiwa perempuan, dengan Sex Ratio sebesar 101,9 % dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,75%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, Kepadatan dan Sex Ratio penduduk dapat dilihat pada tabel 2.9 dan 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018

No.	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.239.625	1.250.180	1.260.469	1.269.210	1.278.753
	Laki-laki (Jiwa)	630.228	632.319	638.120	644.595	645.435
	Perempuan (Jiwa)	609.397	617.861	622.349	624.615	633.318
2.	LPP (%)	0,26	0,85	0,82	0,69	0,75
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.029	1.038	1.047	1.054	1.062

Sumber : Database SIAK Konsolidasi per 31 Desember 2018 Disdukcapil Kab. Majalengka, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.10.  
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Lemahsugih	30.289	28.970	59.259	104,6
2	Bantarujeg	23.186	22.598	45.784	102,6
3	Cikijing	33.029	31.739	64.768	104,1
4	Talaga	24.663	23.604	48.267	104,5
5	Argapura	17.789	17.140	34.929	103,8
6	Maja	26.526	25.922	52.448	102,3
7	Majalengka	36.542	36.529	73.071	100,0
8	Sukahaji	23.309	23.058	46.367	101,1
9	Rajagaluh	23.712	23.176	46.888	102,3
10	Leuwimunding	32.002	31.176	63.178	102,6
11	Jatiwangi	44.215	43.782	87.997	101,0
12	Dawuan	23.475	23.403	46.878	100,3
13	Kadipaten	23.414	23.260	46.674	100,7
14	Kertajati	23.127	23.007	46.134	100,5
15	Jatitujuh	26.777	26.690	53.467	100,3
16	Ligung	32.660	32.689	65.349	99,9
17	Sumberjaya	31.824	31.332	63.156	101,6
18	Panyingkiran	16.447	16.491	32.938	99,7
19	Palasah	26.789	26.622	53.411	100,6
20	Cigasong	18.753	18.454	37.207	101,6
21	Sindangwangi	17.249	16.659	33.908	103,5
22	Banjaran	12.874	12.701	25.575	101,4
23	Cingambul	20.714	19.810	40.524	104,6
24	Kasokandel	25.421	25.094	50.515	101,3
25	Sindang	8.604	8.560	17.164	100,5
26	Malausma	22.045	20.852	42.897	105,7
Jumlah		645.435	633.318	1.278.753	101,9

Sumber : Database SIAK Konsolidasi per 31 Desember 2018 Disdukcapil Kab. Majalengka, yang dikelola dalam SIPD.

Karakteristik Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, Karakteristik penduduk Kabupaten Majalengka dilihat dari struktur penduduk (usia 15 tahun ke atas) menurut mata pencaharian pada tahun 2018 masih dominan bekerja pada sektor pertanian sebesar 36,32%, dengan kata lain bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian penduduk Kabupaten Majalengka. Sektor kedua yang menjadi sumber mata pencaharian adalah perdagangan, yaitu sebesar 25,83%. Persentase penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11.  
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Kegiatan Sektor Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian	29,35	35,24	38,08	28,02	36,32
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,89	1,46	1,06	0,70
3.	Industri Pengolahan	16,98	16,67	11,71	16,88	16,21
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,22	0,15	0,40	0,69	0,68
5.	Konstruksi	7,86	6,25	6,63	7,76	4,64
6.	Perdagangan	27,24	26,32	24,23	27,11	25,83
7.	Angkutan dan Komunikasi	3,90	3,35	1,98	3,41	2,89
8.	Keuangan	1,32	0,37	0,61	0,43	0,41
9.	Jasa-jasa/Lainnya	12,85	10,78	14,91	14,64	12,31
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Karakteristik Penduduk berdasarkan Pendidikan, Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2013-2017.

Tabel 2.12.  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak/Belum Punya Ijazah SD	19,36	18,11	19,08	19,90	19,60
SD	44,83	45,06	48,25	49,61	43,19
SLTP	19,85	20,75	19,35	14,15	20,50
SLTA	12,17	12,17	9,67	12,48	13,16
D1/D3	1,11	0,87	0,96	0,92	0,75
>=S1	2,68	3,04	2,68	2,94	2,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.





2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13.  
PDRB Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB atas dasar harga konstan 2010 (miliar rupiah)	15.012,89	15.750,66	16.590,93	17.591,79	18.789,49
2.	Laju PDRB (%)	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.14.  
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017  
Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)  
Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah)

No.	Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	Hk	3.916.642,91	3.950.746,95	3.916.563,04	4.043.305,20	4.090.793,20
		Hb	4.938.859,30	5.167.873,89	5.619.093,66	6.057.616,63	6.236.404,63
2	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	Hk	481.028,98	408.620,73	416.395,06	407.681,40	399.053,30
		Hb	538.869,75	455.350,05	450.397,38	435.124,51	423.961,42
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	Hk	1.963.521,98	2.132.192,86	2.309.058,50	2.557.507,60	2.900.098,90
		Hb	2.262.843,91	2.598.079,90	2.956.269,69	3.390.579,28	3.933.604,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	Hk	12.367,37	13.242,18	13.639,58	14.483,00	15.572,60
		Hb	10.431,40	12.035,09	14.696,00	17.734,78	21.749,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	Hk	8.440,88	8.849,58	9.378,07	9.924,80	10.491,80
		Hb	9.305,25	9.838,12	10.933,68	12.577,81	14.534,75
6	Konstruksi/Construction	Hk	1.738.879,13	1.889.997,06	2.109.149,78	2.325.957,30	2.653.120,00
		Hb	1.921.580,72	2.231.628,33	2.616.107,28	2.939.973,59	3.447.258,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	Hk	2.690.230,43	2.867.079,93	3.017.828,17	3.151.902,80	3.304.247,00
		Hb	3.064.119,96	3.318.994,12	3.593.050,06	3.817.779,67	4.120.542,04
8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	Hk	574.047,20	592.861,66	634.182,37	674.048,40	714.213,30
		Hb	642.844,74	725.688,75	854.483,13	933.017,71	1.022.030,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	Hk	495.214,73	527.380,18	558.805,12	592.627,50	626.593,60



No.	Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
	Minum/Accommodation and Food Service Activities	Hb	544.206,66	607.828,73	658.634,62	722.081,01	792.976,32
10	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	Hk	490.528,55	557.121,98	628.127,11	691.866,90	763.163,50
		Hb	494.338,70	551.713,36	620.828,40	684.922,09	771.945,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	Hk	449.101,08	456.848,87	480.345,72	512.290,40	543.547,50
		Hb	484.048,06	520.848,57	568.975,91	628.121,22	702.543,28
12	Real Estat/Real Estate Activities	Hk	202.051,61	212.425,95	223.215,13	32.563,00	247.016,20
		Hb	221.418,40	238.490,41	254.076,67	268.475,95	288.506,40
13	Jasa Perusahaan/Business Activities	Hk	53.100,30	55.699,59	59.059,27	62.579,70	67.083,80
		Hb	58.292,45	63.313,52	69.376,96	74.416,56	81.380,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	Hk	594.298,53	577.107,79	595.149,15	609.448,00	613.931,90
		Hb	736.582,10	763.486,50	841.273,96	881.903,28	916.726,44
15	Jasa Pendidikan/Education	Hk	803.252,26	903.815,72	971.867,71	1.012.953,20	1.093.527,20
		Hb	1.024.946,23	1.274.640,84	1.428.312,89	1.519.404,66	1.722.525,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	Hk	137.129,72	158.085,83	175.345,40	188.920,60	202.496,00
		Hb	154.473,56	178.479,77	210.222,89	236.051,77	261.880,98
17	Jasa lainnya/Other Services Activities	Hk	403.058,31	438.578,52	472.819,08	3.732,90	544.537,90
		Hb	436.027,34	475.169,36	525.885,28	587.049,48	660.712,45
PDRB Majalengka		Hk	15.012.893,95	15.750.655,39	16.590.928,26	17.591.792,60	18.789.487,80
		Hb	17.543.188,52	19.193.459,31	21.292.618,45	23.206.829,98	25.419.284,79

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.15.  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)  
Kabupaten Majalengka (persen)

No.	Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Hk	26,09	25,08	23,61	22,98	21,77
		Hb	28,15	26,93	26,39	26,1	24,53
2	Pertambangan dan Penggalian	Hk	3,2	2,59	2,51	2,32	2,12
		Hb	3,07	2,37	2,12	1,87	1,67
3	Industri Pengolahan	Hk	13,08	13,54	13,92	14,54	15,43
		Hb	12,9	13,54	13,88	14,61	15,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Hk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
		Hb	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Hk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
		Hb	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
6	Konstruksi	Hk	11,58	12	12,71	13,22	14,12
		Hb	10,95	11,63	12,29	12,67	13,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Hk	17,92	18,2	18,19	17,92	17,59
		Hb	17,47	17,29	16,87	16,45	16,21
8	Transportasi dan Pergudangan	Hk	3,82	3,76	3,82	3,83	3,8
		Hb	3,66	3,78	4,01	4,02	4,02



No.	Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Hk	3,3	3,35	3,37	3,37	3,33
		Hb	3,1	3,17	3,09	3,11	3,12
10	Informasi dan Komunikasi	Hk	3,27	3,54	3,79	3,93	4,06
		Hb	2,82	2,87	2,92	2,95	3,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Hk	2,99	2,9	2,9	2,91	2,89
		Hb	2,76	2,71	2,67	2,71	2,76
12	Real Estat	Hk	1,35	1,35	1,35	1,32	1,31
		Hb	1,26	1,24	1,19	1,16	1,13
13	Jasa Perusahaan	Hk	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36
		Hb	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Hk	3,96	3,66	3,59	3,46	3,27
		Hb	4,2	3,98	3,95	3,8	3,61
15	Jasa Pendidikan	Hk	5,35	5,74	5,86	5,76	5,82
		Hb	5,84	6,64	6,71	6,55	6,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Hk	0,91	1	1,06	1,07	1,08
		Hb	0,88	0,93	0,99	1,02	1,03
17	Jasa lainnya	Hk	2,68	2,78	2,85	2,86	2,9
		Hb	2,49	2,48	2,47	2,53	2,6

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

b. Laju Inflasi tingkat Provinsi Jawa Barat

Data laju inflasi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.16.

Laju Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Laju Inflasi Jawa Barat	7,6	2,73	2,75	3,63	2,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

c. PDRB Per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita merupakan PDRB suatu wilayah dibagi jumlah penduduk tengah tahun. Data PDRB per Kapita di Kabupaten Majalengka selama kurun waktu 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17.

Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

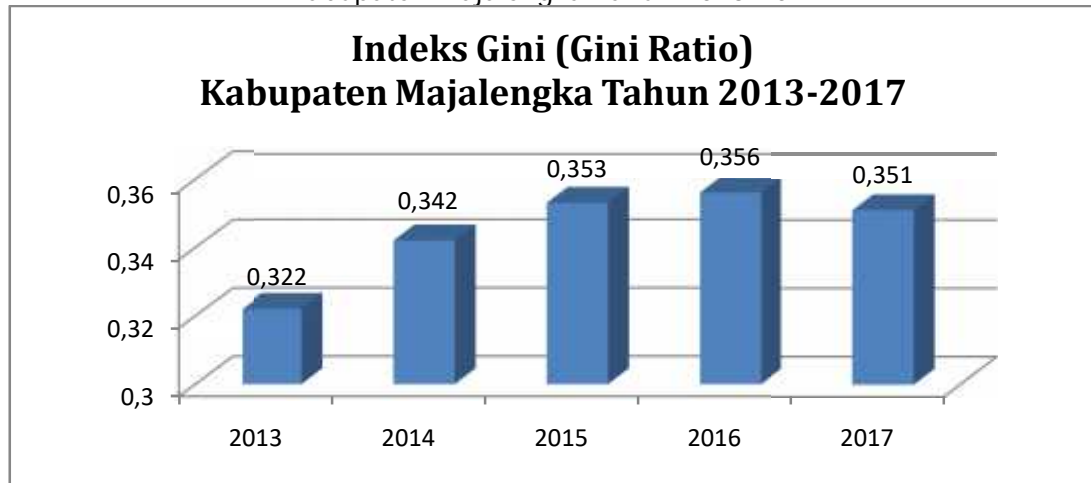
No.	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp.)	14.987,71	16.316,63	17.977,02	19.469,43	21.294,09
2.	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rp.)	12.826,00	13.389,85	14.035,03	14.789,32	15.740,22
3.	Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	11,80	9,41	10,94	8,99	9,53
4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### d. Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6.  
Perkembangan Gini Ratio  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- GR < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0,3 GR 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- GR > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa indeks Gini Kabupaten Majalengka memiliki trend naik dalam empat tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir distribusi pendapatan masyarakat di Majalengka semakin tidak merata walaupun masih dalam kategori ketimpangan sedang.

#### e. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2013-2018, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus menurun yaitu 164.900 jiwa atau 14,07 % pada tahun 2013 menjadi 129.290 jiwa atau 10,79 % pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.18.  
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	164.900	158.010	167.500	152.500	150.260	129.290
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,07	13,42	14,19	12,85	12,60	10,79

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

### a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan EYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.7.

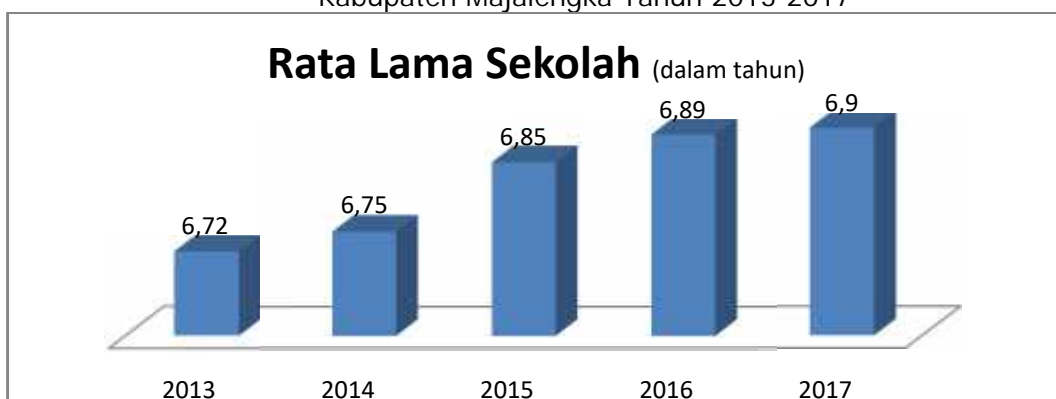
Gambar 2.7.  
Perkembangan Harapan Lama Sekolah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan MYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 2.8.

Gambar 2.8.  
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.





b. Kesehatan

Angka Harapan Hidup, Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir ( $e_0$ ). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.19.  
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1.	2013	68,60
2.	2014	68,66
3.	2015	69,06
4.	2016	69,22
5.	2017	69,39
8.	2018	69.68

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2019, yang dikelola dalam SIPD.

Persentase Balita Gizi Buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : rendah = di bawah 10 %; sedang = 10-19 %; tinggi = 20-29 %; sangat tinggi = 30 %.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2017 sebesar 0,01 %, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10 % dapat dikatakan rendah. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.20.  
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
1.	2013	0,07
2.	2014	0,040
3.	2015	0,038
4.	2016	0,02
5.	2017	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.



c. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka pada kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 2.22.

Tabel 2.21.  
Rasio Penduduk yang Bekerja  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)
1.	2013	92,65
2.	2014	95,53
3.	2015	95,99
4.	2016	Data Tidak Tersedia
5.	2017	94,98

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka 2018, yang dikelola dalam SIPD.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan keolahragaan yang ada di masyarakat. Perkembangan seni, budaya dan olah raga selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.22.  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 - 2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	0,029	0,0325	0,0044	0,0044	0,0044
2.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,0185	0,0195	0,0027	0,0185	0,0185
3.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Sumber : Dispora dan Disparbud Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu :

- Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel 2.25. sebagai berikut :

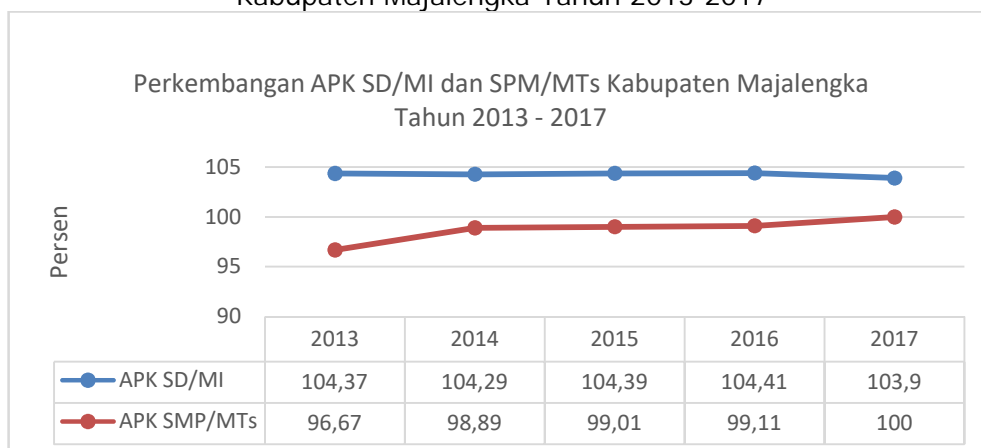
Tabel 2.23.  
Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Majalengka Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Siswa	33.992	35.070	35.883	34.205	39.552
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun	55.615	55.717	57.236	54.533	55.000
3.	Rasio/APK	61,12	62,94	62,69	62,72	71,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikut-sertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Angka APK SD/MI Kabupaten Majalengka tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, sebaliknya APK SMP/MTs justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9.  
Perkembangan APKSD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

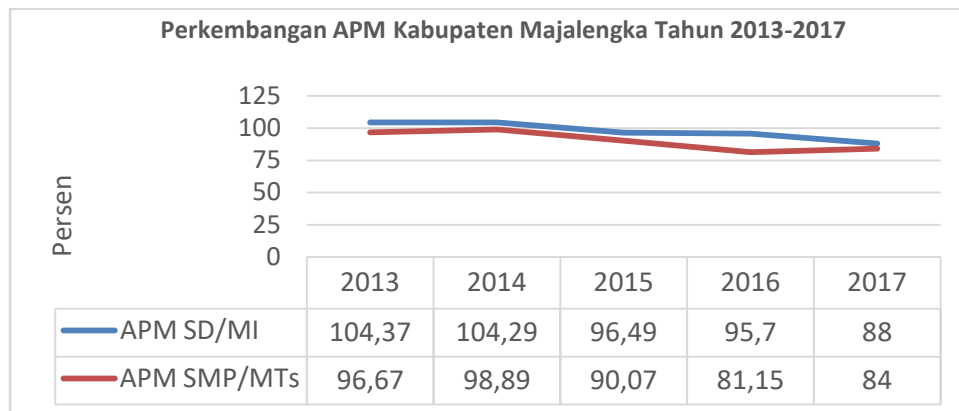


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan.

Perkembangan APM SD/MI pada tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016, sebaliknya APM SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

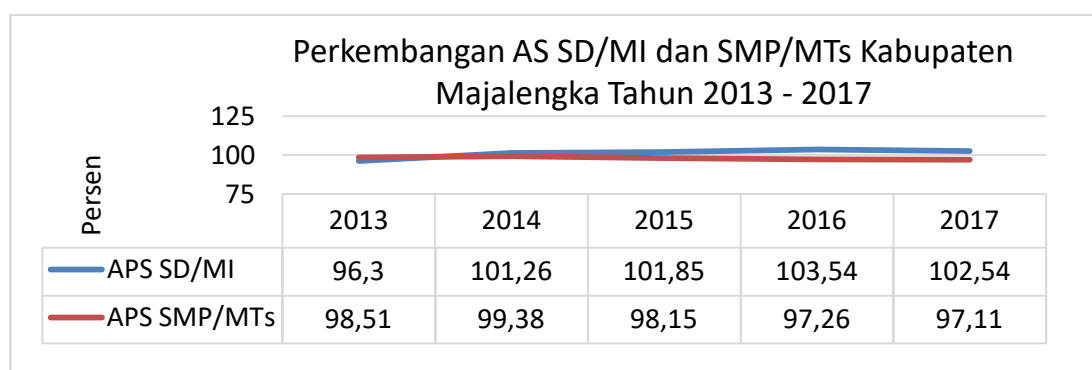
Gambar 2.10.  
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Adapun APS di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.11.  
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah, Salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian Angka Kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100% siswa lulus. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Majalengka, angka kelulusan selama periode 2013-2017 setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan ini tentunya juga

dipengaruhi oleh kualitas para pengajar, yang terus meningkat, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Selanjutnya sesuai dengan program yang sudah dijalankan yaitu wajar dikdas 9 tahun, diharapkan seluruh siswa yang telah lulus SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. Data Perkembangan Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.24.  
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	AL SD/MI	100	100	100	100	100
2.	AL SMP/MTS	100	100	100	100	100
3.	AM SD/MI KE SMP/MTS	92,75	97,13	100,08	98,13	95,54
4.	AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK	67,32	61,91	70,26	81,38	80
5.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV	58,18	76,60	99,18	91,12	88,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Fasilitas Pendidikan, Salah satu tugas pemerintahan di bidang pendidikan adalah menyediakan Gedung Sekolah yang representatif sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Kondisi Bangunan Sekolah pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.26. sebagai berikut :

Tabel 2.25.  
Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Bangunan	5.174	5.122	5.239	5.011	4.733
1.2.	Jumlah Bangunan Kondisi Baik	4.410	4.148	4.453	4.023	4.546
1.3.	Persentase Kondisi Bangunan Baik	85,23	80,98	84,99	80,28	96,04
2.	SMP/MTs					
1.1.	Jumlah Bangunan	1.761	2.043	2.219	2.130	1.420
1.2.	Jumlah Bangunan Kondisi Baik	1.211	1.769	1.832	1.811	1.218
1.3.	Persentase Bangunan Kondisi Baik	68,77	86,59	82,55	85,02	85,77

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Ketersediaan Sekolah, Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini



mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel 2.27. sebagai berikut :

Tabel 2.26.  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	872	873	744	747	667
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	124.019	121.597	119.471	117.600	118.268
1.3.	Rasio	1 : 142	1 : 139	1 : 161	1:157	1 : 162
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	174	178	179	184	165
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	63.559	63.573	64.093	62.246	61.781
2.3.	Rasio	1 : 365	1 : 357	1 : 362	1:338	1 : 374

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Rasio Guru Terhadap Murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.27.  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	7.781	5.672	5.197	7.512	6.899
1.2.	Jumlah Murid	120.008	126.841	124.721	122.789	121.934
1.3.	Rasio	1 : 15	1 : 22	1 : 23	1:16	1 : 18
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.740	4.322	4.428	3.824	3.777
2.2.	Jumlah Murid	38.932	62.940	64.093	61.683	61.302
2.3.	Rasio	1 : 14	1 : 15	1 : 14	1:16	1 : 16

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Pendidikan Non Formal Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja pada tahun 2018 terdaftar sebanyak 52 unit, dengan pengajar sebanyak 152 orang. Sedangkan Jumlah siswa pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C pada tahun 2018 sebanyak 4.360 siswa dan meningkat menjadi 5.970 siswa pada tahun 2019.

## 2. Kesehatan

Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari



orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Perkembangan AKI dan AKB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28.

Angka Kematian Bayidan Angka Kematian Ibu  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	11,36	8,37	7,65	6,51	4,3
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	137,97	98,18	93,34	86,27	84,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Posyandu, yaitu suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan posyandu antara lain::

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- Membudayakan NKKBS.
- Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan

kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.

Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel 2.33. sebagai berikut :

Tabel 2.29.  
Perkembangan Rasio Posyandu  
di Kabupaten Majalengka

No.	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita (Jiwa)	Rasio Posyandu Per 1000 Balita
1.	2013	1.446	100.366	1,41
2.	2014	1.153	103.191	1,41
3.	2015	1.444	99.116	1,47
4.	2016	1.464	97.570	1,50
5.	2017	1.466	96.026	1,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu, di Kabupaten Majalengka terdapat 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Majalengka dan RSUD Cideres, 1 Rumah Sakit Umum Swasta (RS Mitra Sumberjaya) di Sumberjaya, 1 Rumah Sakit Khusus Bedah Budi Kasih di Panyingkiran serta 32 Puskesmas dan 71 Pustu yang tersebar di 26 kecamatan.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya berupa rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu persatuan penduduk. Data tersebut dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.30.  
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik  
Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu
1.	Lemahsugih	-	2	4
2.	Bantarujeg	-	1	2



No.	Kecamatan	Jumlah		
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu
3.	Malausma	-	1	3
4.	Cikijing	-	1	2
5.	Cingambul	-	1	5
6.	Talaga	-	1	3
7.	Banjaran	-	1	3
8.	Argapura	-	1	3
9.	Maja	-	1	5
10.	Majalengka	1	2	2
11.	Cigasong	-	1	1
12.	Sukahaji	-	2	1
13.	Rajagaluh	-	1	3
14.	Sindangwangi	-	1	2
15.	Sindang	-	1	-
16.	Leuwimunding	-	1	2
17.	Palasah	-	1	3
18.	Jatiwangi	-	2	3
19.	Dawuan	1	1	1
20.	Kasokandel	-	1	1
21.	Panyingkiran	1	1	1
22.	Kadipaten	-	1	2
23.	Kertajati	-	2	5
24.	Jatitujuh	-	2	2
25.	Ligung	-	1	5
26.	Sumberjaya	1	1	3
Jumlah		4	32	67

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel2.31.

Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
3.	Cakupan puskesmas (%)	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08
4.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	21,52	21,52	21,52	21,52	19,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, untuk pemenuhan dokter di Kabupaten Majalengka per satuan penduduk pada tahun 2017 rasionya sebesar 0,13 per satuan penduduk. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi di pelayanan primer sangat berpengaruh pula



terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis dibeberapa spesifikasi.

Tabel 2.32.  
Jumlah Tenaga Medis Dokter di Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi
1	Lemahsugih	3	-
2	Bantarujeg	2	1
3	Malausma	1	-
4	Cikijing	3	-
5	Cingambul	2	-
6	Talaga	2	1
7	Banjaran	1	-
8	Argapura	1	-
9	Maja	3	1
10	Majalengka	4	1
11	Cigasong	2	1
12	Sukahaji	4	1
13	Rajagaluh	3	1
14	Sindangwangi	2	-
15	Sindang	2	-
16	Leuwimunding	2	1
17	Pasalah	2	1
18	Jatiwangi	5	-
19	Dawuan	2	-
20	Kasokandel	2	1
21	Panyingkiran	2	-
22	Kadipaten	2	1
23	Kertajati	4	-
24	Jatitujuh	4	1
25	Ligung	2	1
26	Sumberjaya	2	1
Jumlah		64	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Komplikasi Kebidanan yang ditangani, Perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan.



Pertolongan Persalinan, Guna meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan diantaranya perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

Cakupan Universal Child Imunization (UCI), Pemerintah Kabupaten Majalengka secara berkesinambungan terus menggalakan pelaksanaan imunisasi. Kegiatan imunisasi tersebut bukanlah hal baru dalam dunia kesehatan di Indonesia, namun perlu disadari masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum memahami secara utuh tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Kemungkinan penyebabnya dikarenakan masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap adanya efek kurang baik jika diimunisasi atau mitos lainnya. Manfaat dari imunisasi bagi bayi untuk mencegah bayi terjangkit penyakit baru yang menular dan mematikan serta penyakit infeksi masih menjadi masalah di Indonesia.

Balita Gizi Buruk, Golden age rentang usianya 0-5 tahun sangat membutuhkan asupan gizi yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, deteksi dini bagi kasus gizi buruk harus dilakukan secara kontinyu. Balita yang mengalami gizi buruk itu pertumbuhannya tidak seimbang dengan usia balita yang wajar. Pertumbuhan mereka lambat, bahkan berat badannya jauh dari berat ideal, selain itu ciri-ciri dan indikasi lainnya adalah kepala membesar dan perut buncit, badan terlihat kurus, kering, dan tulangnya kelihatan (stunting) yang disebabkan tubuh tidak menerima asupan gizi seimbang. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah. Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk dapat dilihat pada tabel 2.32. sebagai berikut :

Tabel 2.32.

Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) dan Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	94,75	87,66	98,7	98,38	97,16
2	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	94,75	87,66	98,7	98,38	97,16
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Penyakit TBC adalah merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa dimana Penyakit TBC dapat



menyerang pada siapa saja tak terkecuali pria, wanita, tua, muda, kaya dan miskin serta dimana saja. Indonesia menduduki negara terbesar ketiga di dunia dalam masalah penyakit TBC ini.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD, Penyebab kematian penduduk dapat diakibatkan karena penyakit demam berdarah (DBD). Penyebab utama penyakit demam berdarah adalah virus dengue, yang merupakan virus dari famili Flaviviridae. Terdapat 4 jenis virus dengue yang diketahui dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan mengendalikan vektor nyamuk, antara lain dengan menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah, dan perbaikan desain rumah. Tingkat pencegahan agar tidak timbulnya penyakit DBD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Majalengka tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.33.  
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penemuan baru TBC (%)					
2	Pengobatan penderita penyakit TBC (Jiwa)	1.267	1.440	1.434	1.583	1.724
3	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Selain melayani pasien umum, pelayanan kesehatan rujukan juga menangani pasien dari keluarga miskin. Pada Tahun 2017 persentase keluarga miskin yang ditangani mencapai 42,12 persen.

Cakupan Kunjungan Bayi, Kunjungan bayi di Kabupaten Majalengka pada Puskesmas-puskesmas yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka angkanya cenderung naik turun. Persentase Pasien Miskin yang Ditangani dan Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.  
Persentase Pasien Miskin yang Ditangani dan Cakupan Kunjungan Bayi  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pesentase Penanganan Pasien Keluarga Miskin	39,13	39,5	39,6	36,06	42,12
2	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	112,5	107,53	113,5	113,02	113,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.





### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan.

Kondisi Jalan, berdasarkan data terbaru panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka tahun 2017 adalah 647,51 KM, data selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.35.  
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka  
Tahun 2013-2017 (dalam km)

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	719,408	543,75	635,24	650,26	621,38
2	Panjang Jalan dilalui roda empat	1.281,92	1.281,92	1.281,92	1.281,92	1.281,92
3	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan Permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat)	337,88	337,88	337,88	337,88	337,88
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	719,408	543,75	635,24	650,26	647,51

Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi Jaringan Irigasi, Kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Jumlah dan kondisi bangunan air pada jaringan irigasi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36.  
Jumlah dan Kondisi Bangunan Air Pada Jaringan Irigasi  
di bawah 1.000 Ha di Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Areal Fungsional	22.518,00				
2	Daerah Irigasi	396	Daerah Irigasi			
3	Bendung					
	- Tetap	419	bh	230	188	1
	- Suplesi	57	bh	24	18	15
	- Pengambilan Bebas	165	bh	120	45	0
4	Bangunan Air					
	- Bagi	7	bh	2	5	0
	- Bagi Sadap	15	bh	3	9	3
	- Sadap	503	bh	249	104	150
5	Saluran					
	- Induk	488	km	395	42	51



No.	Uraian	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	- Sekunder	283,29	km	191,65	66	25,64
	- Tersier	417,72	km	317	95	5,72
	- Suplesi	79,77	km	50	19,77	10
	- Pembuang	56,74	km	33	18,74	5
6	Bangunan Pelengkap					
	- Kantong lumpur	32	bh	22	7	3
	- Penguras	7	bh	5	1	1
	- Terjun	61	bh	50	8	3
	- Syphon	6	bh	3	3	0
	- Gorong - gorong	232	bh	157	75	0
	- Got Miring	5	bh	5	0	0
	- Talang	56	bh	45	11	0
	- Jembatan	96	bh	96	0	0
	- Pelimpah	121	bh	75	21	25
	- Tangga Cucin	44	bh	44	0	0
	- Mandi Kerbau	0	bh	0	0	0
	- Suplesi	35	bh	27	5	3
	- Lain - lain	21	bh	21	0	0
7	Bangunan Fasilitas					
	- Rumah PPB	31	bh	25	6	0
	- Rumah PPA	14	bh	8	6	0
	- Rumah Mantri	4	bh	0	4	0
	- Jalan Inspeksi	4,61	km	4,61	0	0

Sumber : Dinas PPSDA Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel2.37.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas irigasi Kab. kondisi baik (%)	67,00	68,00	66,96	72,40	76,00
2.	Rasio Jaringan Irigasi (Km/ha)	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99

Sumber : Dinas ppsda Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Penataan Ruang, Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRWserta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.38.

Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2013 - 2017

NO.	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,67	83,67	83,67	83,67	83,67
2.	Tersedianya Dokumen RDTR dan RTBL	25	58,33	66,67	69,23	96,15
3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	5,1	1,58	5,43	5,48	6,02

Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.



#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan, Kondisi rumah tinggal dan rumah tangga di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dibawah. Pada Tahun 2017 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 270.527 Kepala Keluarga dengan persentase sebesar 63,43%. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 338.481 Kepala Keluarga, terus mengalami kenaikan dari kondisi Tahun 2013 sebesar 311.191 Kepala Keluarga.

Tabel2.39.  
Kondisi Perumahan (Rumah Tangga)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rumah tinggal bersanitasi (%)	64,58	65,09	62,17	63,29	63,43
2.	Rumah tangga bersanitasi (KK)	246.662	248.568	252.119	269.927	270.527
3.	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	311.191	313.565	323.659	337.684	338.481
4.	Rumah tangga pengguna listrik (KK)	320.352	322.352	345.611	365.670	n/a
5.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	83,51	85	79,82	n/a	80,02

Sumber : Dinas PPSDA Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Rumah Layak Huni, Tahun 2017 jumlah rumah layak huni sebanyak 316.711 buah dengan rasio 98,36 %. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40.  
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Layak Huni (unit)	309.131	312.422	314.378	315.741	316.711
2	Rasio Rumah Layak Huni (%)	97,28	97,34	98,48	98,92	98,36
3	Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)	0,62	0,68	0,00	n/a	n/a

Sumber : Dinas PPSDA Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.  
Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,007	0,007	0,005	0,006	0,029



No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	5	6	6	6	6
4.	Penegakan PERDA	7	6	9	9	226
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 kec	5 kec	5 kec	7 Kec	7 Kec
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3430	3430	3430	3430	3430
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	51	68	98	24	75
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	12,45	11,42	9,77	9	12,73

Sumber: Satpol PP Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 6. Sosial

Pada Tahun 2017, Kabupaten Majalengka memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 135 unit. Secara lengkap data penanganan masalah sosial di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.42.  
Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	45	42	25	36	135
2.	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	33	35,36	39,58	38,7	75,80
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	33	35,36	39,58	38,70	75,86

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### a. Tenaga Kerja

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun, Penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Undang-undang ditentukan, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat pekerja) yang penyebabnya biasanya dikarenakan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), ataupun perselisihan antar



serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Pada tahun 2017 ada 6 kali sengketa pengusaha dan pekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. Pada Tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 66,11%.

Pencari Kerja yang Ditempatkan, Belum seimbang antara jumlah pencari kerja, penempatan dan jumlah kebutuhan perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakcocokan antara minat dengan kebutuhan. Selain itu, keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dimana para pencari kerja tidak memiliki kompetensi dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena itu minimnya keterampilan yang dimiliki pencari kerja menjadi masalah, sebagai penyebab tingkat pengangguran masih tinggi. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan keterampilan maupun kompetensi pencari kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Majalengka tahun 2017 adalah sebesar 116%.

Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam :

1. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,02% . Besar kecilnya angka TPT salah satunya bisa dipengaruhi oleh

banyaknya kesempatan usaha seiring dengan masuknya investasi yang cukup besar di Kabupaten Majalengka.

Keselamatan dan Perlindungan, Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan program proteksi, banyak perusahaan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang memberikan peranggungan terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesehatan, masalah finansial atau masalah lainnya yang dihadapi atau dialami oleh pekerja dan keluarganya di kemudian hari. Praktisnya, pemberian proteksi ini kualitasnya tidak sama diantara masing-masing pekerja, tergantung dari kedudukan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kepedulian atas keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan di Kabupaten Majalengkadicerminakan dengan tingkat persentase perusahaan yang telah menerapkan K3. Data situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka secara lengkap bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.  
Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	20	6	20	11	6
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*(%)	68,01	71,42	67,98	n/a	66,11
3	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	27	42,2	59,35	91,67	121,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka*(%)	7,35	4,47	4,01	n/a	5,02
5	Keselamatan dan perlindungan kerja	320	350	380	430	n/a

Sumber : Disnakerin Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2016 sebesar 47,1%. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

Rasio KDRT Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman





untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 adalah sebesar 1:68323.

Selain KDRT, hal lain yang diperhatikan adalah penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Majalengka tahun 2016 sebanyak 32 kasus yang telah diselesaikan. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan SPM mencapai 100% pada tahun 2016.

c. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.  
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Data	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan						
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	Ketersediaan Energi	%	2267,40	2354,77	2638,72	2446,38	2641,21
	Ketersediaan Protein	%	71,45	77,56	104,7	80,91	86,45
	Skor PPH Ketersediaan	%	83,5	83,4	84,1	83,5	87,0
B	Distribusi dan Akses Pangan						
1	ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses	%	98,29	98,29	98,29	100	100



No.	Data	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	pangan						
2	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	100	100	100
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan						
1	Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	100	100	100	72,65	100
2	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	ton	0	0	0	20	0
3	Ketersediaan Pangan (LPM)	unit	83	120	120	120	128

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45.  
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase penanganan sampah	20	27,92	29,19	48,77	49,09
2.	Persentase Pencemaran status mutu air	10	0	0	0	0
3.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	331 buah	331 buah	331 buah	331 buah	331 buah
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL-UKL/SPPL	32 UKL- UPL 86 SPPL	19 UKL- UPL 90 SPPL	32 UKL- UPL 277 SPPL	23 UKL- UPL 340 SPPL	30 UKL- UPL 290 SPPL
5.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	21 TPS	29 TPS	35 TPS	35 TPS	29 TPS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Kab. Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dalam kependudukan dan pencacatan sipil sering dengan waktu mengalami kemajuan baik dalam hal manajemen dan pelaksanaan secara teknis. Dalam urusan kependudukan dan cacatan sipil sudah sangat memasyarakat dengan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor tersebut sifatnya unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang. Kemudian dokumen kependudukan lainnya berupa Akte Lahir dan Kartu Keluarga yang kedudukannya sama pentingnya dengan KTP, jadi seluruh warga masyarakat sudah seharusnya mengindahkan dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2.46.  
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2013- 2017

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	100	71,18	99,83	100
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Cakupan Penerbitan Kartu tanda Penduduk (%)	83,35	92,3	113,83	100	95,48
4	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (%)	83,35	92,3	91,33	90,2	95,48
5	Ratio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk (poin)	833,5	923	913,3	902	954
6	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	62,84	63,2	86,84	86,11	86,14
8	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk (permil)	62,84	632	868	861	861
9	Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran (%)	95,2	83,4	83,63	50,53	66,32
10	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : DKB per 30 Juni 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Pada tahun 2017 berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa Posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.466 posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat. Pola hubungan antara aparaturnya Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara hakiki.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Majalengka sebesar 1,12 pada tahun 2017, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi.

Rasio Akseptor KB, Program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Akses yang lebih baik untuk metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau akan mempercepat pencapaian tujuan



Pembangunan Milenium (MDGs). Oleh karena itu sejak 2005 masalah kesehatan reproduksi dimasukkan menjadi salah satu indikator pencapaian MDGs. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil. Rasio akseptor KB pada Tahun 2017 sebesar 77,69 %.

Tabel 2.47.  
Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,22	1,21	1,5	1,12	1,12
2.	Rasio akseptor KB (%)	75,35	75,11	75,80	77,24	77,69
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	75,35	75,11	75,80	77,24	77,69
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	33,61	33,66	21,12	n/a	31,58

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### h. Perhubungan

Saat ini Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja, Talaga dan Bantarujeg. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati akan memerlukan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke Bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.

Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di kabupaten majalengka akan dibahas pada tabel dibawah ini sebagai capaian pembangunan urusan perhubungan.

Tabel 2.48.  
Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	CAPAIAN PEMBANGUNAN	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio ijin trayek	poin	1 : 974	1 : 896	1 : 904	1 : 911	1 : 911
2.	Jumlah uji kir angkutan orang dan barang	unit	10.054	11.231	13.296	14.461	13.563
3.	Jumlah uji kir angkutan orang	unit	1.432	1.560	2.057	2.161	1.997
4.	Pemasangan Rambu-rambu	titik	107	159	117	40	140
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	11.702.705	11.925.056	12.521.308	12.521.406	11.269.266

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian kendaraan

tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, maka lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji kendaraan.

Biaya pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 8 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Majalengka, sebagai berikut :

Tabel 2.49.  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
A.	Pengujian Berkala Pertama	
	1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor head	Rp.150.000
	2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.100.000
B.	Pengujian Berkala Untuk Angkutan Orang	
	1. Angkutan Pedesaan (9 seat)	Rp.60.000
	2. Angkutan Kota (10 seat)	Rp.60.000
	3. Bus Mini (11-15 seat)	Rp.75.000
	4. Bus Sedang (16-25 seat)	Rp.75.000
	5. Bus Besar	Rp.80.000
C.	Pengujian Berkala Untuk Angkutan Barang	
	1. Pick Up (JBB = 0-3.500 Kg)	Rp.60.000
	1. Truck (JBB = 3.550-10.000 Kg)	Rp.75.000
	2. Truck (JBB = 10.050-15.000 Kg)	Rp.80.000
	3. Truck (JBB = lebih dari 15.050 Kg)	Rp.95.000
D.	Penilaian Teknis Kendaraan	
	1. Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang	Rp.100.000
	2. Sepeda Motor	Rp.50.000
E.	Pemeriksaan Emisi Gas Buang	
	1. Karbon Monoksida (Co) dan Hidro Karbon (Hc)	Rp.10.000
	2. Uju Ketebalan Asap	Rp.10.000
F.	Pengujian/Pemeriksaan Teknis Kendaraan Pribadi	
	1. Mini Bus dan Sejenisnya	Rp.75.000
	2. Sedan, Jeep dan Sejenisnya	Rp.50.000
	3. Sepeda Motor	Rp.10.000
G.	Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Pribadi	Rp.10.000
H.	Denda Keterlambatan untuk bulan pertama dan seterusnya	Rp.10.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data dua tahun terakhir pada tahun 2016-2017 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tidak mengalami kenaikan yaitu sebesar 1:6,63 sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2016 sebanyak 12.276.235 orang dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 11.048.612 orang. Jumlah orang/barang





melalui terminal pertahun pada tahun 2016 sebanyak 2.475.132 orang sedangkan tahun 2017 sebanyak 2.227.619 orang.

Tabel 2.50.  
Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 5,86	1 : 5,27	1 : 5,95	1:6,63	1 : 6,63
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	10.160.215	11.160.215	11.718.225	12.276.235	11.048.612
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Jiwa)	2.245.118	2.250.120	2.362.626	2.475.132	2.227.619

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

i. Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2017 pemerintah daerah memiliki 29 website sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Data-data komunikasi dan informasi secara lengkap disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.51.  
Data Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	1 : 5082	1 : 5010	1 : 5030	1 : 5030	1 : 5030
2.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	36	36	36	36	36
3.	Web Site milik pemerintah daerah	14	14	13	13	29
4.	Jumlah jaringan komunikasi	212	222	231	234	238

Sumber : Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.52.  
Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Telkomsel	62	62	63	63	63
2.	TBG	51	55	55	55	55
3.	Protelindo	32	37	39	39	42
4.	XL	23	23	23	21	17
5.	Indosat	13	13	13	13	12
6.	SIP	5	5	3	3	3
7.	Telkom	5	5	5	5	5
8.	Java Indoku	3	3	3	3	-



No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
9.	Reka Cipta	-	-	-	-	-
10.	STP, WMI, dll	18	19	27	32	41
Total		212	222	231	234	238

Sumber : Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Koperasi pada tahun 2017 sebanyak 677 buah dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53.  
Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif  
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	KUD	Non KUD	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif
1.	2013	26	632	658	329
2.	2014	26	644	670	271
3.	2015	26	644	670	320
4.	2016	26	651	677	320
5.	2017	26	652	677	320

Sumber: Dinas KUMKM Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 tercatat berjumlah 27.437 unit, meningkat menjadi 27.528 unit pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 28.113 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Majalengka berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercatat Tahun 2017 sebanyak 16 buah.

k. Penanaman Modal

Selama periode 2013-2017, realisasi investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp.451,01 miliar pada tahun 2013, menjadi Rp.629,36 miliar pada tahun 2017. Tidak demikian halnya dengan jumlah pelaku usaha yang melakukan investasi, jumlahnya menurun dari 664 unit pada Tahun 2016 menjadi 460 unit pada tahun 2017.

Tabel 2.54.  
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka  
Tahun 2013-2017 (dalam juta rupiah)

No.	Kategori Perusahaan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perusahaan Mikro & Kecil	280.555,01	262.493,24	162.791,56	119.803,38	77.464,00
2.	Perusahaan Menengah	40.813,00	71.707,34	78.718,16	64.319,43	67.300,00
3.	Perusahaan Besar	129.643,10	510.595,17	211.000,00	271.485,00	484.600,00
Jumlah		451.011,11	844.795,75	452.509,72	455.607,81	629.364,00

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.55.  
Data Kategori Perusahaan di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Kategori Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perusahaan Mikro dan Kecil	1.146	1.275	835	627	427
2.	Perusahaan Menengah	21	30	35	34	26
3.	Perusahaan Besar	5	3	2	3	7
Jumlah		1.172	1.308	874	664	460

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### I. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.

Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Tabel 2.56.  
Perkembangan Data Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah organisasi pemuda	54	54	54	54	54
2	Jumlah organisasi olahraga	24	25	25	26	27
3	Lapangan olah raga milik pemerintah	134	1	2.218	2.328	2.329
4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	9	32	32	32

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### m. Statistik

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah tersedianya buku "Kabupaten dalam angka" dan "PDRB kabupaten" yang selama ini telah berhasil terpenuhi.

Tabel 2.57.  
Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Diskominfo Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### n. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu : (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selama 2013-2017, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada tabel 2.71. berikut ini:

Tabel 2.58.  
Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	2	2
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	108	108	108	108

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya adalah belum ditunjang dengan adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif.

#### o. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Tabel 2.59.  
Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perpustakaan					
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan	22.338	19.901	765.508	19.800	23.790
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	6.446	6.446	247.995	30.000	14.183

Sumber : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Selama tahun 2013-2017, jumlah perpustakaan di Kabupaten Majalengka terus meningkat, dari 831 unit pada tahun 2013 menjadi 1.070 unit pada tahun 2017.

#### p. Kearsipan



Kinerja pengelolaan arsip daerah dapat diukur dari capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.73. sebagaimana berikut.

Tabel 2.60.  
Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka Tahun 2013 – 2017

No.	Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan	3	16	10	11	11
2.	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	37	42	20	33	32

Sumber : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018

### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Pertanian

Luas Kabupaten Majalengka adalah 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah 50.405 Ha dan lahan bukan sawah 70.019 Ha. Berdasarkan data tersebut, pertanian merupakan sektor yang dominan dalam pemanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka.

#### 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, selama tahun 2013-2017 terdiri atas:

##### a) Padi

Luas tanam pada tahun 2016 sebesar 129.456 hektar turun menjadi 126.802 hektar pada tahun 2017, luas panen pada tahun 2016 sebesar 115.715 hektar meningkat menjadi 132.470 hektar pada tahun 2017 dan produksi sebesar 767.436 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 872.294 ton pada tahun 2017. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih.

##### b) Jagung

Luas tanam pada tahun 2016 sebesar 18.768 hektar meningkat menjadi 21.054 hektar pada tahun 2017, luas panen pada tahun 2016 sebesar 17.877 hektar meningkat menjadi 19.074 hektar pada tahun 2017 dan produksi sebesar 141.559 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 151.646 ton pada tahun 2017. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma.

##### c) Kedelai

Luas tanam pada tahun 2016 sebesar 1.696 hektar sedikit turun menjadi 1.606 hektar pada tahun 2017, luas panen pada tahun 2016 sebesar 1.474 hektar turun cukup signifikan menjadi 538 hektar pada tahun 2017 dan imbasnya kepada hasil produksi sebesar 2.530 ton pada tahun 2016 juga turun cukup signifikan menjadi 916 ton pada tahun 2017. Penurunan luas tanam, luas panen dan produksi ini, disebabkan antara lain karena minat petani yang kurang dan harga jual yang kurang berpihak ke petani serta banyaknya impor kedele. Sentra



kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas pangan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.61.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi	106.045	115.423	96.815	129.456	126.802
2.	Jagung	15.045	17.708	16.244	18.768	21.054
3.	Kedelai	517	1.393	2.155	1.696	1.606

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.62.  
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi	107.971				
2.	Jagung	17.137	15.910	15.587	17.877	19.074
3.	Kedelai	503	1.339	2.095	1.474	538

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.63.  
Produksi Komoditas Tanaman Pangan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Padi	707.038	675.712	654.045	767.436	872.294
2.	Jagung	119.701	119.335	116.852	141.559	151.646
3.	Kedelai	814	1.938	3.331	2.530	916

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura, Komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas :

1) Bawang Merah

Luas tanam pada tahun 2016 seluas 3.285 hektar sedikit turun menjadi 3.230 hektar pada tahun 2017, luas panen pada tahun 2016 seluas 3.344 Ha turun menjadi 3.148 hektar pada tahun 2017, sebaliknya produksi pada tahun 2016 sebesar 32.329 ton justru meningkat menjadi sebesar 37.705 ton pada tahun



2017. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka.

2) Cabai Besar

Luas tanam pada tahun 2016 seluas 676 hektar meningkat menjadi 966 hektar pada tahun 2017, luas panen sebesar 1.150 hektar pada tahun 2016 turun menjadi 780 hektar pada tahun 2017, sedangkan produksi pada tahun 2016 sebesar 11.937 ton meningkat menjadi sebesar 12.452 ton pada tahun 2017. Penurunan luas panen antara lain disebabkan karena cuaca kurang yang mendukung mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran, dimana tanaman cabai sangat rentan terhadap curah hujan dan kelembaban yang tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya serangan OPT diantaranya layu, busuk dan rontok buah. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran.

3) Kentang

Pada tahun 2016 luas tanam 242 hektar turun menjadi 149 hektar pada tahun 2017, dengan luas panen tahun 2016 sebesar 275 hektar turun menjadi 150 hektar pada tahun 2017, dengan produksi pada tahun 2016 sebesar 4.600 ton turun menjadi 2.607 ton pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan cuaca yang kurang mendukung yaitu curah hujan dan kelembaban yang tinggi, terutama di daerah pegunungan sering terjadi kabut tebal. Cuaca yang buruk tersebut mempercepat perkembangbiakan hama dan penyakit yaitu penyakit busuk daun dan umbi, serta fusarium (jamur). Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman hortikultura tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.64.

Luas Tanam dan Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Luas Lahan (Ha)					Luas Panen (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bawang Merah	2.263	2.491	2.702	3.285	3.230	2.150	2.522	2.696	3.344	3.148
2	Cabai Besar	845	682	1.220	676	966	1.237	756	986	1.150	780
3	Kentang	487	497	258	242	149	966	375	408	275	150

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.65.

Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017



1.	Bawang Merah	23.683	30.290	33.605	32.329	37.705
2.	Cabai Besar	11.144	5.296	9.672	11.937	12.452
3.	Kentang	14.357	5.178	8.335	4.600	2.607

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 2. Komoditas Unggulan Buah-buahan

Komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas :

### 1) Mangga

Luas tanam pada tahun 2016 sebesar 10.925,61 hektar, meningkat pada tahun 2017 menjadi 11.046,89 hektar, luas panen pada tahun 2016 sebesar 4.056,42 hektar, meningkat menjadi 4.171,12 hektar pada tahun 2017 dan produksi pada tahun 2016 sebesar 37.529,30 ton meningkat signifikan menjadi 60.007,50 ton pada tahun 2017. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.

### 2) Durian

Pada tahun 2016 luas tanam 2.190,50 hektar, meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.203,10 hektar, luas panen pada tahun 2016 seluas 810,3 hektar, turun menjadi 596,51 hektar pada tahun 2017, dan produksi pada tahun 2016 sebesar 6.265,10 tonturun menjadi 5.150,60 ton pada tahun 2017. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.

### 3) Jambu Biji

Pada tahun 2016 luas tanam 633,27 hektar meningkat menjadi 643,06 hektar pada tahun 2017, luas panen pada tahun 2016 seluas 319,65 hektar meningkat menjadi 329,67 hektar pada tahun 2017, dan produksi pada tahun 2016 sebesar 5.260,70 ton meningkat menjadi 5.369,30 ton pada tahun 2017.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman buah-buahan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.66.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mangga	10.845,59	10.880,52	10.905,49	10.925,61	11.046,89
2.	Durian	2.194,50	2.200,79	2.199,07	2.190,50	2.203,10
3.	Jambu Biji	561,56	611,25	622,98	633,27	643,06

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.67.  
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mangga	7.142,97	7.502,90	4.798,49	4.056,42	4.171,12
2.	Durian	1.569,98	1.565,76	975,40	810,30	596,51
3.	Jambu Biji	379,99	458,55	321,31	319,65	329,67

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.68.  
Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Mangga	10.242,70	51.508,90	64.394,92	37.529,30	60.007,50
2.	Durian	3.196,10	5.198,30	9.542,90	6.265,10	5.150,60
3.	Jambu Biji	3.012,60	4.255,60	5.292,50	5.260,70	5.369,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Cakupan Bina Kelompok Petani, Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada peningkatan sumber daya manusia khususnya pembinaan kelompok tani seperti pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.69.  
Cakupan Bina Kelompok Petani  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Petani
1.	2013	2.336
2.	2014	2.503
3.	2015	2.506
4.	2016	2.506
5.	2017	2.506

Sumber :Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 2. Peternakan

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2017 populasi ayam ras pedaging sebanyak 17.394.600 ekor dengan produksi daging sebesar 24.352,44 ton turun dari tahun 2016 yang mencapai



26.154,18 ton, populasi domba pada tahun 2017 sebanyak 950.130 ekor dengan produksi daging pada tahun 2017 mencapai 1.534,94 ton meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 1.219,63 ton dan populasi sapi potong pada tahun 2017 sebanyak 13.966 ekor dengan produksi daging mencapai 2.158,90 ton juga meningkat dari tahun 2016 . Sentra produksi ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Banjaran, Sindangwangi. Sentra produksi domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Dawuan, Kertajati. Sentra produksi sapi potong tersebar di Kecamatan Kertajati, Lemahsugih, Majalengka.

Tabel 2.70.  
Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Jenis	Tahun (Ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ayam Ras Pedaging	15.011.898	17.066.169	17.221.398	17.436.120	17.394.600
2.	Domba	586.413	645.063	797.948	898.169	950.130
3.	Sapi Potong	12.195	12.810	13.114	13.851	13.966

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.71.  
Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Jenis	Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ayam Ras Pedaging	22.517,85	25.599,25	25.832,10	26.154,18	24.352,44
2.	Domba	578,72	1.026,77	1.097,62	1.219,63	1.534,94
3.	Sapi Potong	1.799,16	2.012,59	2.111,57	2.157,08	2.158,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

### 3. Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah Teh, Tembakau, Kopi, Cengkeh, dan tebu, sebagai berikut :

#### a) Teh

Luas tanam komoditas teh pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 672,31 hektar. Sedangkan produksi teh hijau pada tahun 2017 sebesar 302,67 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh.

#### b) Tembakau

Luas tanam komoditas tembakau pada tahun 2016 sebesar 1.420,70 hektar turun menjadi 1.045,25 hektar pada tahun 2017 dengan produksi pada tahun 2017 berupa daun sebesar 5.684,58 ton dan rajangan sebesar 1.136,92 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih dan Majalengka.

#### c) Kopi

Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2016 sebesar 1.017,13 hektar meningkatmenjadi 1.029,88 hektar pada tahun 2017 dan produksi pada tahun 2017



berupa biji basah sebesar 830,87 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.

d) Cengkeh

Luas tanam komoditas cengkeh pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.086,96 hektar, dengan produksi olahan pada tahun 2017 berupa bunga basah sebesar 480,48 ton dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.

e) Tebu

Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2016 sebesar 556,74 hektar turun menjadi 471,64 hektar pada tahun 2017, dengan produksi berupa tebu sebesar 1.491,35 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung, Leuwimunding dan Jatitujuh. Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.72.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Teh	672,31	672,31	672,31	672,31	672,31
2	Tembakau	883	1.452,04	1.062,00	1.420,70	1.045,25
3	Kopi	833,37	863,38	833,37	1.017,13	1.029,88
4	Cengkeh	1.880,92	2.088,06	2.086,96	2.086,96	2.086,96
5	Tebu	1.212,34	1.006,96	682,48	556,74	471,64

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kab.Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.73.  
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Teh hijau	201,2	216,33	349,63	336,94	302,67
2	Tembakau					
	- Daun	3.884,67	6.820,99	1.117,95	1.106,86	5.684,58
	- Rajangan	768,94	1.285,43	745,3	737,9	1.136,92
3	Kopi	1.365,53	231,43	1.055,18	1.015,84	830,87
4	Cengkeh					
	- Bunga basah	2.986,04	2.986,04	1.968,61	2.056,98	480,48
	- Minyak cengkeh	87,9	351,3	51,45	53,4	2,52
5	Tebu	4.527,08	3.243,78	2.617,38	2.566,76	1.491,35

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kab.Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

4. Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2017, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2016 sebesar 1.776,03 ton turun menjadi 1.412,22 ton pada tahun 2017. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2016 sebesar 5.090,26 ton





turun menjadi 4.157,09 pada tahun 2017 dengan sentra produksi Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun 2016 sebesar 1.024,64 ton turun menjadi 890,47 ton pada tahun 2017, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah. Produksi ikan lele pada tahun 2016 sebesar 1.956,59 ton turun menjadi 1.662,23 ton pada tahun 2017, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

Tabel 2.74.  
Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Jenis	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ikan Mas	1.512,61	1.552,34	1.462,73	1.776,03	1.412,22
2.	Ikan Nila	3.716,22	3.898,05	4.192,26	5.090,26	4.157,09
3.	Gurame	844,21	877,12	788,61	1.024,64	890,47
4.	Lele	1.436,38	1.618,07	1.481,44	1.956,59	1.662,23

Sumber: Dinas Pertanian & Perikanan Kab.Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 5. Pariwisata

Kabupaten Majalengka memiliki potensi wisata berupa wisata alam, wisata budaya/wisata sejarah, wisata minat khusus dan agrowisata. Di masa mendatang, sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka akan mengalami kemajuan seiring dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Pengembangan sektor wisata pun dipengaruhi beberapa faktor antara lain terjadinya kejenuhan objek-objek wisata alam akibat hambatan-hambatan aksesibilitas dan kerusakan daya tarik alamiah. Untuk itu, dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariasi.

Pembangunan destinasi wisata mampu memberikan multiplier effect pada pertumbuhan UMKM, selain itu juga akan menumbuhkan usaha perhotelan dan restoran/kuliner yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga perekonomian di Kabupaten Majalengka dapat meningkat. Adapun sebaran dan potensi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Majalengka antara lain:

Tabel 2.75.  
Objek wisata di Kabupaten Majalengka

No.	Objek Wisata	Alamat
1.	Situ Sangiang	Sangiang Kecamatan Banjaran
2.	Situ Cianten	Gunungkuning Kecamatan Sindang
3.	Curug Muara Jaya	Argamukti Kecamatan Argapura
4.	Puncak Majakuning (Berod)	Apuy Kecamatan Argapura
5.	Gunung Panten	Sidamukti Kecamatan Majalengka
6.	Paraland	Sidamukti Kecamatan Majalengka
7.	Water Boom Grage	Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka
8.	Bumi Perkemahan Panten	Sidamukti Kecamatan Majalengka



No.	Objek Wisata	Alamat
9.	Water Boom Syuro	Kecamatan Majalengka Wetan
10.	Patilasan Prabu Siliwangi	Pajajar Kecamatan Rajagaluh
11.	Water Boom Tirta Indah	Ujung Berung Kecamatan Sindangwangi
12.	Talaga Herang	Kecamatan Sindangwangi
13.	Curug Cipeuteuy	Kecamatan Sindangwangi
14.	Cadas Gantung	Mirat Kecamatan Leuwimunding
15.	Jembar Waterpark	Kecamatan Kasokandel
16.	Water Boom Surya	Kecamatan Kadipaten

Sumber: BPS Kab. Majalengka, 2018, yang dikelola dalam SIPD.

a. Wisata Alam

Gunung Batu Tilu (Kecamatan Kasokandel), Panorama Cikebo (Kecamatan Maja), Curug Tonjong (Kecamatan Rajagaluh), Situ Janawi (Kecamatan Rajagaluh), Situ Cipanten (Kecamatan Sindang), Situ Cikuda (Kecamatan Sindangwangi), Panorama Bukit Alam Hejo di Asromo (Kecamatan Sindang), Panorama Talaga Herang Sindangwangi (Kecamatan Sindangwangi), Curug Muara Jaya (Kecamatan Argapura), Curug Sawer (Kecamatan Argapura), Air Terjun Cibali (Kecamatan Cingambul), Curug Emas (Kecamatan Talaga), Situ Sangiang (Kecamatan Banjaran), Situ Batu (Kecamatan Malausma), Situ Resmi (Kecamatan Argapura), Curug Cipeuteuy (Kecamatan Sindangwangi).

b. Wisata Budaya/Wisata Sejarah

Rumah Adat Panjalin (Kecamatan Sumberjaya), Hutan Lindung Patilasan Prabu Siliwangi (Kecamatan Rajagaluh), Situ Sangiang (Kecamatan Banjaran), Museum Talaga Manggung (Kecamatan Talaga), Makam Keramat Sunan Parung (Kecamatan Banjaran), Sunan Wanaperih (Kecamatan Banjaran), dan Makam Keramat Pangeran Muhammad dan Mbah Badori/Siti Armilah (Kecamatan Majalengka).

c. Wisata Minat Khusus

Sirkuit Gagaraji (Kecamatan Jatitujuh), Bendungan Rentang (Kecamatan Jatitujuh), Situ Cijaura (Kecamatan Kertajati), Situ Anggrahan (Kecamatan Jatitujuh), Jatiwangi Art Factory (Kecamatan Jatiwangi), Kolam Renang Tirta Indah (Kecamatan Sindangwangi), Panorama Lemahputih (Kecamatan Lemahsugih), Bumi Perkemahan Cipanten (Kecamatan Argapura), dan Wisata Paralayang Desa Sidamukti (Kecamatan Majalengka).

d. Agrowisata

Perkebunan Mangga Gedong Gincu (Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kertajati, Jatitujuh, Ligung), Wisata Agrobotu (Kecamatan Sindangwangi), Bibit-bibitan (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Majalengka), Kebun Teh Sadarehe Desa Payung (Kecamatan Rajagaluh), Durian Sinapeul (Kecamatan Sindangwangi), Kebun Teh Cipasung (Kecamatan Lemahsugih), Pisang Apuy (Kecamatan Argapura), dan Jagung (Kecamatan Argapura, Banjaran, Lemahsugih).

e. Ekowisata



Batu Luhur, Curug Baligo, Talaga Herang dan Talaga Loa (Kecamatan Sindangwangi).

f. Wisata Belanja

Kerajinan Besi (Kecamatan Sumberjaya), Anyaman dan Renda (Kecamatan Leuwimunding, Palasah, Sindangwangi, Sukahaji, Rajagaluh), Industri Rotan (Kecamatan Sumberjaya, Leuwimunding, Sindangwangi, Rajagaluh), Industri Bola (Kecamatan Kadipaten), Kecap (Kecamatan Kadipaten, Majalengka), Jeruk Sambal (Kecamatan Palasah), Kerajinan Batik (Kecamatan Palasah), Emping Melinjo (Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Sindangwangi, Talaga), Batu Alam (Kecamatan Sindangwangi), Industri Jeans (Kecamatan Cikijing), Industri Keripik (Kecamatan Cingambul).

g. Wisata Kuliner

Depo Ikan Tawar (Kecamatan Argapura), Depo Ikan Lengkong Kulon (Kecamatan Sindangwangi).

h. Desa Wisata

Pada Tahun 2017, telah ada dua Desa Wisata di Kabupaten Majalengka, yaitu : Jeruk Sambal Desa Weragati (Kecamatan Palasah) dan Ekonomi Kreatif (JAF= Jatiwangi Art Factory) Desa Jatisura (Kecamatan Jatiwangi).

Pariwisata Kabupaten Majalengka akan mengalami kemajuan seiring dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Untuk itu dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariasi.

Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2013-2017, hasilnya sudah mulai terlihat yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisata. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisata di Majalengka bertambah sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2016. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76  
Jumlah Kunjungan Wisata ke Kabupaten Majalengka  
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kunjungan wisata	124.918	131.164	141.833	162.517	529.574

Sumber : Disparbud Kab. Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

6. Perdagangan

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat selama tahun 2012-2016, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 4 unit yang kondisi fisiknya semakin membaik, dan pasar desa tercatat 38 unit pada tahun 2016

Dalam perdagangan luar negeri, selama periode 2012-2016, nilai ekspor bersih cenderung meningkat sejalan dengan kondisi perekonomian global.

Tabel 2.77  
Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Tahun 2013-2017

Jenis sarana perdagangan	2013	2014	2015	2016	2017
Pasar PEMDA	4	4	4	4	4
Pasar Desa	38	38	39	39	41
Toko dan Ruko	128	128	128	128	128
Kios dan Los	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
Emprakan	307	307	307	3020	3020
Rumah Makan/Restoran	-	-	-	142	151
Jumlah	4.713	4.713	4.714	7.569	7.580

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Dalam struktur perekonomian daerah, sektor perdagangan menempati urutan kedua setelah sektor pertanian. Adapun kontribusinya dari tahun ke tahun terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78  
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
1	2013	17,92
2	2014	18,20
3	2015	18,19
4	2016	17,92
5	2017	17,59

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2018, yang dikelola dalam SIPD.

## 7. Perindustrian

Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013, tetapi kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dalam tiga tahun terakhir trendnya mengalami kenaikan dan mencapai 14,31% pada tahun 2016. Ini menandakan berbagai jenis industri di Majalengka mulai tumbuh dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya Jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.79.  
Jenis Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Jenis Industri	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	Industri Makanan	709	4.098
2	Industri Minuman	2	25
3	Industri Pengolahan Tembakau	15	246
4	Industri Tekstil	37	189
5	Industri Pakaian Jadi	178	4387
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	32



No.	Jenis Industri	Jumlah Industri (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
7	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	173	1557
8	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	0	0
9	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0	0
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi	0	0
11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Kimia	2	2
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	0	0
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	460	7720
15	Industri Logam Dasar	0	0
16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	52	197
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	1	5
18	Industri Peralatan Listrik	24	30
19	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	0	0
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	0	0
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	0	0
22	Industri Furniture	40	295
23	Industri Pengolahan Lainnya	6	64
Jumlah		1.702	18.847

Sumber : Disnakerin Kab. Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### 2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

##### a. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2008.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2011.

Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD.



b. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian pembangunan urusan penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan diantaranya dilihat dari jumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka tahun 2017, Pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya telah mencapai 71,22% dan jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat pada tahun 2017 tercatat sebanyak 498 orang dari target yang telah ditentukan sebanyak 300 orang sedangkan untuk jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Majalengka per Desember 2017 tercatat sebanyak 8.204 orang.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Kemampuan ekonomi daerah yang memicu daya saing daerah diantaranya diukur dengan rata-rata konsumsi Rumah Tangga per kapita. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan, minuman, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.80.  
Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Ribuan Rp)
1.	2013	10.032,13
2.	2014	10.369,43





No.	Tahun	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Ribu Rp)
3.	2015	10.762,02
4.	2016	10.272,02
5.	2017	11.653,37

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

##### a. Infrastruktur Jalan

Khusus infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (25,985 km), Jalan Provinsi (135,729 km), dan Jalan Kabupaten (715,6 km) dengan kondisi jalan kabupaten pada tahun 2017 dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu jalan kondisi baik (621,38 km), kondisi sedang (38,25 km), kondisi rusak ringan (19,62 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (36,35 km).

##### b. Perhubungan

Saat ini di Kabupaten Majalengka sedang dilaksanakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Bahkan dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka akan dilalui dan dilayani oleh 2 (dua) buah jalan tol yaitu jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012, dan jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali).

Tabel 2.81.  
Indikator Perhubungan  
di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 5,86	1 : 5,27	1 : 5,95	1:6,63	1 : 6,63
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	10.160.215	11.160.215	11.718.225	12.276.235	11.048.612



No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (jiwa)	2.245.118	2.250.120	2.362.626	2.475.132	2.227.619

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

c. Irigasi

Merupakan infrastruktur lain yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, karena akan menunjang ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2017 di Kabupaten Majalengka terpetakan ke dalam 396 daerah irigasi dan telah mampu memenuhi kebutuhan air pada areal fungsional seluas 22.518 Ha.

d. Penataan Ruang Daerah

Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82.  
Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka

No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	83,67	83,67	83,67	83,67	83,67
2.	Luas wilayah produktif	%	58	58,5	59	59	59
3.	Luas wilayah industri	%	1,1	1,2	1,3	1,20	1,25
4.	Penyediaan kawasan industri	Ha	150	50	50	65	100
5.	Luas wilayah banjir	Ha	270	300	300	300	305
6.	Luas wilayah kekeringan	Ha	-	-	-	-	-
7.	Luas wilayah perkotaan	%	36	37	38	39	40

Sumber : Dinas BMCK Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

e. Fasilitas Keuangan

Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI, Bank Mandiri, BankPanin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank BTPN, Bank OCBC NISPdan BPR. Perkembangan jumlah lembaga perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.  
Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	BJB	9	9	9	10	10
2.	BRI	36	36	36	36	36
3.	BNI	3	3	3	3	3



No.	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4.	MANDIRI	4	6	6	6	6
5.	PANIN	2	4	4	4	4
6.	DANAMON	5	5	5	5	5
7.	BCA	1	1	1	1	1
8.	OCBC NISP	2	2	2	2	2
9.	BTPN	3	5	5	5	5
10.	SAUDARA	1	1	1	1	1
11.	BPR	14	15	16	16	16
12.	BTN	7	7	7	8	8
13.	BRI Syariah	0	0	0	1	1
14.	BTPN Syariah	0	0	0	1	1
Jumlah		87	94	95	99	99

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### f. Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 tercatat 25 usaha makanan/minuman berbentuk cafetaria, 1 buah usaha makanan/minuman berbentuk coffe shop dan 58 usaha makanan/minuman berbentuk kedai makan. Banyak bermunculannya jenis usaha makanan/minuman baru di wilayah Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa semakin hidupnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Majalengka.

#### g. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 1 Hotel Bintang tiga dan 12 Hotel Kelas Melati.

#### h. Air bersih

Penggunaan air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna air



bersih pada tahun 2017 sebesar 338.481 rumah tangga. Data selengkapnya mengenai jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.84  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
1.	2013	311.191
2.	2014	313.565
3.	2015	341.122
4.	2016	316.724
5.	2017	338.481

Sumber : Dinas PPSDA Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, perkembangan desa.

##### a. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demo

Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.85.  
Jumlah Kriminalitas Kabupaten Majalengka Tahun 2017

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Kasus Narkoba	28
2	Kasus Pembunuhan	2
3	Kasus Seksual	16
4	Kasus Penganiayaan	11
5	Kasus Pencurian	168
6	Kasus Penipuan	32
7	Kasus Pemalsuan Uang	0
Jumlah		257

Sumber : Satpol PP Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.86.  
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Demonstrasi
1.	2013	12



No.	Tahun	Jumlah Demonstrasi
2.	2014	43
3.	2015	19
4.	2016	12
5.	2017	20

Sumber : Satpol PP Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### b. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Rata-rata proses perizinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2017 hanya membutuhkan waktu 7 hari.

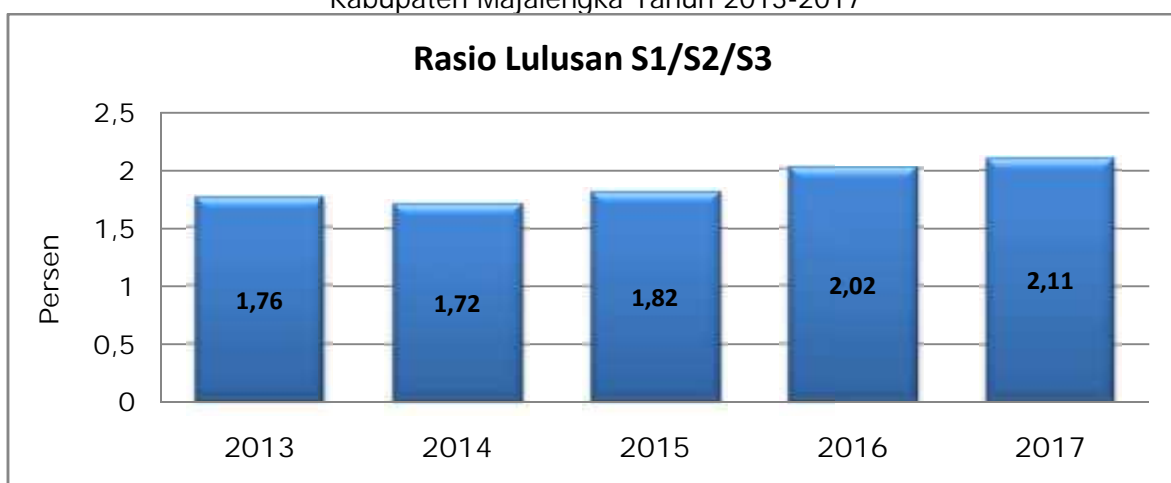
#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

##### a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2013-2017, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. Tercatat pada tahun 2017 persentase lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Majalengka sebesar 2,11% dari total jumlah penduduk.

Gambar 2.12.  
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017



Sumber : Diolah dari database SIAK, Disdukcapil Kabupaten Majalengka Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

#### b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependencyratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependencyratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Data perkembangan Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan dapat dilihat pada tabel 2.107. sebagai berikut :

Tabel 2.87.  
Rasio Ketergantungan/ Angka Beban Tanggungan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Rasio Ketergantungan (%)
1.	2013	55,34
2	2014	52,88
3.	2015	49,51
4.	2016	49,54
5.	2017	48,38

Sumber : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2018, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2017, angka ketergantungan di Kabupaten Majalengka sebesar 48,38%, ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban 44 orang penduduk non-produktif.

#### 2.4. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang





disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh berbagai data dan informasi pembangunan daerah. Informasi capaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2018.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.88.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018**

No	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018					Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan</b>												
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun</b>												
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,79	73,71	74,70	75,72	76,81	72,54	64,51	65,14	65,75	66,40
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,77	8,14	8,55	8,96	9,47	7,49	6,85	6,94	7,45	6,99
3	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	98,14	98,72	99,30	99,55	99,80	96,68	11,76	11,88	99,40	99,40
4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pada Pendidikan Dasar	poin	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,18
5	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pada Pendidikan Menengah	poin	0,30	0,46	0,61	0,77	0,93	0,42	0,61	0,66	N/A	N/A
6	Prosentase Bangunan Sekolah Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik	Persen	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	82,58	83,00	84,46	85,90	77,00
7	Prosentase Bangunan Sekolah Pendidikan Menengah \Dalam Kondisi Baik	Persen	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	79,59	85,00	60,61	N/A	86,43
<b>Sasaran 2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan</b>												
1	Prosentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	85,00	96,61	100	100,00	100,00	76,60	99,18	98,30	100,00	92,86
2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih	Jiwa	900,00	100	100	50,00	50,00	1.540,00	400	100,00	1.124,00	50,00
3	Rasio guru terhadap murid	Rasio	1 : 21	1 : 22	1 : 23	1 : 24	1 : 25	1 : 21	1 : 21	1 : 21	1 : 20	1 : 23
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka</b>												
1	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, persatuan 1,000 penduduk	Poin	0,0893	0,0893	0,0901	0,0910	0,0910	0,0893	0,0893	0,11	0,11	0,090
2	Jumlah Puskesmas PONED	Unit	26,00	27,00	28,00	28,00	28,00	25,00	25,00	28,00	29,00	30,00
3	Rasio Rumah Sakit per 1,000 penduduk	Poin	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0034	0,0031
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan</b>												
1	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	6,00	6,00	6,00	6,0	7,00	6,00	6,00	4,00	13,00	10,00
2	Tersedianya SOP sistem rujukan	SOP	3,00	3,00	3,00	3,0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	83,49	100,00	100,00	100,0	100,00	83,49	100,00	100,00	42,1200	77,66
<b>Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB</b>												
1	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	67,52	67,91	68,29	68,67	69,04	67,52	68,77	69,09	69,22	69,39
2	Cakupan desa siaga aktif	Persen	75,00	74,00	76,00	78,00	80,00	75,00	99,42	97,96	100,00	100,00
3	Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS	Persen	56,00	57,00	58,00	59,00	70,00	56,00	53,46	87,06	75,00	75,00
4	AKI per 100.000 KH	Kasus	136,24	134,51	132,78	131,05	129,32	98,20	93,34	86,28	84,05	77,51
5	AKB per 1.000 KH	Kasus	10,76	10,16	9,56	8,96	8,36	8,36	7,65	6,52	4,30	4,02
6	Balita Gizi Buruk	Persen	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,04	0,038	0,02	0,07	0,04
7	Cakupan Desa/Kelurahan Unverssa Child Immunization	Persen	96,21	97,10	97,96	98,83	100,00	96,21	94,75	95,34	96,21	98,83

No	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018					Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan</b>												
1	Pendidikan formal bagi tenaga medis	Orang	3,00	3,00	7,00	9,00	9,00	3,00	3,00	8,00	8,00	7,00
2	Pendidikan formal bagi tenaga paramedis (perawat, bidan nutrisionos, dll)	Orang	5,00	5,00	31,00	40,00	45,00	5,00	3,00	34,00	45,00	86,00
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	Poin	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,15	0,25	0,11	0,32
4	Rasio tenaga para medis per satuan penduduk	Poin	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,28	1,33	1,41	3,35
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat</b>												
1	Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	87,13	88,73	90,62	92,36	94,61	76,08	88,80	92,15	86,83	94,71
2	Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan	Persen	0	0	0,14	0,28	0,28	0	0,08	0	0,29	2,78
3	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	68,33	70,00	72,33	73,67	75,00	68,80	66,96	72,40	76,00	76,00
4	Rumah tidak layak huni	Persen	13,50	10,33	7,15	3,97	-	1,81	2,49	2,21	1,64	-
5	Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik	Persen	86,50	90,00	93,50	97,00	100,00	47,48	62,17	68,86	63,43	76,30
6	Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik	Persen	91,07	91,64	92,20	92,77	93,33	91,84	94,52	94,52	-	-
7	Jumlah Desa yang dapat diakses angkutan umum	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	86,25	70,00	72,00	174,00	180,00
<b>Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana</b>												
1	Prosentase pemenuhan RTH	Persen	18,65	39,00	59,30	79,60	100,00	18,65	11,31	62,39	63,48	63,48
2	Luas Lahan Kritis (Ha) Yang ditangani	Ha	1.000,0	600,00	600,00	600,00	600,00	678,00	527,28	227,82	N/A	N/A
3	Penanganan Dan Pengelolaan Persampahan	Persen	26,00	32,00	38,00	44,00	50,00	27,92	29,19	48,77	49,09	53,00
4	Upaya Pelestarian Lingkungan	Persen	19,27	39,45	59,63	79,81	100,00	19,27	18,50	53,93	66,57	58,30
5	Penanganan Kebencanaan Pra Bencana	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	20,00
6	Penanganan Kebencanaan Saat Bencana	Persen	50,00	50,00	60,00	60,00	65,00	50,00	50,00	60,00	60,00	20,00
7	Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00
8	Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL	Persen	58,33	83,33	88,89	94,44	100,00	58,33	66,67	69,23	96,15	96,15
<b>Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representatif</b>												
1	Jumlah Pasar yang direvitalisasi	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
<b>Sasaran 10 : Berkembangnya sektor - sektor ekonomi padat karya</b>												
1	Jumlah outlet yang dibangun	Unit	-	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	-	-	2,00	3,00
<b>Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur</b>												
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah</b>												
1	OPD dan OPP dengan nilai IKM Kriteria minimal "B"	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
2	Capaian nilai SAKIP Pemda	Kriteria	C	C	CC	CC	B	C	CC	CC	CC	B
3	Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya	Persen	62,00	67,00	72,00	73,00	74,00	83,80	94,4	84,00	71,22	76,70
4	Tingkat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00
5	Pemenuhan Kebutuhan/Data Informasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00

No	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018					Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
6	Pendapata Asli Daerah (PAD)	Milyar	154,00	219,00	385,00	611,00	924,00	207,04	276,79	331,00	368,53	449,00
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah</b>												
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat	Orang	239,00	250,00	275,00	300,00	325	458,00	640,00	1.047,00	498,00	3.613
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum</b>												
1	Jumlah demo	Kali	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	43,00	19,00	12,00	18,00	4,00
2	Angka kriminalitas	Kasus	207,00	187,00	200,00	205,00	218,00	314,00	325,00	275,00	344,00	228,00
3	Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	Persen	76,12	-	-	-	80,00	72,00	-	-	-	87,50
<b>Misi 3 : Membangun Iklim Investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat</b>												
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan investasi PMA/PMDN dan Investasi Lokal terkait pengembangan UMKM</b>												
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,30	5,50	5,80	6,30	6,50	4,11	5,02	5,05	5,78	5,78
2	Daya Beli	Investor	648,04	652,64	657,47	662,62	667,65	643,97	692,68	8.510,85	8.712,15	8,93
3	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas 500,000,000,00	Investor	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	33,00	39,00	37,00	33,00	49,00
4	Jumlah Nilai Investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas 500,000,000,00	Milyar	139,05	146,00	153,30	160,97	169,02	582,302	289,72	335,80	551,90	1.145,00
5	Jumlah Investor UMKM	Investor	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.305,00	835,00	627,00	427,00	696,00
6	Nilai Investasi UMKM	Milyar	339,47	300,00	300,00	300,00	300,00	334,2	162,79	119,80	77,46	142,76
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM</b>												
1	Jumlah UMKM	Unit	26.963,0	28.581,00	30.296,00	32.114,00	34.040	26.329,0	27.437,00	28.260,00	28.113,00	29.518
2	Persentase Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Persen	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	3,50	5,60	6,00	8,46	8,48
3	Jumlah Tenaga Kerja di sektor UMKM	Orang	613,0	715,00	817,00	919,00	1.021	892,0	1.459,00	2.171,00	84.160,00	1.261
<b>Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan</b>												
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat untuk Mengakses Pangan</b>												
1	Cadangan pangan pemerintah	Persen	-	-	20,00	20,00	20,00	-	-	20,00	-	20,00
2	Ketersediaan pangan (LPM)	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	-	1,00
3	SLPTT	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	38,00	24,00	-	10,00
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan</b>												
1	Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	3,00	3,00
2	Jumlah kunjungan wisata	Kunjungan	134.000	162.000	162.000	200.000	200.000	131.164	141.833	162.517	529.574	515.421
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Pertumbuhan sektor-sektor Ekonomi Unggulan daerah yang pro job, pro poor dan pro environment</b>												
1	Jumlah kawasan industri potensi daerah yang dibangun	Kawasan	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-

No	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018					Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan peran gender dalam pembangunan</b>												
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1	1,00	1,00	1,00	1,00	46,42	0,14	1,04	2,80	50,36
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	52,83	-	4,18	6,12	55,84
<b>Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera</b>												
1	Kemiskinan	Persen	12,00	11,00	9,00	7,00	5,00	12,96	12,73	13,58	12,60	12,60
2	Rata rata jumlah anak per keluarga	orang	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,21	1,50	1,12	1,12	1,14
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Keluarga	31,28	29,48	27,68	25,88	24,08	33,66	42,24	5,75	31,58	31,89
<b>Sasaran 6 : Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial</b>												
1	PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	35,36	4,22	38,37	75,87	135,11
<b>Sasaran 7 : Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih</b>												
1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	6,74	4,74	4,24	3,99	2,25	4,47	4,01	3,50	5,02	4,95
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	5,00	20,00	15,00	10,00	10,00	20,00	39,54	33,33	14,66	54,41
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,00	2,00	2,00	35,00	2,00	15,20	14,45	32,32	29,65	23,65
<b>Sasaran 8 : Memberikan fasilitas hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak - hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan</b>												
1	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	Persen	31,86	28,32	24,78	21,24	17,70	31,86	13,27	17,69	6,06	11,14
<b>Sasaran 9 : Meningkatkan peran pemuda, organisasi masyarakat dan prestasi olah raga</b>												
1	Jumlah Kompetensi olah raga	kali	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	12,00	13,00	10,00	9,00	10,00
2	Jumlah pemuda Pelopor	orang	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Sasaran 10 : Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya</b>												
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00
<b>Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri</b>												
<b>Sasaran : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</b>												
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00	-	-	31,00	31,00	31,00
2	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Juta Rp.	681.204	701045	720.886,00	740.727,00	760.568	1.395.352	1136136	395.690,00	290.360,00	812.360
3	Ketersediaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00	-	330,00	300,00	330,00	330,00
4	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Desa	Dokumen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	50,00	60,00	75,00	100,00	100,00
5	Jumlah Peraturan Desa	Perdes	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	4,00	5,00	8,00	9,00	10,00
6	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	Dokumen	330,00	330,00	330,00	330,00	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
7	Peningkatan Kapasitas Desa	Persen	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	50,00	60,00	60,00	70,00	80,00
8	Profil Desa	Persen	10,00	25,00	50,00	75,00	100,00	40,00	57,88	90,00	100,00	100,00



No	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018					Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 - 2018				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai</b>												
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama</b>												
1	Konflik antar umat beragama	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Zakat yang terkumpul	Milyar Rp.	5,00	8,00	11,00	14,00	16,00	5,00	8,00	7,20	9,00	8,00
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Poin	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01





2.5. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), terdapat 206 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Majalengka. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Capaian ini dinilai terhadap target RPJMN Tahun 2019. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.99  
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDGs  
Kabupaten Majalengka Tahun 2019

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak Ada Data	Jumlah Indikator
1.	Tanpa Kemiskinan	7	2	1	0	2	12
2.	Tanpa Kelaparan	9	2	1	0	2	14
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	1	4	1	9	26
4.	Pendidikan Berkualitas	4	3	2	1	1	11
5.	Kesetaraan Gender	0	2	3	1	8	14
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	2	1	0	3	11
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	1	0	3	6
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	2	0	8	17
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	0	2	4	0	6	12
10.	Mengurangi Kesenjangan	0	0	5	0	6	11
11.	Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas	0	1	6	0	8	15
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	3	0	1	9	13
13.	Tindakan terhadap Iklim	0	0	2	0	5	7
14.	Pelestarian dan Pemanfaatan Lanjutan Ekosistem Daratan	0	0	3	1	10	14
15.	Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat	2	3	0	2	16	23
Total		44	24	35	7	96	206

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023



BAB III  
GAMBARAN  
KEUANGAN DAERAH

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Pada bab mengenai gambaran keuangan daerah ini, akan diuraikan secara rinci kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa lima tahun mendatang.

#### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh :

- a) Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM),
- b) Laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah,
- c) Terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor dan,
- d) Melemahnya nilai tukar rupiah.

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara



kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2014 hingga tahun 2018 disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.1.  
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

No	Pendapatan Daerah	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.057.001.723.549,00</b>	<b>2.493.439.229.256,00</b>	<b>2.576.052.108.544,00</b>	<b>2.685.374.288.724,55</b>	<b>2.817.703.167.346,60</b>	<b>8,43</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>223.120.890.621,00</b>	<b>283.735.793.231,00</b>	<b>331.527.582.021,00</b>	<b>513.783.824.021,55</b>	<b>449.706.526.145,60</b>	<b>21,63</b>
a.	Pajak Daerah	39.580.123.472,00	55.351.055.514,00	81.781.134.547,00	116.930.840.901,00	144.100.938.195,00	38,45
b.	Retribusi Daerah	26.693.633.361,00	17.319.627.349,00	16.338.783.187,00	16.859.496.972,00	18.506.497.178,00	-6,96
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.483.345.612,00	5.331.024.389,00	6.958.395.004,00	7.134.073.543,00	7.229.014.024,00	7,90
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.363.788.176,00	205.734.085.979,00	226.449.269.283,00	372.859.412.605,55	279.870.076.748,60	21,43
<b>2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.272.696.815.940,00</b>	<b>1.367.195.047.862,00</b>	<b>1.723.845.574.035,00</b>	<b>1.689.901.152.919,00</b>	<b>1.668.010.124.763,00</b>	<b>7,56</b>
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100.051.142.940,00	86.458.145.862,00	98.614.229.706,00	91.248.880.539,00	77.319.204.617,00	-5,57
b.	Dana Alokasi Umum	1.092.495.173.000,00	1.115.055.702.000,00	1.225.932.872.000,00	1.204.397.174.000,00	1.170.272.587.360,00	1,83
c.	Dana Alokasi Khusus	80.150.500.000,00	165.681.200.000,00	399.298.472.329,00	394.255.098.380,00	420.418.332.786,00	63,27
<b>3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>561.184.016.988,00</b>	<b>842.608.388.163,00</b>	<b>520.678.952.488,00</b>	<b>481.689.311.784,00</b>	<b>699.986.516.438,00</b>	<b>12,44</b>
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	2.353.618.973,00	0,00	124.027.280.000,00	-
b.	Dana Darurat Penanggulangan Kerusakan Akibat Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.457.792.958,00	118.829.286.887,00	122.521.101.915,00	129.817.736.644,00	143.368.557.287,00	10,36
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	279.958.668.000,00	462.606.688.000,00	250.451.327.000,00	320.040.534.900,00	312.485.897.000,00	11,20
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	183.767.556.030,00	261.172.413.276,00	145.352.904.600,00	31.831.040.240,00	120.104.782.151,00	49,25

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Majalengka Tahun 2013-2018

Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten selama tahun 2018 tercatat mencapai **Rp. 2.817.703.167.346,60,-**. Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2017 mencapai **Rp.2.685.374.288.724,55,-**. Hal ini terjadi peningkatan PAD pada tahun 2018. Komponen pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b) Dana Perimbangan, yaitu dari dana alokasi khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, bantuan keuangan dari provinsi.

Bila dilihat dari penerimaan daerah, maka Bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2014-2018 mengalami peningkatan secara terus menerus. Sedangkan bagian terbesar pendapatan masih berada pada bagian pendapatan dari bagian dana perimbangan pada tahun 2018 yang mencapai **Rp.1.668.010.124.763,00,-**. Sumber terbesar komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari pos dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2. Belanja Daerah**

Tolok ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran/belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

Jenis pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Tak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Rencana anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.2.  
Rata- Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018

No	Belanja Daerah	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.010.112.733.955,00</b>	<b>2.388.970.814.976,00</b>	<b>2.633.576.715.220,00</b>	<b>2.638.825.946.023,00</b>	<b>2.703.125.430.623,00</b>	<b>7,93</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.119.526.911.370,00</b>	<b>1.258.592.602.117,00</b>	<b>1.538.412.579.612,00</b>	<b>1.508.939.050.181,00</b>	<b>1.551.047.379.880,00</b>	<b>8,88</b>
a.	Belanja Pegawai	1.074.115.287.939,00	1.120.213.633.217,00	1.185.802.320.216,00	1.069.838.932.312,00	1.090.166.962.884,00	0,57
b.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	-
c.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	-
d.	Belanja Hibah	2.452.599.250,00	1.550.000.000,00	11.825.800.000,00	38.999.007.000,00	17.912.483.000,00	200,47
e.	Belanja Bantuan Sosial	210.000.000,00	241.000.000,00	0	0	0	-
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	387.618.500,00	264.258.600,00	0	0	0	-
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	41.615.151.681,00	136.323.710.300,00	340.784.459.396,00	399.313.206.032,00	442.967.933.996,00	101,42
h.	Belanja Tidak Terduga	746.254.000,00	0	0	787.904.837,00	0	-
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>890.585.822.585,00</b>	<b>1.130.378.212.859,00</b>	<b>1.095.164.135.608,00</b>	<b>1.129.886.895.842,00</b>	<b>1.152.078.050.743,00</b>	<b>7,24</b>
a.	Belanja Pegawai	99.271.469.927,00	134.303.614.491,00	152.643.271.731,00	177.148.921.434,00	174.867.790.786,00	15,93
b.	Belanja Barang dan Jasa	261.457.838.285,00	323.941.989.064,00	310.762.840.089,00	346.965.774.417,00	317.689.010.277,00	5,76
c.	Belanja Modal	529.856.514.373,00	672.132.609.304,00	631.758.023.788,00	605.772.199.991,00	659.521.249.680,00	6,40

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati Majalengka Tahun 2013-2018





### **3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran. Dalam aspek pengeluaran pembiayaan, sebagian besar didominasi oleh pembentukan dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Gambaran detail mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka disajikan pada Tabel berikut ini:



Tabel 3.3.

Rata- Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018

No	Pembiayaan	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2014 (Rp)	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2015 (Rp)	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2016 (Rp)	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH (NETTO)</b>	<b>118.082.255.739,00</b>	<b>135.142.245.333,00</b>	<b>176.862.540.638,00</b>	<b>117.414.092.988,00</b>	<b>132.968.083.872,55</b>	<b>6,24</b>
<b>1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>148.082.255.739,00</b>	<b>165.142.245.333,00</b>	<b>239.716.159.611,00</b>	<b>137.414.092.988,00</b>	<b>163.968.083.872,55</b>	<b>8,33</b>
a.	SILPA Daerah Tahun Sebelumnya	147.848.430.739,00	164.971.245.333,00	239.710.659.611,00	119.337.933.962,00	163.962.435.689,55	11,02
b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00	-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e.	Penerimaan Piutang Daerah	233.825.000,00	171.000.000,00	5.500.000,00	76.159.026,00	5.648.183,00	267,12
<b>2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>62.853.618.973,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>31.000.000.000,00</b>	<b>24,08</b>
a.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	39.000.000.000,00	58.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	15,80
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	4.853.618.973,00	0,00	1.000.000.000,00	-
c.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: LKPJ-AMJ Bupati MajalengkaTahun 2013-2018

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci. Hal-lah yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 3.4.

Rata- Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>A</b>	<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>26,26</b>
	Kas	10,76
	Investasi Jangka Pendek	-
	Piutang	80,13
	Penyisihan Piutang	46,08
	Bagian Lancar Pinjaman	
	Persediaan	132,41
	Biaya Dibayar di Muka	-
<b>2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,25</b>
	Tanah	1,02
	Peralatan dan mesin	8,40
	Gedung dan bangunan	3,75
	Jalan, irigasi, dan jaringan	16,29
	Aset tetap lainnya	22,80
	Konstruksi dalam pengerjaan	-
	Akumulasi Penyusutan	-
<b>3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>18,66</b>
	Tagihan penjualan angsuran	-
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
	Tagihan Jangka Panjang	-
	Kemitraan dengan pihak ketiga	-
	Aset tak berwujud	-7,17
	Tuntutan Perbendaharaan	-
	Aset Lain-Lain	44,88
	Akumulasi Penyusunan Aset Rusak Berat	-
<b>4</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>7,04</b>
	Dana Bergulir	-0,86
	Investasi Non Permanen Lainnya	-
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-0,86



No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan
	Penyertaan Modal Pada Pusat Koperasi Syariah dan KUKM	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7,24
<b>5</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>66,12</b>
5	Dana Cadangan	66,12
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>2,50</b>
<b>B</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>20,61</b>
<b>1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>20,61</b>
	Utang kepada pihak ketiga	20,35
	Utang perhitungan pihak ketiga	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
<b>C</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>2,04</b>
<b>1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
	SILPA	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	
	Cadangan piutang	
	Cadangan persediaan	
	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
<b>2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
	Diinvestasikan dalam aset tetap	
	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2,50</b>

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Selama periode tahun anggaran 2014-2018, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- 1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
7. Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
8. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.



10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

## **2. Kebijakan Belanja Daerah**

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2014-2018, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan SDGs. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan SDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
- b. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume APBD setiap tahunnya.
- c. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari volume APBD setiap tahunnya.
- d. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



- e. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
- f. Untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
- g. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Majalengka, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- h. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixedcost*) dan pelayanan dasar OPD.
- i. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - 3) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - 4) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - 5) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  - 6) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada



kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

- 7) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### **3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada.

#### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun ke depan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2014, persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 58 persen, tahun 2015 menurun menjadi 52 persen. Hingga tahun 2018, proporsi belanja terus mengalami penurunan menjadi 46 persen. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk

memenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan dalam penerimaan pegawai.

Tabel 3.5.  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majalengka  
Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur</b>	<b>Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)</b>	<b>Presentase</b>
2014	1.173.386.757.866	2.040.112.733.955	58%
2015	1.254.517.247.708	2.418.970.814.976	52%
2016	1.338.445.591.947	2.696.430.334.193	50%
2017	1.246.987.853.746	2.658.825.946.023	47%
2018	1.265.034.753.670	2.734.125.430.623	46%

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6.  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

NO.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan	2.057.001.723.549,00	2.493.439.229.256,00	2.576.052.108.544,00	2.685.374.288.724,55	2.817.703.167.346,60
	dikurangi					
2	Realisasi Belanja	2.010.112.733.955,00	2.388.970.814.976,00	2.633.576.715.220,00	2.638.825.946.023,00	2.703.125.430.623,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	62.853.618.973,00	20.000.000.000,00	31.000.000.000,00
	Defisit Real	16.888.989.594,00	74.468.414.280,00	-120.378.225.649,00	26.548.342.701,55	83.577.736.723,60

Tabel 3.7.  
Komposisi penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

NO.	URAIAN	Proporsi dari total defisist riil				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	147.848.430.739,00	164.971.245.333,00	239.710.659.613,00	119.337.933.962,00	163.962.435.689,55
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Piutang Daerah	233.825.000,00	171.000.000,00	5.500.000,00	76.159.026,00	5.648.183,00



Tabel 3.8.  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Jumlah Silpa	147.848.430.739,00	239.710.659.611,00	163.962.435.689,55	119.337.933.962,00	163.962.435.689,55
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2023 ini sangatlah penting untuk dikaji. Hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2014-2018 akan menjadi dasar dalam pendanaan program dan kegiatan pada periode pemerintahan saat ini yaitu periode 2018-2023.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dana dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

##### **a. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2018-2023**

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan



pembangunan diarahkan untuk memperkuat program unggulan tahun 2018-2023 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

- a. Mendanai program prioritas dalam rangka pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2018-2023, terutama untuk pemenuhan urusan dasar setiap perangkat daerah, program pencapaian indikator kinerja Utama (IKU) kabupaten, program regular setiap perangkat daerah dan program prioritas setiap perangkat daerah.
- b. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025, SPM dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008.
- c. Mendukung percepatan pembangunan nasional (Inpres Nomor 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010).
- d. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
- e. Mendanai kegiatan yang bersifat terobosan (program baru/terobosan).
- f. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Kabupaten Majalengka secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
- g. Mendanai program janji Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk kepentingan perencanaan diperkirakan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut:



Tabel 3.9.  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Tahun 2018 - 2023

NO.	URAIAN	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.323.697.562.203,96</b>	<b>3.365.663.106.509,24</b>	<b>3.714.678.744.318,64</b>	<b>3.769.389.758.280,58</b>	<b>4.111.589.401.519,90</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>473.449.999.992,96</b>	<b>472.691.498.291,60</b>	<b>527.899.489.429,09</b>	<b>582.543.471.780,20</b>	<b>636.872.957.051,47</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	143.849.545.385,00	197.954.670.995,45	221.602.803.666,13	245.250.994.010,04	268.899.258.503,74
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.092.014.667,96	27.394.357.011,71	29.820.719.022,68	31.689.631.305,09	33.250.536.441,94
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.490.898.197,00	9.047.514.042,73	9.665.723.979,90	10.283.933.917,07	10.902.143.854,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	301.017.541.743,00	238.294.956.241,71	266.810.242.760,38	295.318.912.547,99	323.821.018.251,54
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.715.228.407.900,00</b>	<b>1.781.288.692.291,09</b>	<b>1.875.750.226.276,53</b>	<b>1.965.152.330.068,90</b>	<b>2.052.084.236.993,01</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	83.026.386.000,00	92.908.546.521,52	89.685.266.582,45	86.462.029.294,16	83.238.846.841,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.167.367.009.900,00	1.273.314.041.341,83	1.316.703.701.636,33	1.353.438.026.365,13	1.386.495.085.135,57
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	464.835.012.000,00	415.066.104.427,74	469.361.258.057,75	525.252.274.409,62	582.350.305.015,97
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>1.135.019.154.311,00</b>	<b>1.111.682.915.926,55</b>	<b>1.311.029.028.613,02</b>	<b>1.221.693.956.431,47</b>	<b>1.422.632.207.475,42</b>
1.3.1	Hibah	132.650.000.000,00	79.529.064.556,35	102.495.674.011,21	126.367.576.960,94	150.924.189.276,88
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	139.642.898.935,00	151.289.294.717,83	158.897.244.949,95	166.505.195.182,08	174.113.145.414,21
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	414.881.243.000,00	270.844.358.533,01	413.101.456.597,91	265.771.142.009,51	408.028.240.074,41
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	447.845.012.376,00	610.020.198.119,36	636.534.653.053,94	663.050.042.278,94	689.566.632.709,92





NO.	URAIAN	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.361.968.084.312,75</b>	<b>3.468.910.821.747,25</b>	<b>3.745.747.668.368,65</b>	<b>3.863.923.450.098,68</b>	<b>4.154.612.683.927,97</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.819.857.336.440,18</b>	<b>1.850.358.049.769,91</b>	<b>1.934.239.577.388,32</b>	<b>2.025.653.341.287,26</b>	<b>2.121.229.159.251,17</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.270.887.345.845,28	1.325.323.462.710,88	1.346.997.485.956,79	1.368.671.933.388,26	1.390.346.926.189,99
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	27.416.200.000,00	19.216.323.925,59	24.973.592.438,96	30.730.798.719,60	36.487.924.988,37
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	596.385.478,62	614.287.480,08	632.211.450,13	650.157.213,99
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	16.394.156.005,30	12.744.531.628,87	15.339.174.183,90	17.933.816.738,92	20.528.459.293,94
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan lainnya	502.759.634.589,60	491.477.346.025,95	545.315.037.328,59	606.684.580.990,35	672.215.691.564,87
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.542.110.747.872,57</b>	<b>1.618.552.771.977,33</b>	<b>1.811.508.090.980,33</b>	<b>1.838.270.108.811,42</b>	<b>2.033.383.524.676,80</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	83.835.493.875,00	99.582.941.404,47	107.934.941.404,47	110.093.640.232,56	110.603.737.094,94
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	612.662.101.449,46	641.092.925.553,69	684.341.600.777,92	697.590.276.002,14	740.838.951.226,37
2.2.3	Belanja Modal	845.613.152.548,11	877.876.905.019,17	1.019.231.548.797,95	1.030.586.192.576,72	1.181.940.836.355,49
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(38.270.522.108,79)</b>	<b>(103.247.715.238,01)</b>	<b>(31.068.924.050,00)</b>	<b>(94.533.691.818,10)</b>	<b>(43.023.282.408,07)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>38.270.522.108,79</b>	<b>103.247.715.238,01</b>	<b>31.068.924.050,00</b>	<b>94.533.691.818,10</b>	<b>43.023.282.408,07</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>42.270.522.108,79</b>	<b>112.425.523.322,61</b>	<b>38.742.018.362,30</b>	<b>109.533.691.818,10</b>	<b>58.023.282.408,07</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	42.001.530.108,79	112.262.808.186,62	38.577.051.191,17	84.366.472.611,83	57.853.811.166,66
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	25.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-



NO.	URAIAN	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	268.992.000,00	162.715.135,99	164.967.171,13	167.219.206,27	169.471.241,41
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>9.177.808.084,60</b>	<b>7.673.094.312,30</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	4.177.808.084,60	2.673.094.312,30	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2019 dan Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.10  
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Majalengka  
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
SiLPA	42.001.530.108,79	112.262.808.186,62	38.577.051.191,17	84.366.472.611,83	57.853.811.166,66

Sumber : Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka

#### b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

##### 1) Kebijakan

Kebijakan keuangan daerah dalam hal potensi daerah dan penerimaan di Kabupaten Majalengka sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sector; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

##### 2) Strategi

a) Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Penegakan aturan dalam Pengelolaan PAD;
4. Reformasi birokrasi pengelola PAD.

b) Strategi untuk meningkatkan dana perimbangan adalah:

1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;

2. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
  3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;
  4. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait di kabupaten.
- c) Strategi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah:
1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak provinsi;
  2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  3. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

**Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi pendapatan daerah adalah:**

a) Pendapatan Asli Daerah :

1. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD;
3. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
4. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
5. Pemberian *reward* bagi wajib pajak berprestasi;
6. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
8. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
9. Penataan kelembagaan OPD pengelola PAD;
10. Peningkatan kompetensi personil OPD pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD;
11. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
12. Penyusunan data base potensi PAD;
13. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
14. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;



15. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

b) Dana Perimbangan :

1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak pusat;
2. Penyusunan regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan;
3. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
5. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.

c) Lain – lain Pendapatan Yang Sah :

1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi;
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
3. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan OPD teknis terkait.

Mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan di atas sekitar 8 %.

Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 tahun adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun antara lain dilatarbelakangi oleh :



- a) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  - b) Perubahan kelas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada objek BHPHTB;
  - c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
  - d) Adanya sinergitas di dalam maupun antar OPD pengelola pendapatan;
  - e) Terlaksananya penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM personil, pemenuhan sarana dan prasarana serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
  - f) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh OPD pengelola PAD;
  - g) Peningkatan pemanfaatan aset dan keuangan daerah;
  - h) Penggalian potensi pendapatan dari BUMD.
- 2) Dana Perimbangan
- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
  - b) Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah
- Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun kedepan dilatarbelakangi oleh :
- a) Adanya penambahan dari dana bagi hasil pajak provinsi yaitu pajak rokok yang mulai dibagikan ke daerah kabupaten/kota pada tahun 2014;
  - b) Adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru PNSD;
  - c) Adanya penambahan jumlah penerimaan guru baru dari penerimaan CPNSD.

### **c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya defisit dan surplus anggaran dalam penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk menutupi anggaran yang mengalami defisit diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah kebijakan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Pengangggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal dibawah 6 (enam) persen dari kebutuhan belanja dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten.
- 2) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan piutang daerah
- 4) Perintisan pelaksanaan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.
- 5) Investasi non permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Proyeksi Pembiayan Daerah sebagaimana tersebut di atas menunjukkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2023-2029;
- b. Kewajiban penyediaan penyertaan modal bagi BUMD;
- c. Defisit anggaran sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi pendapatan, diupayakan dari pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.





### **Proyeksi Belanja Daerah**

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Majalengka periode tahun 2018-2023 memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka 2018-2023.
- 2) Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja.
- 4) Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup.
- 7) Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada awal-awal tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan destinasi pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- 8) Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja.
- 9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya di Kabupaten Majalengka, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 3.11.  
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023

NO.	URAIAN	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
1	Pendapatan	3.323.697.562.203,96	3.365.663.106.509,24	3.714.678.744.318,64	3.769.389.758.280,58	4.111.589.401.519,90
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	25.000.000.000,00	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	42.001.530.108,79	112.262.808.186,62	38.577.051.191,17	84.366.472.611,83	57.853.811.166,66
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>3.365.699.092.312,75</b>	<b>3.477.925.914.695,86</b>	<b>3.753.255.795.509,81</b>	<b>3.878.756.230.892,41</b>	<b>4.169.443.212.686,56</b>
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	1.819.857.336.440,18	1.850.358.049.769,91	1.934.239.577.388,32	2.025.653.341.287,26	2.121.229.159.251,17
5	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	9.177.808.084,60	7.673.094.312,30	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>1.541.841.755.872,57</b>	<b>1.618.390.056.841,35</b>	<b>1.811.343.123.809,20</b>	<b>1.838.102.889.605,15</b>	<b>2.033.214.053.435,39</b>

Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Kabupaten Majalengka yang positif atau surplus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka alokasi dana yang tersedia dan didistribusikan kepada program pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan dikelompokkan kedalam program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Program pelayanan dasar, merupakan program yang terdapat disetiap perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran yang bersifat kesekretariatan.
2. Program regular, merupakan program yang terdapat pada perangkat daerah yang harus dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek lainnya.
3. Program Prioritas Daerah, merupakan program dalam upaya pencapaian IKU kabupaten Majalengka sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD ini.
4. Program Prioritas Perangkat Daerah, merupakan program inovasi disetiap perangkat daerah dan pembiayaannya diprioritaskan dari dukungan sumber pendanaan lainnya di luar APBD Kabupaten Majalengka.

### 3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

#### 3.4.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Majalengka selain bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota.

**Tabel 3.14**  
**Perkembangan Pendanaan APBN (Tugas Pembantuan) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018**

Pagu Dana	Tugas Pembantuan
2014	12.828.964.000,00
2015	18.642.504.000,00



2016	29.095.761.000,00
2017	11.742.500.000,00
2018	17.720.499.400,00

*Sumber : LKPJ Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018*

Data yang termuat pada tabel di atas menggambarkan program/kegiatan Perangkat Daerah yang sumber pendanaannya berasal dari Tugas Pembantuan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup besar di tahun 2016 dan 2017. Pelaksanaan program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Tugas Pembantuan di tahun anggaran 2016 digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun proyeksi pagu dana yang bersumber dari tugas pembantuan hingga 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada tabel 3.15.

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi Pendanaan APBN (Tugas Pembantuan) Kabupaten**  
**Majalengka Tahun 2019-2023**

<b>Pagu Dana</b>	<b>Tugas Pembantuan</b>
2019	16.368.436.399,74
2020	16.246.584.404,90
2021	16.124.732.410,06
2022	16.002.880.415,21
2023	15.881.028.420,37

*Sumber : Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka*





BAB IV  
PERMASALAHAN  
DAN  
ISU STRATEGIS DAERAH

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah: (1) Masih rendahnya kualitas Pendidikan dan kesehatan; (2) Masih tingginya tingkat kemiskinan; (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (4) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (5) Masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public.

Klasifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan urusan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

##### 4.1.1 Urusan Wajib

#### A. Urusan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Bidang Pendidikan

Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Majalengka antara lain:

1. Masih kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat (aksesibilitas sekolah);
2. Tingkat pendidikan masih didominasi oleh pendidikan SD sebesar 49,61%;
3. Kurangnya mutu pendidikan termasuk tenaga kependidikan (kualitas guru) pendidikan SD dan SMP;
4. Pemenuhan rasio Guru dan Murid untuk setiap jenjang pendidikan sebesar 15,03% hal ini perlu disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Mutu) pendidikan;
5. Masih adanya kondisi bangunan sekolah yang kurang baik (rendahnya sarana fisik);
6. Pemenuhan rasio ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah;
7. Kurang terpadu dan efisiennya manajemen pendidikan (rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan).

##### 2. Bidang Kesehatan

Permasalahan utama bidang kesehatan di Kabupaten Majalengka adalah:

1. Masih rendahnya capaian indeks kesehatan dibandingkan dengan capaian indeks kesehatan Propinsi Jawa Barat;





2. Masih belum signifikannya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  3. Masih belum merata serta kurangnya tenaga medis dan tenaga non medis khususnya dokter spesialis;
  4. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi kesehatan lingkungan ibu hamil;
  5. Rendahnya penanganan tingkat pelayanan kesehatan dasar khusus untuk penduduk miskin;
  6. Masih tingginya unmet need sehingga masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB yang berpengaruh terhadap kelahiran;
  7. Masih rendahnya manajemen kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan kesehatan dasar;
  8. Belum adanya Fasilitas Rumah Sakit berstatus Trauma Center dan KIA/Obstetri-Ginekologi;
  9. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit;
  10. Belum adanya Puskesmas modern di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Permasalahan utama Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
1. Kurangnya cakupan infrastruktur yang memadai dan berkualitas terutama pada daerah-daerah yang terpencil;
  2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa;
  3. Masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat; (4) belum optimalnya ketersediaan pengairan;
  4. Masih adanya kekurangan air di sebagian besar wilayah terutama di musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian;
  5. Masih banyak saluran irigasi yang mengalami rusak berat;
  6. Belum ditetapkannya sebagian wilayah kecamatan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan konsistensi tata ruang;
  7. Belum ditetapkannya zonasi dalam rangka pemanfaatan ruang;
  8. Belum adanya regulasi untuk menetapkan rencana induk (masterplan) dari setiap kawasan;
  9. Belum disusunnya penegasan ruang secara substansial untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan;
  10. Belum sinergisnya perencanaan kawasan strategis terutama di wilayah rencana BUIB Kecamatan Kertajati;



11. Inkonsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
12. Adanya alih fungsi lahan pertanian.

#### 4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Rendahnya kualitas perumahan dari aspek sanitasi;
2. Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni;
3. Masih banyaknya backlog penyediaan perumahan bagi masyarakat;
4. Kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Masih tingginya angka kriminalitas dan jumlah demo yang terjadi di masyarakat;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM aparat yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

#### 6. Bidang Sosial

Permasalahan utama Bidang Sosial adalah:

1. Ketidakberimbangan pesatnya perkembangan suatu wilayah dengan kemampuan lokal (SDM, kebijakan daerah yang belum mendukung, berkurangnya modal sosial dan lain sebagainya);
2. Masih terbatasnya penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan penyakit sosial lainnya;
3. Masih tingginya penyandang PMKS;
4. Masih adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dengan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

### B. Urusan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Bidang Ketenagakerjaan

1. Permasalahan utama Bidang Ketenagakerjaan adalah:
2. Masih kecilnya laju penyerapan tenaga kerja;
3. Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja atau minimnya kompetensi dan keterampilan pencari kerja;
4. Belum terpetakannya ketenagakerjaan;
5. Masih rendahnya pemantauan dan perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

#### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:



1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, politik, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat;
  2. Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga;
  3. Belum tuntasnya penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Pangan
- Permasalahan utama bidang pangan adalah:
1. Pertambahan penduduk yang kurang terkendali;
  2. Masih tingginya angka konsumsi beras per kapita;
  3. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
  4. Rendahnya pola keragaman konsumsi pangan masyarakat;
  5. Masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan;
  6. Masih besarnya fluktuasi harga pangan pokok, serta
  7. Masih besarnya proporsi penduduk miskin.
4. Bidang Pertanahan
- Permasalahan utama bidang pertanahan adalah:
1. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat;
  2. Belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain;
  3. Sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
5. Bidang Lingkungan Hidup
- Permasalahan utama bidang lingkungan hidup adalah:
1. Menurunnya luas areal hutan dan meningkatnya luas areal bangunan/pekarangan;
  2. Tingginya degradasi lahan di bagian hilir, erosi dan bencana banjir;
  3. Hilangnya fungsi konservasi kawasan bantaran sungai;
  4. Rusaknya perlindungan terhadap mata air, terancamnya air bersih dan air baku serta daya tampung air untuk pembangunan wilayah;
  5. Berkurangnya sumur-sumur resapan;
  6. Sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan;
  7. Pengelolaan sampah yang belum memadai
  8. Meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta;
  9. Semakin banyaknya kejadian bencana dan bertambah luasnya potensi bencana yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 4.8.



6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Masih belum sempurnanya sistem pendataan dan pengendalian data kependudukan;
2. Masih tingginya tingkat urbanisasi;
3. Belum terintegrasinya data ketenagakerjaan dan data penduduk miskin dalam data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan utama urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

1. Daya saing masyarakat desa yang masih rendah;
2. Kurang begitu diperhatikannya pembangunan di wilayah pedesaan;
3. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi di wilayah desa, baik di bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan lainnya;
4. Distribusi dana pembangunan desa yang kurang begitu optimal;
5. Program pemberdayaan masyarakat desa yang belum tepat guna dan tepat sasaran;
6. Masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam upaya menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk;
2. Tingginya TFR (Total Fertility Rate) atau angka rata-rata seorang ibu memiliki anak;
3. Tingginya pernikahan usia dini dan jumlah perempuan subur;
4. Ada kecenderungan tingginya angka Drop Out akseptor KB dan menurunnya angka peserta aktif KB pada Pasangan Usia Subur (PUS);
5. Masih rendahnya peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
6. Tidak meratanya penyebaran penduduk.

9. Bidang Perhubungan

1. Permasalahan utama urusan perhubungan adalah:

2. Kurang optimalnya pengembangan jaringan trayek;
3. Kurang optimalnya peningkatan fungsi terminal;
4. Belum adanya pembangunan terminal terpadu khususnya dikaitkan dengan MasterplanKebandaraan;
5. Masih kurangnya fasilitas keselamatan transportasi darat atauLalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
6. Masih rendahnya uji kelaikan kendaran bermotor bagi masyarakat.



#### 10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika adalah:

1. Minimnya infrastruktur dan SDM di bidang layanan komunikasi dan informatika;
2. Masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan IPTEK oleh masyarakat;
3. Belum meratanya kualitas layanan komunikasi dan informatika di pedesaan.

#### 11. Bidang Koperasi dan UMKM

Permasalahan utama urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan;
2. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah,
3. Masih sedikitnya fasilitas tata niaga produk UMKM;
4. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa;
5. Masih kurangnya fasilitasi kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha yang berskala besar;
6. Belum tersedianya ruang pameran hasil produksi UMKM;
7. Kualitas produk UMKM yang masih dibawah standar nasional;
8. Masih rendahnya penerapan teknologi dan kurangnya inovasi produk UMKM.

#### 12. Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah:

1. Masih rendahnya promosi potensi investasi daerah;
2. Belum adanya insentif dan disinsentif investasi;
3. Masih kurangnya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah;
4. Masih rendahnya iklim investasi;
5. Belum adanya kawasan industri terpadu;
6. Masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dalam investasi;
7. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung atas penanaman modal.

#### 13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda;
2. Masih kurangnya penggerakan potensi-potensi dan sumber daya kepemudaan dan olahraga yang ada di masyarakat;
3. Masih kurangnya kapasitas pemuda dalam peran serta pembangunan;
4. Masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olahraga.

#### 14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah:



1. Masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbeda-beda pada masing-masing OPD dan BPS;
2. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.

#### 15. Kebudayaan

Permasalahan utama urusan kebudayaan adalah:

1. Masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya;
2. Kurang terpromosikannya budaya lokal;
3. Belum adanya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif;
4. Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
5. Kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah.

#### 16. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, terutama perpustakaan desa;
2. Masih kurangnya sumber daya pengelola perpustakaan;
3. Masih rendahnya manajemen perpustakaan yang profesional;
4. Masih rendahnya minat baca dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
5. Kurang lengkapnya referensi sumber bacaan dan kepustakaan;
6. Belum dilibatkannya perpustakaan daerah dalam aktivitas pengembangan penelitian (research).

#### 17. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah:

1. Masih rendahnya manajemen kearsipan daerah;
2. Masih kurangnya sumber daya pengelola arsip pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Masih kurangnya pembinaan penatakelolaan kearsipan pada setiap OPD dan Kecamatan.

#### 4.1.2 Urusan Pilihan

##### 1. Bidang Pertanian

Permasalahan utama pembangunan bidang pertanian pada umumnya adalah:

1. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian;
2. Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian seperti waduk; kelemahan dalam sistem alih teknologi;
3. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan;
4. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing;



5. Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan seiring dengan perkembangan Kabupaten Majalengka menuju era industrialisasi;
6. Masih kurang sinerginya pembangunan pertanian di sektor on farm, of farm dan of farm hilir sehingga pembangunan pertanian berbasis kawasan susah untuk di wujudkan;
7. Fluktuasi iklim yang tidak bisa di prediksi;
8. Fluktuasi harga akibat produk pertanian yang perishable;
9. Kemampuan SDM petani masih rendah sehingga pola produksi belum berorientasi bisnis.

## 2. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan perikanan adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam budidaya perikanan;
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan;
3. Masih kurangnya akses petani terhadap permodalan;
4. Sistem budidaya ikan masih tradisional;
5. Kurang berfungsinya kelembagaan yang bergerak di sektor perikanan;
6. Belum adanya pengelolaan perikanan yang terintegrasi antara sektor hulu dan hilir. Untuk sektor lain sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 terjadi pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke Pusat.

## 3. Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan kehutanan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk urusan bidang Kehutanan telah terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten ke Provinsi dan Pusat. Untuk pengelolaan hutan raya masih diserahkan ke kabupaten/Kota namun untuk Kabupaten Majalengka saat ini tidak melakukan pengelolaan TAHURA.

## 4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalah utama dalam bidang energi dan sumber daya mineral adalah berkaitan dengan penerbitan izin pemanfaatan panas bumi. Untuk permasalahan lainnya telah dilakukan pelimpahan kewenangan dari Kabupaten ke provinsi dan pusat sebagaimana lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 5. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama di bidang pariwisata adalah:

1. Belum optimalnya penataan objek wisata sebagai sebuah destinasi;
2. Kurangnya integrasi objek wisata dengan komponen pendukung lainnya;
3. Belum adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan objek wisata;





4. Kurangnya promosi objek wisata;
5. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung menuju objek wisata;
6. Kurangnya manajemen pengelolaan kepariwisataan daerah;
7. Tantangan pembangunan pariwisata yang menjadi lokomotif ekonomi daerah;
8. Diperlukan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat lokal.

#### 6. Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah:

1. Masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi karena fasilitas pasar baik pasar pemerintah daerah maupun pasar desa kondisinya kurang memadai;
2. Kesiapan daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana bidang metrology legal (tera, tera ulang dan pengawasan) sebagaimana pelimpahan kewenangan dari Provinsi ke kabupaten;
3. Kurang memadainya kualitas SDM.

#### 7. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama bidang perindustrian adalah:

1. Belum tersedianya kawasan industri;
2. Pemanfaatan bahan baku lokal yang masih rendah;
3. Aksesibilitas permodalan yang terbatas;
4. Inovasi produk masih rendah;
5. Penguasaan teknologi yang masih rendah;
6. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Belum tersedia/terfasilitasinya ruang pameran hasil produksi;
8. Aksesibilitas perbankan masih rendah untuk mendukung industri kecil;
9. Kualitas produk belum memenuhi standar.

#### 8. Transmigrasi

Permasalahan utama urusan transmigrasi adalah:

1. Kurangnya motivasi dan minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana yang menunjang keberhasilan program transmigrasi.

#### 4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena aktual atau hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara berkala. Karakteristik isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka



tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan di atas, maka dapat teridentifikasi sejumlah isu strategis terkait perencanaan pembangunan tahun 2018-2023. Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1. Isu Strategis Internasional

Dalam isu-isu strategis internasional adalah berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;



8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Adapun isu strategis internasional yang lainnya yaitu berkaitan dengan Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA. Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020.

Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina.



Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi.

#### 4.2.2. Isu Strategis Nasional

##### 4.2.2.1. Isu strategis berdasarkan RPJMN 2015-2019

Berdasarkan arah kebijakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda Prioritas pembangunan nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengarustamaan dan Pembangunan lintas bidang
  - 1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
  - 2) Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
  - 3) Pengarusutamaan Gender
  - 4) Pemerataan dan penanggulangan kemiskinan
  - 5) Perubahan iklim
  - 6) Revolusi mental
2. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama
  - 1) Kependudukan dan Keluarga Berencana
  - 2) Kesehatan dan Gizi Masyarakat
  - 3) Pendidikan
  - 4) Perpustakaan
  - 5) Pemuda dan Olahraga
  - 6) Kebudayaan
  - 7) Agama
  - 8) Kesejahteraan Sosial
  - 9) Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 10) Perlindungan Anak
3. Pembangunan bidang ekonomi
  - 1) Perkembangan Ekonomi Makro
  - 2) Reformasi Keuangan Negara
  - 3) Stabilitas Moneter
  - 4) Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif
  - 5) Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan
  - 6) Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN
  - 7) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
  - 8) Peningkatan Pariwisata
  - 9) Peningkatan Ekonomi Kreatif
  - 10) Penguatan Investasi
  - 11) Mendorong Perdagangan Dalam Negeri
  - 12) Peningkatan Daya Saing Ekspor
  - 13) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja
  - 14) Perlindungan Pekerja Migran
  - 15) Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
  - 16) Kerjasama Ekonomi Internasional



- 17) Data dan Informasi Statistik
  
4. Pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 1) Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim
  - 2) Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang
  - 3) Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat
5. Pembangunan bidang politik
  - 1) Politik Dalam Negeri
    - a) Penguatan Peran Lembaga Demokrasi
    - b) Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik
    - c) Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Pulik
    - d) Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan
    - e) Penanggulangan terorisme
  - 2) Politik Luar Negeri
    - a) Penanganan Perbatasan
    - b) Pemantapan peran Indonesia di ASEAN
    - c) Penguatan diplomasi ekonomi
    - d) Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI)
    - e) Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional, dan global
6. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan
  - 1) Alutsista TNI, Almatsus-Polri dan Pemberdayaan Industri Pertahanan
  - 2) Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit
  - 3) Profesionalisme Polri
  - 4) Intelijen dan Kontra Intelijen
  - 5) Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut dan Wilayah Perbatasan Darat
  - 6) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
  - 7) Sistem Keamanan Nasional yang Integratif
7. Pembangunan bidang hukum dan aparatur
  - 1) Sub Bidang Hukum
    - a) Kualitas Penegakan Hukum
    - b) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - c) Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
  - 2) Sub Bidang Aparatur
    - a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel
    - b) Birokrasi yang efektif dan efisien
    - c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



8. Pembangunan bidang wilayah dan tata ruang
  - 1) Informasi Geospasial
  - 2) Tata Ruang
  - 3) Pertanahan
  - 4) Perkotaan
  - 5) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
  - 6) Kawasan Transmigrasi
  - 7) Kawasan Strategis
  - 8) Kawasan Perbatasan
  - 9) Daerah Tertinggal
  - 10) Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
  - 11) Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
  - 12) Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
9. Pembangunan bidang penyediaan sarana dan prasarana
  - 1) Percepatan Pembangunan Perumahan
  - 2) Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan
    - 3) Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional
    - 4) Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
    - 5) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
    - 6) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur
10. Pembangunan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
  - 1) Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan
  - 2) Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani
  - 3) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam
  - 4) Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan
  - 5) Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan
  - 6) Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS
  - 7) Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi
  - 8) Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan
  - 9) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - 10) Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
  - 11) Penanganan Perubahan Iklim Serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan



#### 4.2.2.2. Isu strategis nasional berkaitan dengan pengarusutamaan gender

Pembahasan mengenai pengarusutamaan gender, hal ini sebagaimana instruksi presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan didukung oleh Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang PUG. Maka dalam penejelasan ini akan diuraikan secara runut mengenai pengarusutamaan gender dalam mendukung pola pembagnunan dan rencana pembanguan di Kabuapten Majalengka.

Pembahasan pengarusutamaan gender akan diawali dengan definisi dan pengertian dari pengarusutamaan gender itu sendiri. Definisi pengarusutamaan gender yang sering dikutip adalah berasal dari PBB melalui Economic and Social Council pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah:

“...proses penilaian implikasi dari setiap aksi terencana bagi perempuan maupun lelaki, termasuk perundang-undangan, kebijakan-kebijakan ataupun program-program, di segala bidang dan semua level. (Pengarusutamaan gender) adalah strategi untuk membuat pertimbangan dan pengalaman para perempuan maupun lelaki menjadi dimensi yang integral dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam lingkup politik, ekonomi dan masyarakat sehingga perempuan dan lelaki memperoleh manfaat yang setara dan ketaksetaraan tidak dilanggengkan. Tujuan utama (dari pengarusutamaan gender) adalah mencapai kesetaraan gender.” (UN, 1997)

Dalam level nasional, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9, Tahun 2000 (Inpres No. 9/2000) telah mendefinisikan pengarusutamaan gender, yang diterjemahkan menjadi pengarusutamaan gender atau disingkat PUG, sebagai berikut: “Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional” (Inpres No. 29, Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional).

Sementara itu, bila diartikulasikan lebih jauh, kita dapat menggunakan pemaknaan pengarusutamaan gender atau PUG yang dikedepankan oleh Hubeis (2010) sebagai berikut: “PUG artinya adalah (1) mengarusutamakan perempuan dalam pembangunan yang bermakna memperkuat kelibatan aktif perempuan dalam pembangunan dengan mengaitkan kemampuan dan kontribusinya dengan isu pembangunan makro atau agenda nasional pembangunan, dan (2) kaitan ini menyediakan rasionalitas untuk menyiapkan sumberdaya berskala besar untuk pembangunan yang tidak menyembunyikan atau mengartikulasikan dukungan pada program terkait pada perempuan” (Hubeis, 2010:136).

Jadi, pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi dalam pembangunan yang menghadirkan peran perempuan dalam segala bidang dan dalam semua level untuk memperoleh manfaat pembangunan yang setara bagi perempuan maupun lelaki. Ruang lingkup pengarusutamaan dalam gender mencakup segala kegiatan pembangunan seperti



riset, perencanaan, pengembangan kebijakan, legislasi, advokasi, peningkatan kesadaran, serta pelaksanaan dari segala bentuk komitmen yang telah dicanangkan (Loemban Tobing-Klein, 2009). Pendekatan pengarusutamaan gender ini merupakan pendekatan pembangunan yang terbaru dan menjadi pendekatan utama dalam strategi pencapaian kesetaraan gender (Alston, 2006; Hubeis, 2010). Pendekatan pengarusutamaan gender ini merupakan penyempurnaan atas pendekatan gender dalam pembangunan sebelumnya dan menjadi salah satu cara paling efektif dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan (Loemban Tobing-Klein, 2009; Radoi, 2012). Penyempurnaan ini terdapat dalam strategi memindahkan fokus kebijakan dari keadaan subordinasi kaum perempuan menjadi pengarusutamaan atau pengintegrasian perempuan dan ke dalam semua sektor pembangunan dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keberdayaan (Alston, 2006; Hubeis, 2010).

Dalam membahas pengarusutamaan gender, kita perlu melihat sejarah perkembangan kebijakan gender dari masa ke masa untuk mengkontekstualisasikan mengapa pengarusutamaan gender menjadi suatu pendekatan mutakhir yang diutamakan. Sejarah terbentuknya pendekatan pengarusutamaan gender tidak lepas dari sejarah gender dalam pembangunan secara umum.

Sebagai titik awal pembahasan adalah dicanangkannya tahun 1975 sebagai International Women's Year yang berpuncak pada acara World Conference on Women yang pertama yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun tersebut. Konferensi ini menyepakati komitmen dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menyangkut perbedaan jenis kelamin. Dalam kurun waktu 10 tahun yang disebut sebagai dekade perempuan yang berlangsung selama 1975 hingga 1985 memiliki tujuan utama yaitu kesetaraan, pembangunan dan perdamaian dunia melalui General Assembly PBB mengadopsi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Di akhir dekade perempuan ini diselenggarakan kembali World Conference on Women di Nairobi pada tahun 1985 yang menguatkan manfaat partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan mengakui partisipasi perempuan sebagai penerima manfaat dan agen aktif dalam kebijakan pembangunan serta bahwa keterlibatan perempuan merupakan kunci keberhasilan pembangunan di tingkat nasional maupun internasional (Alston, 2006).

Namun pendekatan pembangunan yang berfokus hanya pada perempuan sendiri ternyata tidak menghasilkan perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, fokus pembangunan dalam segi gender dipindahkan dari perempuan menjadi perempuan-lelaki serta institusi. Pergeseran fokus ini diamanatkan pada tahun 1995 saat diselenggarakan World Conference on Women yang ke-4 di Beijing, dimana dunia secara resmi mengakui pengarusutamaan gender sebagai suatu upaya utama untuk mencapai kesetaraan, pemberdayaan dan perdamaian. Konferensi ini menghasilkan The Beijing Platform of Action atau Deklarasi Beijing sebagai bentuk komitmen nyata yang perlu diterapkan oleh pemerintah, badan nasional, sektor swasta, partai politik, serikat buruh, organisasi

pengusaha, badan subregional dan regional, organisasi non-pemerintah dan internasional dan lembaga pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender, perdamaian serta tujuan-tujuan pembangunan (UN, 1995). Deklarasi Beijing ini meliputi 12 bidang kritis keprihatinan (critical points of concerns) para negara di dunia yang dilengkapi “langkah strategis dan indikatornya, yang mencakup koordinasi pemantauan, evaluasi, dan kemajuan pencapaian program serta kegiatan pemberdayaan perempuan” (Hubeis, 2010:6). Setiap negara melalui Deklarasi Beijing ini telah berkomitmen untuk untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap sektor pembangunan nasional.

Dalam teorisasi pengarusutamaan gender, diskusi diarahkan pada pandangan Walby (1997) dan Rees (1998) tentang tiga perubahan pendekatan kebijakan terkait gender. Ketiga perubahan pendekatan kebijakan tersebut adalah:

1. Kesetaraan/penyesuaian
2. Aksi afirmatif/diskriminasi positif
3. Pengarusutamaan/transformasi dan integrasi

(Alston, 2006; Radoi, 2012; Crespi, 2009)

Pendekatan kesetaraan atau equal treatment dianalogikan oleh Rees (1998) dalam Radoi (2012) sebagai “adjustment” atau penyesuaian, berdasarkan asumsi bahwa perempuan harus diperlakukan setara dalam segala hal. Untuk itu diperlukan penyesuaian dalam kerangka hukum untuk membuat perempuan mendapatkan akses di bidang-bidang yang tidak dapat mereka akses sebelumnya, tanpa menantang norma maskulin yang sudah ada. Alston (2006) berpendapat bahwa pendekatan ini penting dan perlu, namun tidak cukup untuk mencapai kesetaraan. Contoh: perempuan diberi hak dan kewajiban setara dalam segala lini dalam suatu organisasi, namun pada kenyataannya prinsip kesetaraan seperti ini menjadi sesuatu yang merugikan perempuan jika dilihat tugas perempuan di ranah domestik dan rumah tangga serta tanggungjawabnya terhadap organisasi.

Pendekatan kebijakan kedua adalah pendekatan aksi afirmatif atau diskriminasi positif. Jika dalam pendekatan kesetaraan berdasarkan pada persamaan, maka pendekatan aksi afirmatif atau diskriminasi positif berlandaskan pada perbedaan antara perempuan dan lelaki, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh atas kontribusi yang berbeda antara lelaki dan perempuan dalam suatu masyarakat yang tersegregasi (Radoi, 2012). Dalam pendekatan ini, perempuan diharapkan untuk menyesuaikan dalam budaya dan sistem yang dirancang dan didominasi oleh laki-laki (Alston, 2006). Kebijakan aksi afirmatif dalam suatu organisasi misalnya penyediaan tempat penitipan anak, ruangan menyusui, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, dan dalam konteks politik mewajibkan kuota anggota parlemen atau legislatif yang terdiri dari perempuan. Akan tetapi, seperti pendekatan pertama, pendekatan aksi afirmatif ini masih berdasarkan pada lingkungan yang didominasi laki-laki baik itu sistem, bahasa, proses dan budaya yang melihat perempuan sebagai subordinat, sekunder dan tidak diperlukan (Alston, 2006).

Oleh karena kedua pendekatan kebijakan pembangunan sebelumnya belum cukup untuk meraih kesetaraan gender, maka diperlukan suatu pendekatan yang transformatif dan



integratif yang dinamakan pendekatan pengarusutamaan atau mainstreaming. Transformatif dalam hal ini adalah bahwa pendekatan pengarusutamaan mengacu pada transformasi segala norma dan standar yang berkaitan dengan apa yang disebut feminin atau maskulin serta transformasi relasi gender yang sudah ada (Radoi, 2012). Dalam pendekatan ini, sebuah organisasi tidak harus melibatkan diri pada penyesuaian bagi perempuan dalam organisasi tersebut, melainkan membuat organisasi tersebut mengubah atau mentransformasi sistemnya untuk menginkorporasi perempuan (Alston, 2006). Implementasi pendekatan ini adalah sebuah strategi yang mengintegrasikan kesetaraan gender atau mengarusutamakannya, sehingga perspektif gender menjadi sebuah bagian integral dalam semua kebijakan publik. Gender dalam pendekatan ini tidak hanya terpaku pada isu perempuan saja, tetapi integrasi antara isu perempuan maupun lelaki. Karena, seperti pendapat Tripathy (2009:4): "agar pembangunan menjadi benar-benar menghasilkan perubahan yang berarti, isu lelaki harus ditangani tidak hanya sebagai instrumen untuk pemberdayaan perempuan, tetapi sebagai subjek pembangunan juga."

Pendekatan pengarusutamaan melibatkan suatu strategi yang berfokus pada institusi alih-alih pada isu perempuan ataupun lelaki. Dalam pendekatan ini, tujuan suatu departemen atau organisasi dipertanyakan bersama dengan prioritas, strategi, struktur dan prosesnya. Sehingga, sistem diubah arahnya untuk memastikan perempuan dan lelaki mendapatkan akses dan perlakuan setara kepada dan dari institusi atau organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan beberapa mekanisme seperti statistik gender, pemantauan program untuk bias gender, evaluasi program, dan penilaian dampak gender (Alston, 2006).

Walaupun pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan holistik yang transformatif dan integratif sehingga dianggap sebagai suatu pendekatan yang efektif dalam menangani isu pembangunan bidang gender, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum mencapai hasil yang diinginkan yaitu kesetaraan gender. Beberapa contoh kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa proses pengarusutamaan gender masih berupa wacana dan tidak teraplikasikan pada level bawah atau akar rumput.

Dalam analisisnya terhadap kebijakan pengarusutamaan gender di Australia, Alston (2006) mendapatkan bahwa kelemahan pengarusutamaan gender terletak pada kurangnya political will dan pemahaman tentang pengarusutamaan gender oleh mereka yang berkuasa di level tertinggi sehingga kebijakan tersebut tidak tertranslasi pada level bawah. Hubeis (2010:133) berpendapat bahwa pengarusutamaan gender masih pada kerangka konseptual dan belum mencapai pada pemenuhan kebutuhan strategis dan praktis gender. Sementara itu, Beveridge dan Nott (2002) berargumen bahwa dalam level teoritis konsep mainstreaming justru mempertanyakan posisi gender dalam institusi sosial lainnya seperti ras, suku, agama, status ekonomi, usia, (dis)abilitas dan faktor lainnya yang menjadi tantangan dalam ortodoksi liberal dan netralitas hukum.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan pembangunan yang berkaitan dengan gender. Dalam pengarusutamaan gender ditekankan keterlibatan aktif perempuan maupun lelaki dalam pembangunan dan transformasi dari sistem dan institusi yang ditranslasi dalam segala proses kebijakan publik. Pengarusutamaan gender menjadi pendekatan pembangunan perempuan yang terbaru dan dinilai efektif dalam mencapai kesetaraan gender. Meskipun begitu, pada kenyataannya proses implementasi pengarusutamaan gender ini banyak yang belum menghasilkan kemajuan yang berarti disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya political will para penguasa mengenai komitmen dan pengertiannya terhadap pengarusutamaan gender, kebijakan pengarusutamaan gender yang masih konseptual dan belum implementatif, dan teori kesetaraan gender dalam pengarusutamaan gender yang bersinggungan dengan level kesetaraan sosial lainnya. Berdasarkan Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang PUG, disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam hal ini menjadi sangat penting dalam mendukung pola pembangunan di daerah.

#### 4.2.2.3. Isu strategis nasional berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM)

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Adapun mengenai ruang lingkup HAM meliputi:

- a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
- b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
- c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
- d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa,



serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangan berikut:

1. Pancasila

Adapun pemahaman mengenai pancasila dijelaskan bahwa:

- a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa.
- c) Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tida sewenang-wenang terhadap orang lain.
- d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesame.
- e) Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
- f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.

2. Dalam Pembukaan UUD 1945

Menyatakan bahwa " kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan". Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

3. Dalam Batang Tubuh UUD 1945, dijelaskan bahwa:

- a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
- b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- c) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
- d) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)
- e) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)
- f) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)
- g) BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

- a) Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbale balik.
- b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta member I perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.
6. Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI Dalam hal ini dijelaskan bahwa:
  - a) Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi, atau merendahkan martabat orang lain.
  - b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
  - c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights).

Tujuan HAM sangat sederhana adalah untuk selalu menyadari keberadaan, menghormati dan menegakkan HAM serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian diseluruh dunia, khususnya bagi para anggota yang tegabung didalamnya.

Didalam perspektif sejarah, berbagai upaya didalam pemikiran, telaah dan penguangan secara konseptualisasi beserta dan perjuangan untuk mengakui dan menegakkan eksistensi HAM itu sejatinya jauh sebelumnya sudah ada sebelum penguangan secara formal didalam deglarasi itu telah muncul ditengah-tengah masyarakat umat manusia, baik dibarat maupun ditimur, meskipun masih bersifat local dan parsial.

#### A. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia untuk sekarang ini sudah cukup baik. Contohnya saja didaerah Sleman Yogyakarta, Sri Sultan HB X dengan para pengusaha dan pemerintah memberikan bantuan kepada semua masyarkat yogja yang membutuhkan dan yang tertimpa musibah Gunung Merapi. Tiap pengungsi mendapatkan jatah Rp 5 ribu per hari.

Bagi warga yang rumahnya rusak, akan mendapatkan jatah sampai rumah selesai dibangun. Sultan mengungkapkan dana pembangunan selter berasal dari patungan pengusaha. Sedangkan pemerintah membantu pegadaan fasilitas air dan listrik. Mengenai mata pencaharian, Sultan mengimbau warga untuk sementara menebang pohon-pohon bambu. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

- 1) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.





- 2) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- 3) Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.
- 4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.

Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Peran Serta Pemerintah :

1. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2. Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998.
3. Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat perhatian khusus, yaitu dengan ditambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.
4. Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000.
5. Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.

Peran Serta LSM :

Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-hatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarkan pentingnya perhatian thd persoalan HAM.

#### B. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia

Kepres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia yg kemudian diubah dengan Kepres No. 61 Tahun 2003. Merupakan upaya nyata untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada 6(enam) Program Utama RANHAM 2004 – 2009 :

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM,
2. Persiapan ratifikasi instrumen HAM Internasional,
3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia,
5. Penerapan norma dan standar HAM, dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



Aksi HAM tahun 2018-2019 sebagaimana perpres No. 33 tahun 2018 sebagaimana perubahan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang RANHAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan institusi pelaksana RANHAM
2. Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrument internasional HAM
3. Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM
4. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM
5. Penerapan norma dan standar HAM
6. Pelayanan dan komunikasi masyarakat

#### 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maka berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas sumber daya manusia
- 2) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan
- 3) tata ruang
- 4) Konektivitas wilayah dan penataan daerah
- 5) Produktivitas dan daya saing ekonomi



- 6) Tata kelola pemerintahan
- 7) Inovasi dan kolaborasi

#### 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Majalengka

Adapun isu-isu strategis pada kabupaten majalengka adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program penguatan pendidikan karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tataran operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

##### 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di



akreditasi dan sisnya belum terakreditasi. Selain itu Puskesmas di majalengka juga belum ada yang statusnya PPK/BLUD (Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, 2017).

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern. Hal ini dikarenakan Kabupaten Majalengka akan menghadapi perkembangan transportasi yang pesat dengan adanya pembukaan jalan tol dan lapangan bandara Internasional. Lahan yang tersedia untuk fasilitas tersebut sampai sekarang belum ditindaklanjuti untuk pembuatan klinik modern tersebut.

### 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (kawitwangi).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,3 miliar rupiah, yang berasal dari pajak hiburan sebesar Rp. 300.000.000, hotel sebesar Rp 750.000.000 serta retribusi pariwisata sebesar Rp 250.000.000. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Jatitujuh dan Ligung serta sejumlah desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

### 4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana

Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat membagi Pengembangan Wilayah menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan, yang salah satunya adalah WP Ciayumajakuning, dan



Kabupaten Majalengka sebagai Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati.

Pada saat ini Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Masuk ke dalam rencana Kawasan konomi Khusus (KEK) SegitigaEmas Rebana (segitiga pertumbuhan Pelabuhan Patimban Subang, BIJB dan Aerocity Majalengka, dan pelabuhan serta Kawasan Industri Cirebon)

Rebana merupakan akronim dari Cirebon, Panimban, dan Kertajati. Segitiga Emas Rebana adalah buah pemikiran Gubernur Jawa Barat yang melihat potensi di wilayah Timur Jawa Barat. Industri-industri yang sekarang berada di jalur aliran sungai Citarum, rencananya akan dihimbau untuk pindah ke bagian timur Jawa Barat, sekaligus untuk pemerataan pembangunan. Wilayah yang dianggap strategis adalah Subang, Majalengka dan Cirebon. Di Kabupaten Subang terdapat pelabuhan Internasional Patimban yang menjadi proyek nasional, di Kabupaten Majalengka ada Bandara Internasional Kertajati dan Aerocity yang menjadi proyek pemerintah provinsi, dan di Cirebon yang akan didorong untuk menjadi kota Metropolitan. Tiga lokasi tersebut pertumbuhannya akan luar biasa dan menjadi pusat bisnis yang prospektif

#### 5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Majalengka dari Tahun 2010 – 2018 cenderung stabil dibawah 0,5%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 0,50% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi sekitar 0,48%, Akan tetapi dengan pesatnya laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Majalengka pada saat ini, terutama pertumbuhan pada sektor industri dikhawatirkan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka pada masa yang mendatang. Hal itu berpotensi menyebabkan berbagai masalah kependudukan, antara lain meningkatnya jumlah penduduk miskin maupun permasalahan sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk tersebut terjadi akibat tingkat kelahiran dan migrasi. Tingkat kelahiran dapat dikendalikan dengan program KB, sementara migrasi dapat dibatasi dengan regulasi pemerintah. Sementara itu penyebab meningkatnya angka kelahiran pun dapat disebabkan karena tingginya pernikahan usia dini dan jumlah perempuan subur. Kondisi ini mendorong tingkat kehamilan dan melahirkan yang akan terus bertambah, terlebih jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan penerapan alat KB pada semua Pasangan Usia Subur.

Upaya pengendalian penduduk dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya berbagai masalah kependudukan, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan penduduk semestinya diiringijuga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar permasalahan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka dapat diantisipasi seoptimal mungkin.

#### 6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR

Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang adalah hal strategis yang akan memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosio-ekonomi, sosio-kultural maupun sosio-ekologis (lingkungan) masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi RTRW Kabupaten Majalengka, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tata ruang seperti validitas dan ketersediaan data yang masih terbatas, adanya kebijakan baru baik di tingkat nasional maupun provinsi yang belum termuat di dalam RTRW Kabupaten Majalengka, pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang dalam indikasi program belum sepenuhnya terealisasi, adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengandinamika pembangunan yang terjadi di lapangan dan juga inkonsistensi antara peraturan daerah dengan peta rencana pola ruang. Wilayah Segitiga Emas Perekonomian Patimban – Kertajati – Cirebon (Segitiga Rebana)

#### 7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi Area Airport seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan dataBPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Terkait masalah lingkungan, Kepala Departemen perencanaan Produk dan Kemitraan PT. BIJB memprediksikan bahwa sampah yang dihasilkan di tiga tahun pertama BIJB beroperasi yakni 1,5 ton perhari. Sementara untuk dampak dari pencemaran limbah dan sampah BIJB, diakui telah disiapkan oleh pihak BIJB sesuai aturan bahwa tidak boleh ada sampah ataupun limbah yang dibuang atau dibawa keluar dari kawasan bandara. Permasalahan lainnya terkait lingkungan adalah ketersediaan air bersih dan air baku yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Perlu dipersiapkan langkah antisipatif, terutama ketika kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati sudah mulai beroperasi.

#### 8. Kemandirian Desa

Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikankontribusi besar terhadapcapaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektorpembangunan. Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,



tetapi lebih dari itu yaitu menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.





BAB V  
VISI, MISI, TUJUAN  
DAN  
SASARAN



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat yang partisipatif serta kompetitif dalam berbagai bidang, sebagaimana visi yang hendak dicapai pada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahap ke-4 tentunya harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron dan konsisten. Perumusan visi untuk RPJMD 2018-2023 ini selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, juga memperhatikan visi yang tertera pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Visi RPJPD Kabupaten Majalengka, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat

<b>RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025</b>	<b>Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024</b>	<b>RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b>
Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa.	Indonesia yang Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi

Selain mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, perumusan visi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 pun hendaknya memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini penting untuk menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Perbandingan visi antara RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Majalengka dan disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2.  
Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kab. Majalengka

Visi Pembangunan		
Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023	RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
Indonesia yang Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan	"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "	<b>Mewujudkan Tatanan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>
	<p><b>Jabar Juara Lahir Batin:</b> pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.</p> <p><b>Inovasi:</b> pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b>Kolaborasi:</b> perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.</p>	<p><b>Religius:</b> Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;</p> <p><b>Adil:</b> Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tenang, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial;</p> <p><b>Harmonis:</b> Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan;</p> <p><b>Sejahtera:</b> Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.</p>

## 5.2 Misi

Perumusan misi yang tepat merupakan faktor penentu dari tercapainya visi yang akan dicapai dalam suatu periode pemerintahan. Misi yang baik adalah misi yang mampu menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai visi secara jelas, ringkas dan mudah dipahami. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

▪ **Misi Pertama:**

Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama;

▪ **Misi Kedua:**

Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;

▪ **Misi Ketiga:**

Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya;

▪ **Misi Keempat:**

Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

▪ **Misi Kelima:**

Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Penetapan lima misi pembangunan di atas selain sejalan untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka, juga sejalan dengan penetapan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penetapan misi pembangunan Kabupaten Majalengka selain sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Majalengka juga bertujuan mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sinergitas antara misi pembangunan Kabupaten Majalengka dengan misi pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.3. di bawah ini:

Tabel 5.3.  
Misi pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kab. Majalengka

<b>Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah</b>		
<b>RPJMN 2015-2019</b>	<b>RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023</b>	<b>RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023</b>
1. Mewujudkan keamanan nasional	1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa	1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang



<b>Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah</b>		
<b>RPJMN 2015-2019</b>	<b>RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023</b>	<b>RPJMD Kab. Majalengka 2018-2023</b>
<p>yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.</p> <p>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.</p> <p>3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</p> <p>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</p>	<p>Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.</p> <p>2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.</p> <p>3. Mempercepat pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.</p> <p>4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.</p> <p>5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	<p>didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</p> <p>2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</p> <p>3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</p> <p>4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</p> <p>5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</p>



### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, diuraikan berdasarkan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel 5.4. di bawah ini.

Tabel 5.4.  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Majalengka

#### **VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama
Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor Pengurangan Tingkat Kemiskinan
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN
Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas,	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
		Meningkatnya kesejahteraan petani
		Meningkatnya kunjungan wisata



MISI	TUJUAN	SASARAN
profesional, humanis, dan melayani		Meningkatnya Investasi sektor Industri Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa
Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tentunya mengacu pada RPJPD Kab. Majalengka Tahun 2005-2025, RTRW Kab. Majalengka, RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Adapun kerangka perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan komparasi antar dokumen perencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.

Komparasi tujuan dan sasaran antar dokumen perencanaan yang terkait

Dokumen Perencanaan	Tujuan	Sasaran
<b>RPJMN 2015-2019</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sasaran Makro;</li> <li>Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;</li> <li>Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;</li> <li>Sasaran Dimensi Pemerataan;</li> <li>Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;</li> <li>Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.</li> </ol>	
<b>RPJMD Provinsi Jabar 2018- 2023</b>	<b>Misi Pertama: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban</b>	
	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, Berkebangsaan dan berkeadilan sosial	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
	<b>Misi Kedua: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif</b>	





<b>Dokumen Perencanaan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
	1. Meningkatkan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan Memperluas kesempatan pemenuhan kebutuhan dasar 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam 6. Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
	2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan local dan seni budaya daerah	1. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal 2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial
<b>Misi Ketiga:</b> <b>Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah</b>		
	1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang Mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok 2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian 3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan
	2. Meningkatkan daya dukung dan daya Tampung lingkungan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik



Dokumen Perencanaan	Tujuan	Sasaran
		3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
	<b>Misi Keempat:</b> <b>Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan</b>	
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan</li> <li>2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif</li> <li>3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat</li> <li>4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi</li> </ol>
	<b>Misi Kelima:</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	
	Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan <i>smart</i>, bersih dan akuntabel</li> <li>2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif</li> </ol>
<b>RPJMD KABUPATEN MAJALENGKA 2018-2023</b>	<b>VISI:</b> <b>Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>	
	<b>Misi pertama:</b> <b>Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>	
	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama



Dokumen Perencanaan	Tujuan	Sasaran
<p><b>Misi Kedua :</b>  <b>Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b></p>		
	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor</li> <li>2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan</li> </ol>
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
<p><b>Misi ketiga:</b>  <b>Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b></p>		
	Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja</li> <li>2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> <li>4. Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN</li> </ol>
<p><b>Misi keempat:</b>  <b>Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b></p>		
	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Mutu pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</li> <li>4. Meningkatnya kesejahteraan petani</li> <li>5. Meningkatnya kunjungan wisata</li> <li>6. Meningkatnya Investasi sektor Industri</li> <li>7. Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa</li> </ol>



Dokumen Perencanaan	Tujuan	Sasaran
	<b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>	
	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 5.6**  
**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR				
				2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023		
<b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>													
<b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>													
1.1.	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat		1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5	5
		1.1.1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5
<b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>													
2.1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor		1	Indeks Gini	poin	0,351	0,337	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328
			2	Angka Kemiskinan	persen	12,6	10,79	10,48	9,92	9,675	9,09	8,48	8,48
		2.1.1.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1	Indeks Gini	poin	0,351	0,35	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328
		2.1.2.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2	Angka Kemiskinan	persen	12,6	10,79	10,48	10,08	9,68	9,09	8,48
2.2.	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat		1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10	10
		2.2.1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10
<b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>													
3.1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik		1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	88,25	88,25	88,50	89,00	89,50	89,80	90,00	90,00
		3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1	Nlai SAKIP	nilai	CC	B	BB	A	A	A	A
		3.1.2.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1	Opini BPK RI	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3.1.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	B	B	B	B	B	B	B
		3.1.4.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN	poin	88,25	88,25	88,50	89,00	89,50	89,80	90,00



VISI/MISI/TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				2	Persentas Besar Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	0	0	30	40	45	45	50	50
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b>														
4.1.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing			1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	65,92	66,72	67,19	67,58	67,95	68,285	68,84	68,84
		4.1.1.	Meningkatnya Mutu pendidikan	1	Indeks Pengetahuan	poin	56,83	56,89	58,03	58,84	59,55	60,23	61,19	61,19
		4.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	poin	75,98	76,43	76,53	76,75	77,04	77,26	77,54	77,54
		4.1.3.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase Rumah tangga yang megakses sanitasi baik	persen	05.16	80,37	80,52	80,67	80,98	81,31	81,65	81,65
		4.1.4.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani	persen	n/a	99,67	100,49	101,31	102,12	102,94	103,76	103,76
		4.1.5.	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	200.000	515.391	15.000	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4.1.6.	Meningkatnya Investasi sektor Industri	1	Jumlah industri baru	unit	3	4	5	5	5	5	5	5
		4.1.7.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1	Jumlah desa tematik	desa	0	0	26	26	26	26	26	26
<b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>														
5.1.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa			1	Indeks Desa Membangun	poin	N/A	0,647	0,657	0,671	0,686	0,698	0,710	0,710
		5.1.1.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	N/A	109	36	51	52	41	41	41



#### **5.4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023**

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan janji-janji kampanye bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023, meliputi:

1. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama.
2. Peningkatan akses, kualitas pendidikan, pengelolaan dan layanan sekolah, dan peningkatan layanan kesehatan, obat-obatan, cakupan layanan kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik.
3. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong sektor unggulan
4. Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB.
5. Perlindungan sosial dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk dan RTS miskin.
6. Pengembangan Desa tematik dan peningkatan tingkat kemandirian desa.

Prioritas Pembangunan ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini.



The logo of the Government of West Kalimantan is a shield-shaped emblem. At the top, a crescent moon is flanked by a rice stalk on the left and a chain of flowers on the right. Below the moon is a five-pointed star. The central part of the shield features a stylized building with a central tower and two side wings. Below the building are wavy lines representing water. At the bottom, a banner contains the motto "SINDANGKASIA SUGIH MUKTI".

**BAB VI**  
**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN**  
**DAN**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

#### 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah "terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif." Fokus ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPDP. Hal ini disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1  
Posisi RPJMD Kabupaten Mjalengka Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

Apabila mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, terdapat beberapa hal yang ditekankan dalam penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1.  
Kerangka perumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025

Misi RPJPD	Bidang Pembangunan	Penekanan pada Strategi & Arah Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).	Pendidikan, kesehatan, keagamaan, Kependudukan, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Sosial dan IPTEK.	Perlu adanya penekanan pada daya saing dan kemampuan/skillSDM masyarakat Kabupaten Majalengka dalam berbagai aspek. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Majalengka saat ini menuntut adaptasi masyarakat lokal sehingga mampu terserap di sektor industri dan berdaya secara sosial-ekonomi.



Misi RPJPD	Bidang Pembangunan	Penekanan pada Strategi & Arah Kebijakan
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.	Pertanian, Pangan, Industri, UMKM, Penanaman Modal, Perdagangan, dan Pariwisata.	Dibutuhkan penekanan pada peningkatan kontribusi sektoral yang menjadi potensi unggulan daerah Kabupaten Majalengka di masa mendatang, seperti industri olahan dan jasa.
3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan..	Transportasi, irigasi, Air Minum, Energi dan Telekomunikasi, Perumahan Rakyat, Persampahan, dan Tata Ruang.	Perlu adanya penekanan pada aspek inklusifitas dan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Aparatur Pemerintah, Hukum, dan Politik	Perlu adanya penekanan pada peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Perlu ditekankan bentuk peran aktif yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2.  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA			
Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama			
1.1. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1.1.1. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1.1.1.1. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama	1. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama
Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat			
2.1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	2.1.1. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	2.1.1.1. Akselerasi pembangunan berbasis sektor unggulan dan spasial	1. Mengurangi disparitas/ kesenjangan antar Wilayah
	2.1.2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2.1.1.2. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin	1. Mengurangi kesenjangan antar sektor
2.2. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	2.2.1. Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	2.2.1.1. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya			
3.1. Mewujudkan tatakelola pemeritahan yang baik	3.1.1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja	3.1.1.1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	3.1.2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan	3.1.2.1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.3.1. Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik
	3.1.4. Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	3.1.4.1. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani	1. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode prilaku ASN
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah			
	3.1.4.2. Meningkatkan Besaran Tunjangan Kinerja Aparatur	1. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</p>			
<p>4.1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing</p>	<p>4.1.1. Meningkatnya Mutu pendidikan</p>	<p>4.1.1.1. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan HLS</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal</p> <p>4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan</p>
	<p>4.1.2. Meningkatnya DerajatKesehatan Masyarakat</p>	<p>4.1.2.1. Menurunkan AKI dan AKB</p>	<p>1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)</p>
		<p>4.1.2.2. Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia</p>	<p>1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan</p>
	<p>4.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</p>	<p>1.1.3.1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh</p>
			<p>2. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh</p>





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4.1.4. Meningkatnya kesejahteraan petani	4.1.4.1. Peningkatan pendapatan petani	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian
	4.1.5. Meningkatnya kunjungan wisata	4.1.5.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	1. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata
	4.1.6. Meningkatnya Investasi sektor Industri	4.1.6.1. Penguatan Regulasi Investasi	1. Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi
	4.1.7. Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	4.1.7.1. Mengembangkan potensi unggulan desa	1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi
			2. Mewujudkan Desa Wisata
4.1.7.2. Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan	1. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan		
Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan			
5.1. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	5.1.1. Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	5.1.1.1. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa	1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa
			2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa
			3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan fokus pembangunan yang akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pencapaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan pada RPJMD untuk setiap tahunnya.

Penetapan fokus RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif. Untuk mewujudkan fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka, maka fokus pembangunan lima tahunan Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 adalah:

1. Tahapan Pemetaan Sumber Daya Pembangunan, baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, serta penyusunan pirantilunak berupa dokumen-dokumen perencanaan, e-government, dan produk-produk hukum yang bersifat mengatur;
2. Tahapan Penataan Sumber Daya Pembangunan;
3. Tahapan Aktualisasi kerangka kebijakan dan program-program unggulan yang mengungkit daya saing daerah dengan didukung aparatur yang profesional, inovatif dan kreatif;
4. Tahapan evaluasi ungkitan program-program unggulan termasuk evaluasi dan penyempurnaan piranti-piranti lunak;
5. Tahapan akselerasi pencapaian target-target pembangunan.



Gambar 6.2.  
Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Majalengka



## 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023. Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah :

1. Matra keruangan dari pembangunan daerah;
2. Adanya Rencana Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati;
3. Dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
5. Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
6. Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci;
7. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melaluisasaran :

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung
3. dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
4. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
5. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang ; dan
6. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka diuraikan sebagai berikut :

a. Pusat Kegiatan Perkotaan :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kondisi ini terjadi di Perkotaan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya. Ruang wilayah yang termasuk dalam PKW Kadipaten adalah Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PKL adalah Perkotaan Majalengka, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh, Cikijing dan Talaga.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan. Adapun wilayah yang mempunyai fungsi sebagai PPK adalah Perkotaan Kasokandel, Leuwimunding, Palasah, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Sindangwangi, Sukahaji, Lemahsugih, Bantarujeg, Maja, Argapura dan Banjaran.

b. Pusat Kegiatan Perdesaan :

Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdiri dari PPL Sindang, PPL Cingambul, dan PPL Malausma.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan beserta fungsinya di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 6.3.  
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan  
Kabupaten Majalengka

No.	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi Pelayanan
A.	Pusat Kegiatan Perkotaan		
1.	Pusat Kegiatan Wilayah		
	a. PKW Kadipaten	Kadipaten, Dawuan	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, serta pendukung kegiatan industri.
2.	Pusat Kegiatan Lokal		
	a. Perkotaan Majalengka	Majalengka, Cigasong, Panyingkiran	Sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	b. Perkotaan Kertajati	Kertajati, Jatitujuh, Ligung	Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BIJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.
	c. Perkotaan Jatiwangi	Jatiwangi, Kasokandel, Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan dan pertanian.
	d. Perkotaan Rajagaluh	Rajagaluh, Sukahaji, Sindang, Sindangwangi	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.
	e. Perkotaan Cikijing	Cikijing, Cingambul, Banjaran, Argapura	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional dan industri kecil.



No.	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi Pelayanan
	f. Perkotaan Talaga	Talaga, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan		
	a. Perkotaan Kasokandel	Kasokandel	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan dan pertanian.
	b. Perkotaan Leuwimunding	Leuwimunding	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, industri dan pendukung kawasan perumahan.
	c. Perkotaan Palasah	Palasah	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri, pendukung kawasan perumahan dan pertanian.
	c. Perkotaan Jatitujuh	Jatitujuh	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri, pendukung komersial dan pertanian.
	e. Perkotaan Ligung	Ligung	Sebagai kawasan pertahanan keamanan, pengembangan industri, pelayanan sosial dan pertanian.
	f. Perkotaan Sumberjaya	Sumberjaya	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan, pelayanan sosial dan pertanian.
	g. Perkotaan Sindangwangi	Sindangwangi	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	h. Perkotaan Sukahaji	Sukahaji	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan.
	i. Perkotaan Lemahsugih	Lemahsugih	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), serta pengembangan pariwisata.
	j. Perkotaan Bantarujeg	Bantarujeg	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata.
	k. Perkotaan Maja	Maja	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata dan terminal regional.
	l. Perkotaan Argapura	Argapura	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan



No.	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi Pelayanan
			peternakan), dan pengembangan pariwisata.
	m. Perkotaan Banjaran	Banjaran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata.
B.	Pusat Kegiatan Perdesaan		
1.	Pusat Pelayanan Lingkungan		
	a. PPL Sindang	Sindang	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan.
	b. PPL Malausma	Malausma	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan.
	c. PPL Cingambul	Cingambul	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil.

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011 – 2031.

Perwujudan pusat kegiatan di Kabupaten Majalengka, terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat kegiatan wilayah, meliputi :
  1. Penyediaan rumah sakit tipe B;
  2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
  3. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi;
  4. Penyediaan kawasan olah raga;
  5. Penyediaan mesjid wilayah; dan
  6. Penyediaan taman wilayah.
- b. Perwujudan pusat kegiatan lokal, meliputi :
  1. Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa;
  2. Pengembangan kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten;
  3. Peningkatan rumah sakit tipe c menjadi rumah sakit tipe b;
  4. Penyediaan rumah sakit tipe c
  5. Pengembangan mesjid kabupaten;
  6. Pengembangan pendidikan skala kabupaten;
  7. Pengembangan taman kabupaten; dan
  8. Pengembangan stadion olah raga kabupaten.





c. Perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi :

1. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan
2. Penyediaan puskesmas.

d. Perwujudan pusat pelayanan lokal.

1. Penyediaan pasar desa; dan
2. Penyediaan puskesmas pembantu.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Majalengka, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 mengarahkan :

1. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
2. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.

Pada tahun 2018-2023 Kabupaten Majalengka menetapkan Arah Kebijakan Tematik Spasial, yaitu:

1. Kecamatan Majalengka, dan hinterlandnya (cigasong dan panyingkiran) dioptimalkan sebagai pusat pemerintahah, perumahan permukiman dan jasa perdagangan.
2. Bagian Utara dikendalikan melalui: (1) Peningkatan infrastruktur sekitar Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, (2) Pengendalian penduduk, (3) Pengendalian pemanfaatan ruang industry, (4) Pembangunan Jalan lingkak BIJB.
3. Bagian Barat didorong melalui, (1) Pengembangan PKW Kadipaten, (2) Konektivitas antar pusat pertumbuhan, (3) Peningkatan jalan lokal, (4) Pembangunan jalan akses TPAS Heuleut, dan (4) Optimalisasi TPAS Heuleut.
4. Bagian Timur dikembangkan melalui: (1) Pengembangan kawitwangi dan destinasi wisata argapura, (2) Pengembangan unggulan pariwisata dan pertanian, (3) Pembangunan destinasi wisata Panyaweuyan, dan (4) Peningkatan jalan lintas timur.



5. Bagian Selatan ditingkatkan melalui: (1) Pengembangan kawasan perdesaan Malausma dan agropolitan Lemahsugih, (2) Pengurangan ketimpangan wilayah, (3) Peningkatan jalan lintas selatan, (4) Pembangunan (RSUD) Talaga, (5) Pembangunan pasar Pemda di Malausma, dan (6) Pembangunan TPAS Cingambul.

### **6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Majalengka juga merupakan bentuk pelaksanaan dari janji-janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang diwujudkan melalui program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Berikut ini diuraikan prioritas pembangunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka, meliputi:

1. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama.
2. Peningkatan akses, kualitas pendidikan, pengelolaan dan layanan sekolah, dan peningkatan layanan kesehatan, obat-obatan, cakupan layanan kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik.
3. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong sektor unggulan.
4. Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB.
5. Perlindungan sosial dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk dan RTS miskin.
6. Pengembangan Desa tematik dan peningkatan tingkat kemandirian desa.

Dengan mempertimbangkan pencapaian program prioritas bupati dan wakil bupati sebagai janji kepada masyarakat, maka ditetapkan program pembangunan daerah



Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel 6.4. di bawah ini.



**TABEL 6.4.**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET			
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
<b>VISI : Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA</b>													
<b>Misi 1 : Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama</b>													
<b>TUJUAN</b>													
1.1.	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5	5	
<b>SASARAN</b>													
1.1.1.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5	5	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Peningkatan Nilai-nilai keagamaan												
		1.	Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif	persen	16,00	16,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	Sosmas
		2.	Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi	Persen	31,00	31,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	Sosmas
		3.	Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi	persen	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	Sosmas
		4.	Persentase tokoh agama yang terfasilitasi	persen	32,00	32,00	42,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	Sosmas
<b>Misi 2 : Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat</b>													
<b>TUJUAN</b>													
2.1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	1.	Indeks Gini	poin	0,351	0,337	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328	



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET				
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
		2.	Angka Kemiskinan	persen	12,600	10,790	10,48	10,08	9,68	9,09	8,48	8,48		
<b>SASARAN</b>														
2.1.1.	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1.	Indeks Gini	poin	0,351	0,350	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328		
<b>PROGRAM</b>														
1.	Program Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.	Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan	persen	-	4,74	6,24	7,04	9,04	10,54	11,74	11,74	Dinas BMCK	
2.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan												Dinas BMCK	
		1.	Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun	unit	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	Dinkes	
		2.	Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun	unit	1,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	9,00	Dinkes	
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan	1.	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	unit	44,00	44,00	2,00	4,00	5,00	5,00	4,00	64,00	Dinas Perdagangan	
4.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.	Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan	persen	65,00	65,00	68,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dishub	
5.	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah												Dinas LH	
		1.	Cakupan Pelayanan Persampahan	persen	1,83	1,83	1,91	1,91	1,99	2,07	2,15	2,15	Dinas LH	
		2.	Cakupan Pelayanan penanganan limbah	persen	0,17	0,17	3,67	7,17	10,67	16,66	16,66	16,66	16,66	Dinas LH
6.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	1.	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	unit	n/a	n/a	82	82	79	80	82	81	Diskominfo	



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
7.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Bersih	1.	Cakupan pelayanan Air Bersih	persen	76,73	80,16	0,00	80,67	80,98	81,31	81,65	81,65	Dinas PPSDA
<b>SASARAN</b>													
2.2.2	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	1.	Angka Kemiskinan	persen	13	11	10,48	9,92	9,675	9,09	8,48	8,48	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	1.	Persentase masyarakat miskin yang dimonev	persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
2.	Program Jaminan Sosial												Dinsos
		1.	Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial	Rumah Tangga	3563,00	4213,00	301,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	Dinsos
		2.	Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"	orang	0,00	0,00	200,00	500,00	670,00	840,00	1010,00	1010,00	Dinsos
3.	Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin	1.	Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri	Kube	112,00	112,00	8,00	128,00	128,00	128,00	128,00	422,00	Dinsos
4.	Program peningkatan produktivitas masyarakat miskin	1.	Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	RTS	n/a	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00	Disnakerin
5.	Program Peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin	1.	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin	unit	0,00	0,00	0,00	150	150	150	150	600,00	Dinas PPSDA
6.	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin	1.	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	KK	n/a	n/a	550,00	600,00	675,00	700,00	725,00	3250,00	Dinas P3AKB
7.	Program Pemberdayaan Petani Miskin	1.	Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	N/A	N/A	150,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1250,00	Distankan



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET		
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET			
8.	Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin	1.	Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin	Persen	n/a	45,46	44,22	41,73	37,90	35,48	32,74	32,74	Disdik	
9.	Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	1.	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	keluarga	n/a	n/a	74140,00	75140,00	76140,00	77140,00	78140,00	78140,00	Dinkes	
10.	Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Keluarga Miskin	1.	Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin	persen	N/A	N/A	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas KUMKM	
11.	Program Penanggulangan Kemiskinan	1.	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	persen	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kecamatan	
<b>TUJUAN</b>														
1.	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	1.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10	10	10	
<b>SASARAN</b>														
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10	10	10	
<b>PROGRAM</b>														
1.	Pembinaan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Satpol PP
2.	Program Pencegahan Potensi Gangguan Kamtibmas	1.	Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00	Kesbangpol



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
3.	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum	1.	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum skala kecamatan	kali	n/a	n/a	n/a	26	26	26	26	26	Kecamatan
<b>Misi 3 : Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya</b>													
<b>TUJUAN</b>													
3.1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	88	88	89	89	90	90	90	90	
<b>SASARAN</b>													
3.1.1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1.	Nlai SAKIP	nilai	CC	B	BB	A	A	A	A	A	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan												
		1.	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	persen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
		2.	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda





MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET		
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET			
		3.	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan	1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A	persen	0	0	5	25	50	70	80	80	Inspektorat
3,	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.	Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi	aplikasi	0	0	2	11	5	6	4	26	Diskominfo
<b>SASARAN</b>													
3.1.2.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan	1.	Opini BPK RI	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.	Opini BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
2.	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	BKAD
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan	1.	Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti	persen	0	60	75	80	85	90	100	100	Inspektorat
<b>SASARAN</b>													
3.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	IKM	poin	B	B	B	B	B	B	B	B	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Peningkatan sarana dan prasarana layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	1.	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	buah	n/a	n/a	154	159	154	157	145	615	Diskominfo



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
2.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	71	77	79	82	84	85	88	8830	Disdukcapil
3.	Program Reformasi Birokrasi Perizinan	1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	nilai	80	80	81	83	85	88	91	91	DPMPTSP
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Majalengka	1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka	nilai	N/A	78	79	80	81	82	83	83	RSUD Majalengka
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Cideres	1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres	nilai	N/A	72	74	75	76	78	81	81	RSUD Cideres
<b>SASARAN</b>													
3.1.4.	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejhteraan ASN	1.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	88	88	89	89	90	90	90	90	
		2.	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	-	-	30,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	BKPSDM
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program pembinaan dan penegakan disiplin ASN	1.	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
		2.	Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%	persen	93,00	93,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	BKPSDM
		3.	Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%	persen	90,00	90,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	BKPSDM
2.	Program peningkatan kompetensi Manajerial ASN	1.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	persen	62,24	71,10	71,10	71,66	77,66	83,79	90,02	90,02	BKPSDM



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
3.	Program pengembangan karier ASN	1.	Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
4.	Program pengelolaan gaji dan kesejahteraan aparatur	1.	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	-	-	30,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	BKPSDM
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani</b>													
<b>TUJUAN</b>													
3.2.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	1.	Indeks Pembangunan Manusia	poin	66	67	67,19	67,58	67,95	68,285	68,84	68,84	
<b>SASARAN</b>													
3.2.1.	Meningkatnya Mutu pendidikan	1.	Indeks Pengetahuan	poin	57	57	58,03	58,84	59,55	60,23	61,19	61,19	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Pendidikan Sekolah Dasar	1.	APK SD/MI	persen	103,90	104,30	104,60	104,90	105,30	105,60	105,90	105,90	Disdik
2.	Program Pendidikan SMP	1.	APK SMP/MTs	persen	99,92	99,92	99,92	101,20	101,60	101,70	101,90	101,90	Disdik
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal												
		1.	APK PAUD	persen	63,91	64,79	65,02	65,49	66,04	66,64	66,9	66,9	Disdik
		2.	Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C	persen	24,11	37,43	37,98	38,53	39,08	39,63	40,18	40,18	Disdik
		3.	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	lembaga	5	2	3	5	6	8	9	9	Disdik



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET			
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
4.	Penguatan Tata Kelola Pendidikan												
		1.	Terpenuhinya Ruang Guru	persen	97,025	93,49	93,75	93,875	93,875	93,875	93,875	93,88	Disdik
		2.	Terpenuhinya Ruang Kelas	persen	82,325	81,715	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	Disdik
		3.	Terpenuhinya Ruang Laboratorium	persen	31,73	30,84	32	32	32	32	32	32	Disdik
<b>SASARAN</b>													
3.2.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Indeks Kesehatan	poin	76	76	76,53	76,75	77,04	77,26	77,54	77,54	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Pelayanan Kesehatan	1.	Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar	persen	75,51	78,65	80,00	82,00	85,00	90,00	90,00	90,00	Dinkes
		2.	Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda	persen	27,27	30,30	39,39	63,64	63,64	90,91	100,00	100,00	Dinkes
2.	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1.	Terpenuhinya SPM Kesehatan poin 1-5, 7	persen	0	0	100	100	100	100	100	100	Dinkes
<b>SASARAN</b>													
3.2.3.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	80	80	81	81	81	81	82	82	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Pemenuhan utilitas sanitasi	1.	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	61,25	68,36	0	69,02	69,38	69,75	70,12	70,12	Dinas PPSDA
2.	Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh	1.	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh	unit	0	0	0	535	535	535	642	2247	Dinas LH



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
<b>SASARAN</b>													
3.2.4.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani	persen	n/a	100	100	101	102	103	104	104	Distankan
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.	Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)	Persen	37.705,00	31.981,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
		2.	Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)	Persen	12.452,00	13.053,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.	Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)	Persen	151.646,00	117.598,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	10,00	Distankan
<b>SASARAN</b>													
3.2.5.	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	200.000	515.391	15.000	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Disparbud
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program pembangunan dan Pengembangan destinasi wisata layak kunjung	1.	Jumlah destinasi wisata layak kunjung	unit	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	8,00	Disparbud
2.	Program Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif	1.	Jumlah Kunjungan Event	orang	N/A	N/A	5.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	215.000,00	Disparbud
		2.	Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya	unit	N/A	N/A	12,00	11,00	11,00	11,00	45,00	3,00	Disparbud
		3.	Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner	unit	N/A	N/A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	3,00	Disparbud
<b>SASARAN</b>													
3.2.6.	Meningkatnya Investasi sektor Industri	1	Jumlah industri baru	unit	3	4	5	5	5	5	5	5	
<b>PROGRAM</b>													



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1.	Program Percepatan Investasi Daerah	1.	Nilai Realisasi Investasi	milyar	629,364 M	1,288 T	362,00	380,00	399,00	419,00	440,00	2.000,00	DPMPTSP
2.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persen	9,34	2,64	n/a	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	Disnakerin
<b>SASARAN</b>													
3.2.7.	Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	1	Jumlah desa tematik	desa	-	-	26	26	26	26	26	26	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Pengembangan Desa Pangan	1.	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	desa	0	18	4	4	4	4	4	38	Dinas Pangan
2.	Program Pengembangan Desa Wisata	1.	Jumlah Desa Wisata	desa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Disparbud
3.	Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	1.	Jumlah potensi unggulan kecamatan	jenis	n/a	n/a	n/a	52	52	78	78	78	Kecamatan
<b>Misi 5 : Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>													
<b>TUJUAN</b>													
5.1.	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	1	Indeks Desa Membangun	poin	N/A	0,647	0,657	0,671	0,686	0,698	0,710	0,710	
<b>SASARAN</b>													
5.1.1.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	N/A	109	36	51	52	41	41	41	
<b>PROGRAM</b>													
1.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	1.	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	n/a	n/a	n/a	26	26	26	26	104	Kecamatan



MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
2.	Program Pembinaan Peningkatan Kompetensi Lembaga dan Aparatur Desa	1	Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat	orang	0	0	0	180	160	160	160	660	Dinas PMD
3.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes	persen	15	25	35	45	65	75	100	100	Dinas PMD
4.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif	Unit	0	43	57	60	60	55	55	330	Dinas PMD

The logo of the Government of West Java is a shield-shaped emblem. It features a central five-pointed star (pentagram) with a crescent moon to its left and a floral wreath to its right. Below the star is a stylized building with a central tower. At the bottom of the shield is a banner with the motto "SINDANGKASIR SUGIH MUKTI".

**BAB VII**  
**KERANGKA PENDANAAN**  
**PEMBANGUNAN**  
**DAN**  
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH**



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan).

Adapun rincian kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 pada Tabel dibawah ini:



**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023**

URAIAN	APBD PERUBAHAN 2018	APBD 2019	PROYEKSI			
			2020	2021	2022	2023
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.970.627.456.190,55</b>	<b>3.361.968.084.312,75</b>	<b>3.468.910.821.747,25</b>	<b>3.745.747.668.368,65</b>	<b>3.863.923.450.098,68</b>	<b>4.154.612.683.927,97</b>
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.641.122.022.427,10</b>	<b>1.819.857.336.440,18</b>	<b>1.850.358.049.769,91</b>	<b>1.934.239.577.388,32</b>	<b>2.025.653.341.287,26</b>	<b>2.121.229.159.251,17</b>
a. Belanja Pegawai	1.162.067.490.406,80	1.270.887.345.845,28	1.325.323.462.710,88	1.346.997.485.956,79	1.368.671.933.388,26	1.390.346.926.189,99
b. Belanja Hibah	18.226.950.000,00	27.416.200.000,00	19.216.323.925,59	24.973.592.438,96	30.730.798.719,60	36.487.924.988,37
c. Belanja Bansos	400.000.000,00	400.000.000,00	596.385.478,62	614.287.480,08	632.211.450,13	650.157.213,99
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.459.647.724,30	16.394.156.005,30	12.744.531.628,87	15.339.174.183,90	17.933.816.738,92	20.528.459.293,94
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	442.967.934.296,00	502.759.634.589,60	491.477.346.025,95	545.315.037.328,59	606.684.580.990,35	672.215.691.564,87
f. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>2. Belanja Langsung</b>	<b>1.329.505.433.763,45</b>	<b>1.542.110.747.872,57</b>	<b>1.618.552.771.977,33</b>	<b>1.811.508.090.980,33</b>	<b>1.838.270.108.811,42</b>	<b>2.033.383.524.676,80</b>
a. Belanja Pegawai	200.147.411.843,75	83.835.493.875,00	99.582.941.404,47	107.934.941.404,47	110.093.640.232,56	110.603.737.094,94
b. Belanja barang dan jasa	427.073.528.800,02	612.662.101.449,46	641.092.925.553,69	684.341.600.777,92	697.590.276.002,14	740.838.951.226,37
c. Belanja modal	702.284.493.119,68	845.613.152.548,11	877.876.905.019,17	1.019.231.548.797,95	1.030.586.192.576,72	1.181.940.836.355,49



**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2019**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>							
<b>PENDIDIKAN</b>							
1	Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Prestasi Masyarakat	Peningkatan Jumlah Prestasi Masyarakat	Persen	10,00	1.346,04	Disdik
2	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	25,00	3.165,26	Disdik
3	Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Persen	80,00	8.737,11	Disdik
4	Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya Kualitas Apektif Anak Sekolah	Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah	Persen	40,00	1.821,11	Disdik
5	Program Pendidikan PAUD	Meningkatnya APK TK/ KOBER	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan PAUD	Persen	85,00	2.147,25	Disdik
6	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya warga untuk Belajar Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Kesetaraan	Persen	90,00	1.763,91	Disdik
7	Program Pendidikan Dasar	Meningkatnya APK SD/MI dan APK SMP/ MTS	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Dasar	Persen	75,00	134.604,44	Disdik
8	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	3.165,26	Disdik
<b>KESEHATAN</b>							
1	Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Persen	100	3.793,47	Dinkes
2	Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Pemenuhan Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Terpenuhinya Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Persen	80	1.146,23	Dinkes
3	Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persen	60	21.776,70	Dinkes
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25	119,00	Dinkes
5	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12	3.165,26	Dinkes
6	Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dengan tersedianya Gedung Rawat Jalan Yang Representatif	Adanya Gedung Rawat Jalan Yang Representatif	Unit	1	133.135,89	Rsud Majalengka
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	Meningkatnya pengendalian penyakit akibat dampak asap rokok	Pengendalian Penyakit akibat dampak asap rokok	Persen	100	3.585,00	Rsud Majalengka
8	Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Pemenuhan Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Terpenuhinya Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Persen	100	122.357,07	Rsud Cideres



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							
1	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	%	25,00	1.840,00	Dinas BMCK
2	Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa	Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa	%	30,00	248.277,71	Dinas BMCK
3	Program Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Indikator Kinerja Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	%	25,00	2.600,00	Dinas BMCK
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	%	25,00	12.309,61	Dinas BMCK
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Penyediaan Regulasi Tata Ruang	Tersedianya Regulasi Tata Ruang	%	50,00	2.450,00	Dinas BMCK
6	Program Penataan Taman Kota	Meningkatnya Jumlah taman kota yang terbangun	Jumlah taman kota yang terbangun	unit	1,00	18.000,00	Dinas BMCK
7	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	30,00	116.222,38	Dinas PPSDA
8	Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa	Kelancaran Mobilitas Orang, Barang Dan Jasa	%	30,00	2.602,06	Dinas PPSDA
9	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12	2.839,85	Dinas PPSDA
10	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12	3.168,10	Dinas BMCK
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Indikator PHBS	Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS	%	100	30.468,99	Dinas PPSDA
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	189,15	Satpol PP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	2.167,14	Satpol PP
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Persen	25,00	287,00	Satpol PP
4	Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya Kualitas Apektif Anak Sekolah	Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah	Persen	10,00	36,35	Satpol PP
5	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Pertumbuhan Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	20,00	6,80	Satpol PP
6	Program Pengendalian Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	Persen	5,00	48,75	Satpol PP
7	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	2.971,74	Satpol PP
8	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12	885,09	Satpol PP
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	70,00	Kesbangpol
10	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	244,15	Kesbangpol
11	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	455,50	Kesbangpol
12	Program Manajemen Kebencanaan	Meningkatnya manajemen kebencanaan	Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)	Persen	28,46	2.772,15	BPBD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
13	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12	744,18	BPBD
<b>SOSIAL</b>							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	100	Persen	365,04	Dinsos
2	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya produktivitas masyarakat	Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari	20	Persen	858,69	Dinsos
3	Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan	30	Persen	14,64	Dinsos
4	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	30,00	40,59	Dinsos
5	Program Manajemen Kebencanaan	menurunnya Resiko Dampak Bencana (100%)	Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)	%	12,93	1.125,38	Dinsos
6	Program Jaminan Sosial	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan	RTS	410,00	2.459,43	Dinsos
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi LUT di IHT	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Diwilayah Industri Hasil Tembakau (IHT)	persen	20,00	2.344,78	Dinsos
8	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	791,40	Dinsos
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>							
<b>TENAGA KERJA</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	784,50	Disnakerin
2	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	30,00	461,15	Disnakerin
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	20,00	1.540,55	Disnakerin
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	2.115,90	Disnakerin
<b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	150,00	DP3AKB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	112,00	DP3AKB
3	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya produktivitas masyarakat	Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari	RTS	7.616,00	1.332,54	DP3AKB



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
4	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	82,50	DP3AKB
5	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	919,48	DP3AKB
<b>PANGAN</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.544,98	Dinas Pangan
2	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	1.187,60	Dinas Pangan
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.414,76	Dinas Pangan
4	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari	RTS	860,00	260,70	Dinas Pangan
5	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	15,00	1.514,94	Dinas Pangan
6	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	25,00	841,81	Dinas Pangan
7	Program Pola Konsumsi	Meningkatnya Pencapaian Pola Pangan Harapan Ideal (PPH 100%)	Tercapainya Pola Pangan Harapan Ideal (PPH 100%)	Persen	100,00	806,64	Dinas Pangan
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	582,57	Dinas LH
2	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Indikator PHBS	Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS	Persen	63,31	16.556,87	Dinas LH
3	Program Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Indikator Kinerja Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	Persen	25,00	346,88	Dinas LH
4	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Vegetasi Hutan (61.584)	Kualitas Air, Udara Dan Vegetasi Hutan (61.584)	Persen	100,00	782,50	Dinas LH
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Tiingkat pemenuhan sarana prasarana kerja Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100,00		Dinas LH
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	95,00	Disdukcapil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	5.145,00	Disdukcapil
3	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	4.165,26	Disdukcapil
4	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.582,00	Disdukcapil
<b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
1	Program Peningkatan Nilai Tukar Petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%	Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%	Persen	130,00	562,33	Dinas PMD
2	Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan SPM Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan SPM pelayanan publik	Persen	25,00	1.264,40	Dinas PMD
3	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Pertumbuhan Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Meningkatnya kesadaran masyarakat yang menghindari konflik (tingkat kamtibmas)	Persen	10,00	328,18	Dinas PMD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
4	Program Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya Pengembangan Konektivitas Pusat Pertumbuhan	Persentase pengembangan konektivitas pusat pertumbuhan	Persen	30,00	3.820,00	Dinas PMD
5	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Indikator PHBS	Persentase pemenuhan sarana indikator PHBS	Persen	63,31	137,50	Dinas PMD
6	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.099,95	Dinas PMD
7	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	15,00	849,03	Dinas PMD
8	Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	Meningkatnya Perwujudan Keluarga Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)	Jumlah perwujudan keluarga sejahtera (8 fungsi keluarga)	KK	5.966	224,50	Dinas PMD
9	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.297,88	Dinas PMD
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							
1	Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	Meningkatnya ketahanan keluarga	Terwujudnya Keluarga Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)	KK	5.966	18.074,85	DP3AKB
<b>PERHUBUNGAN</b>							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	6.450,16	Dishub
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.219,54	Dishub
3	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	2.485,90	Dishub
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	320,65	Diskominfo
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.109,87	Diskominfo
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	867,61	Diskominfo
4	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	350,60	Diskominfo
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>							
1	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya pendapatan usaha mikro keluarga miskin	Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari	RTS	315,00	98,40	Dinas KUMKM
2	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Persen	20,00	265,49	Dinas KUMKM
3	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya skala pelaku usaha mikro ke usaha kecil	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	35,00	2.212,93	Dinas KUMKM
4	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	665,70	Dinas KUMKM
<b>PENANAMAN MODAL</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	104,60	Dinas PTMPTSP
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	298,51	Dinas PTMPTSP





NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
3	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	15,00	98,95	Dinas PTMPTSP
4	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.014,64	Dinas PTMPTSP
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>							
1	Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	Meningkatnya Prestasi Masyarakat	Peningkatan Prestasi Masyarakat	Persen	50,00	130.079,62	Dispora
2	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	10,00	2.395,11	Dispora
3	Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Persen	100,00	38,60	Dispora
4	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.239,16	Dispora
<b>STATISTIK</b>							
1	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.109,87	Diskominfo
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	867,61	Diskominfo
<b>KEBUDAYAAN</b>							
1	Program Penguatan Adat	Menurunnya jumlah Konflik	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	30,00	401,10	Disparbud
<b>PERPUSTAKAAN</b>							
1	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	359,56	Diskapus
<b>KEARSIPAN</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	650,96	Diskapus
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	359,56	Diskapus
3	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	51,12	Diskapus
<b>URUSAN PILIHAN</b>							
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
1	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	19,25	Distankan
2	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	25,00	6.176,20	Distankan
<b>PARIWISATA</b>							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	50,00	Disparbud
2	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Persen	20,00	25.747,85	Disparbud
3	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	250,00	Disparbud





NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
4	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	15,00	361,85	Disparbud
5	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.604,69	Disparbud
<b>PERTANIAN</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.469,49	Distankan
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	19,25	Distankan
3	Program Peningkatan Nilai Tukar Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%	Persen	30,00	656,00	Distankan
4	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	25,00	6.176,20	Distankan
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	20,30	Distankan
6	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tembakau	Meningkatkan produksi dan mutu hasil tembakau	Ha	250,00		Distankan
<b>PERDAGANGAN</b>							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.973,84	Dinas Perdagangan
2	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya dukungan pemenuhan dasar RTM	Meningkatnya dukungan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin (RTM)	RTS	100,00	450,00	Dinas Perdagangan
3	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	30,00	74,99	Dinas Perdagangan
4	Program Penguatan Distribusi	Meningkatnya Stabilitas Harga Bahan Pokok Strategis	Stabilitas Harga Bahan Pokok Strategis	Persen	35,00	860,17	Dinas Perdagangan
5	Program Pengembangan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Surplus Neraca Perdagangan	Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan	Persen	10,00	3.543,00	Dinas Perdagangan
6	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	21,00	5.789,50	Dinas Perdagangan
7	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	1.257,07	Dinas Perdagangan
<b>PERINDUSTRIAN</b>							
1	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	29,00	26.348,78	Disnakerin
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	460,76	Disnakerin
3	Program Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Indikator Kinerja Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	Persen	25,00	181,48	Disnakerin
4	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Pertumbuhan Perilaku Masyarakat Yang Mengh	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	10,00	25,15	Disnakerin
<b>URUSAN PENUNJANG</b>							
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Menurunnya Persentase Penyimpangan Tata Ruang	Tersedianya Regulasi Tata Ruang	Persen	5,81	1.118,85	Bappelitbangda
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.536,91	Bappelitbangda
3	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	4.345,58	Bappelitbangda



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	7.325,54	BKPSDM
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Persen	25,00	503,40	BKPSDM
3	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	5,58	BKPSDM
4	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	2.050,13	BKPSDM
<b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>							
1	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya indeks pelayanan publik	Tersusunnya standarisasi publik	Persen		8.507,16	BKAD
2	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	Persen	100,00	4.655,42	BKAD
<b>FUNGSI LAINNYA</b>							
<b>SETDA</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	9.150,55	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	36.115,90	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Persen	100,00	327,00	Sekretariat Daerah
4	Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	20,00	1.086,50	Sekretariat Daerah
5	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Pertumbuhan Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	10,00	3.038,35	Sekretariat Daerah
6	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Indikator Phbs	Terpenuhinya Sarana Indikator Phbs	Persen	10,00	130,00	Sekretariat Daerah
7	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	5.053,67	Sekretariat Daerah
8	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	17.182,95	Sekretariat Daerah
<b>INSPEKTORAT</b>							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	44,86	Inspektorat
2	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.938,80	Inspektorat
3	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	874,88	Inspektorat
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							
1	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya fasilitasi dalam upaya untuk peningkatan kapasitas aparatur	Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur	peren	100,00	4.462,68	Sekretaria DPRD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	2.848,89	Sekretaria DPRD
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pelaksanaan Stimulan bagi peningkatan Kinerja Aparatur	Laksanakan stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur	Persen	100,00	1.685,50	Sekretaria DPRD
4	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	35.209,33	Sekretaria DPRD
5	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	454,52	Sekretaria DPRD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	Juta Rp.	
<b>KECAMATAN</b>							
1	Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	bulan	12,00	6.753,95	Kecamatan
2	Program Jaminan Sosial	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan	Terpenuhinya Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan	Persen	100,00	64,91	Kecamatan
3	Program Manajemen Kebencanaan	Meningkatnya manajemen kebencanaan	Meminimalisir Resiko Dampak Bencana (100%)	Persen	100,00	41,19	Kecamatan
4	Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	Meningkatnya ketahanan keluarga	Terwujudnya Keluarga Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)	Persen	100,00	297,25	Kecamatan
5	Program Optimalisasi Sumber Daya	Meningkatnya Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi	Persen	5,00	148,85	Kecamatan
6	Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)	Persen	100,00	164,14	Kecamatan
7	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik	Persen	25,00	4.016,59	Kecamatan
8	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Sarana Indikator PHBS	Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS	Persen	100,00		Kecamatan
9	Program Pendidikan Dasar	Meningkatnya APK SD/MI dan APK SMP/ MTS	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Dasar	Persen	5,00	107,70	Kecamatan
10	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata	Persen	20,00	23,99	Kecamatan
11	Program Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Indikator Kinerja Tata Ruang	Indikator Kinerja Tata Ruang	Persen	5,00	7,60	Kecamatan
12	Program Penguatan Adat	Meningkatnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Tumbuhnya Perilaku Masyarakat Yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas)	Persen	10,00	302,50	Kecamatan
13	Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya Kualitas Apektif Anak Sekolah	Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah	Persen	10,00	109,01	Kecamatan
14	Program Penguatan Tata Kelola Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	5,00	44,57	Kecamatan
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Meningkatnya Pendapatan Aparatur	Persen	25,00	5,30	Kecamatan
16	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	10,00	250,33	Kecamatan
17	Program Peningkatan Nilai Tukar Petani	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%	Persen	5,00	17,00	Kecamatan
18	Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Prestasi Masyarakat	Peningkatan Jumlah Prestasi Masyarakat	Persen	5,00	119,10	Kecamatan
19	Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persen	5,00	178,36	Kecamatan
20	Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	Meningkatnya produktivitas masyarakat	Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari	Persen	5,00	121,68	Kecamatan
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	Meningkatnya indeks Pelayanan Publik	Terpenuhinya SPM Pelayanan Publik	Persen	25,00	1.057,51	Kecamatan
22	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Terwujudnya Kapabilitas Aparatur	Persen	25,00	1.329,99	Kecamatan
23	Program Pola Konsumsi	Meningkatnya Pencapaian Pola Pangan Harapan Ideal (PPH 100%)	Tercapainya Pola Pangan Harapan Ideal (PPH 100%)	Persen	80	9,50	Kecamatan
24	Program Pendidikan PAUD	Meningkatnya APK TK/ KOBER	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan PAUD	Persen	70	4,80	Kecamatan
25	Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Pemenuhan Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Terpenuhinya Aksesibilitas Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Persen	80	7,52	Kecamatan
26	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya warga untuk Belajar Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan IQ Pada Tahapan Pendidikan Kesetaraan	Persen	70	7,52	Kecamatan

Tabel 7.3  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>PENDIDIKAN</b>																					
1.	Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin	1. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin	1. Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin	Persen	n/a	45,46			41,73	17.272,35	37,90	16.155,45	35,48	15.310,35	32,74	13.611,60	32,74	80.756,10	Disdik		
2.	Program Pendidikan Sekolah Dasar	1. Meningkatnya APK SD/MI	1. APK SD/MI	persen	104	104		104,90	605,30	105,30	608,12	105,60	609,95	105,90	611,78	105,90	3.039,65	Disdik			
3.	Program Pendidikan SMP	1. Meningkatnya APK SMP/MTs	1. APK SMP/MTs	persen	100	100		101,20	2.058,40	101,60	2.058,40	101,70	2.108,44	101,90	2.108,40	101,90	9.592,12	Disdik			
4.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal								969,87		1.086,89		8.810,29		1.427,91		13.032,90				
		1. Meningkatnya APK PAUD	1. APK PAUD	persen	63,91	64,79		65,49	241,17	66,04	253,19	66,64	267,59	66,90	275,21	66,90	1.256,40	Disdik			
		2. Meningkatnya Persentase Warga Belajar Paket A/B/C	2. Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C	persen	24,11	37,43		38,53	215,00	39,08	220,00	39,63	225,00	40,18	235,00	40,18	1.100,00	Disdik			
		3. Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	3. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	lembaga	5	2		5	513,70	6	613,70	8	8.317,70	9	917,70	9	10.676,50	Disdik			
5.	Penguatan Tata Kelola Pendidikan								15.195,63		33.760,20		37.294,62		41.023,26		141.087,93	Disdik			
		1. Meningkatnya Pemenuhan Ruang Guru	1. Terpenuhinya Ruang Guru	persen	97	93		93,88	5.065,21	93,88	11.253,40	93,88	12.431,54	93,88	13.674,42	93,88	47.029,31	Disdik			
		2. Meningkatnya Pemenuhan Ruang Kelas	2. Terpenuhinya Ruang Kelas	persen	82	82		83,50	5.065,21	83,50	11.253,40	83,50	12.431,54	83,50	13.674,42	83,50	47.029,31	Disdik			
		3. Meningkatnya Pemenuhan Ruang Laboratorium	3. Terpenuhinya Ruang Laboratorium	persen	32	31		32,00	5.065,21	32,00	11.253,40	32,00	12.431,54	32,00	13.674,42	32,00	47.029,31	Disdik			
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1. Meningkatnya Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	1. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	persen	n/a	n/a		20,00	367,00	20,00	402,00	20,00	436,50	20,00	476,50	20,00	2.019,00	Disdik			
7.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi	1. Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi	persen	n/a	n/a		50,00	1.060,87	50,00	1.159,46	50,00	1.192,98	50,00	1.312,27	50,00	5.642,83	Disdik			
8.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pendidikan								1.259,00		1.424,40		1.565,82		1.719,80		7.144,02	Disdik			
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100		100	646,00	100	713,90	100	785,29	100	863,82	100	3.602,01	Disdik			
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	Persen	100	100		100	613,00	100	710,50	100	780,53	100	855,98	100	3.542,01	Disdik			
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pendidikan								9.020,00		9.922,00		10.914,20		12.005,62		12.005,62	Disdik			
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100		100,00	7.020,00	100,00	7.922,00	100,00	9.914,00	100,00	10.005,62	100,00	41.061,62	Disdik			
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100		100,00	7.020,00	100,00	7.922,00	100,00	9.914,00	100,00	10.005,62	100,00	41.061,62	Disdik			
10.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan								666,60		1.452,00		8.784,60		9.663,06		9.663,06	Disdik			
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pendidikan	persen	95	93		97,00	478,00	98,00	1.256,00	98,50	6.005,00	99,00	7.222,00	99,00	15.417,00	Disdik			
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	persen	100	100		100,00	499,00	100,00	1.352,00	100,00	6.452,00	100,00	7.566,00	100,00	16.357,00	Disdik			
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	persen	100	100		100,00	497,00	100,00	1.352,00	100,00	667,00	100,00	7.845,00	100,00	10.859,00	Disdik			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		Target	Juta Rp.
<b>KESEHATAN</b>																			
1.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan																		
		1. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun	1. Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun	unit	n/a	n/a													
		2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun	2. Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun	unit	1	n/a		2	10.000,00				2	10.000,00	1	5.000,00	9	50.000,00	
2.	Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	1. Meningkatnya jaminan kesehatan bagi keluarga miskin	1. Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	keluarga	n/a	n/a		75.140,00	20.738,64	76.140,00	21.014,64	77.140,00	21.290,64	78.140,00	21.566,64	78.140,00	105.073,20	Dinkes	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan							67.584,73	67.584,73		67.584,73	67.884,73	67.884,73		67.684,73		12.200,00	Dinkes	
		1. Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar	1. Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar	persen	75,51	78,65			85	65.084,73	90	65.084,73	95	65.084,73	100	65.084,73	90	Dinkes	
		2. Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda	2. Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda	persen	27	30		63,64	2.500,00	63,64	2.500,00	90,91	2.800,00	100,00	2.600,00	100,00	12.200,00	Dinkes	
4.	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Meningkatnya Pemenuhan SPM Kesehatan poin 1-5, 7	1. Terpenuhinya SPM Kesehatan poin 1-5, 7	persen				100,00	2.827,10	100,00	2.827,20	100,00	2.827,20	100,00	2.878,10	100,00	2.878,10	Dinkes	
5.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Dinas Kesehatan	Meningkatnya upaya pengendalian penyakit akibat dampak rokok	1. Pengendalian Penyakit akibat dampak asap rokok	persen	n/a	n/a		20,00	4.370,00	30,00	4.370,00	40,00	4.370,00	50,00	4.370,00	60,00	4.420,00	Dinkes	
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Majalengka	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka	nilai	n/a	78		80,00	100.335,00	81,00	102.140,00	82,00	104.155,00	83,00	106.550,00	83,00	511.710,00	RSUD Majalengka	
8.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di RSUD Majalengka	Meningkatnya pelayanan terhadap penderita akibat dampak rokok	1. Lingkungan sosial pada penderita akibat dampak rokok sesuai standar	Unit	n/a	n/a		1,00	2.000,00	1,00	3.500,00	1,00	2.500,00	1,00	4.000,00	5,00	15.585,00	RSUD Majalengka	
9.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Cideres	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres	nilai	n/a	72		75,00	100.750,00	76,00	107.400,00	78,00	110.220,00	81,00	115.620,00	81,00	534.720,00	RSUD Cideres	
10.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di RSUD Cideres	Meningkatnya pelayanan terhadap penderita akibat dampak rokok	1. Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	Unit	n/a	n/a		2,00	1.270,00	1,00	1.500,00	2,00	2.000,00	2,00	2.500,00	7,00	7.270,00	RSUD Cideres	
11.	Program Tata Kelola Kesehatan								40.895,00		45.225,00		40.225,00		45.225,00		216.565,00		
		1. Meningkatnya Pemenuhan standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar	1. Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar	persen	82,5	93,75		42,42	40.670,00	63,64	45.000,00	84,85	40.000,00	100,00	45.000,00	100,00	215.315,00	Dinkes	
		2. Meningkatnya Ketersediaan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	2. Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	persen	87,5	88		100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	350,00	Dinkes	
		3. Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Kesehatan	3. Tersedianya Regulasi Kesehatan	persen	3	1		1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	900,00	Dinkes	
12.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan								6.050,00		6.450,00		6.650,00		7.150,00		30.909,00		
		1. Meningkatnya jaminan ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas	1. Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas	persen	66,12	45,08		85,00	4.000,00	85,00	4.000,00	85,00	4.000,00	85,00	4.000,00	85,00	19.000,00	Dinkes	
		2. Meningkatnya Pemenuhan alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	2. Terpenuhinya alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	persen	25,1	23,3		42,42	1.900,00	60,61	2.300,00	78,79	2.500,00	100,00	3.000,00	100,00	11.159,00	Dinkes	
		3. Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	3. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	persen	n/a	n/a		30,30	50,00	45,45	50,00	60,61	50,00	100,00	50,00	100,00	250,00	Dinkes	
		4. Meningkatnya penyelenggaraan SJSN dengan dengan peserta mencapai UHC	4. Terselenggaranya SJSN dengan dengan peserta mencapai UHC	persen	n/a	41		80,00	100,00	85,00	100,00	90,00	100,00	95,00	100,00	95,00	500,00	Dinkes	
13.	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat								867,00		882,00		897,00		902,00		4.393,00	Dinkes	
		1. Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder	1. Terselenggaranya peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder	persen	n/a	n/a		100,00	57,00	100,00	57,00	100,00	57,00	100,00	57,00	100,00	278,00	Dinkes	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
		2. Menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik	2. menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik	persen	n/a	1,97			2,5	750,00	2,3	750,00	2,2	750,00	2,1	750,00	2,0	3.750,00	Dinkes
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	3. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	persen		5,50			73,00	60,00	76,00	75,00	80,00	90,00	85,00	95,00	85,00	365,00	Dinkes
14.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi									408,00		400,00		400,00		425,00		2.011,00	
		1. Meningkatnya Pemenuhan SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1. Terpenuhinya SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	persen	n/a	n/a			100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	725,00	Dinkes
		2. Meningkatnya Penyelenggaraan Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (PZTVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular	2. Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (PZTVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular	persen	n/a	n/a			95,00	258,00	95,00	250,00	95,00	250,00	95,00	275,00	95,00	1.286,00	Dinkes
15.	Program Paradigma Sehat dan Ketahanan Keluarga									350,00		400,00		450,00		525,00		2.045,00	
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Meningkatnya indeks Keluarga Sehat	persen	50	56			65,00	85,00	70,00	100,00	75,00	125,00	80,00	150,00	80,00	540,00	Dinkes
		2. Meningkatnya PHBS di semua Tatanan	2. Meningkatnya PHBS di semua Tatanan	persen	54,58	55			65,00	85,00	70,00	100,00	75,00	125,00	80,00	150,00	80,00	540,00	Dinkes
		3. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	persen					15,00	180,00	18,00	200,00	21,00	200,00	24,00	225,00	24,00	965,00	Dinkes
16.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur RSUD Majalengka									857,00		860,00		1.021,00		1.748,00		5.564,00	
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	1. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	persen	n/a	n/a			86		61		41		36		311	RSUD Majalengka	
		Meningkatnya Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	2. Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Orang	n/a	n/a			174		180		187		194		901	RSUD Majalengka	
17.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur RSUD Cideres									897		1.280		2.563		2.046		7.270	
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	1. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	Orang	n/a	n/a			62	360,00	43	720,00	41	1.980,00	6	1.440,00	245	4.470,00	RSUD Cideres
		Meningkatnya Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	2. Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Orang	n/a	n/a			482	537,00	636	560,00	741	583,00	846	606,00	3082	2.800,00	RSUD Cideres
18.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kesehatan									5.571,00		5.571,00		5.571,00		5.571,00		8.838,00	Dinkes
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100			100,00	5.071,00	100,00	5.071,00	100,00	5.071,00	100,00	5.071,00	100,00	6.338,00	Dinkes
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan	Persen	100	100			100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	2.500,00	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.							
19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kesehatan									425,00		425,00		450,00		450,00		2.145,00	Dinkes		
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100			90,00	125,00	100,00	125,00	100,00	125,00	100,00	125,00	100,00	600,00	Dinkes		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100			90,00	300,00	100,00	300,00	100,00	325,00	100,00	325,00	100,00	1.545,00	Dinkes		
20.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Majalengka	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan RSUD Majalengka	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Majalengka	persen	n/a	65			9,00	83,00	3,00	4,35	10,00	24,60	7,00	12,50	100,00	151,28	RSUD Majalengka		
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Cideres	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan RSUD Cideres	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres	persen	n/a	65			15,00	36.500,00	29,00	39.469,00	13,00	40.006,00	10,00	39.426,00	126,00	184.766,00	RSUD Cideres		
22.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan									210,00		210,00		210,00		210,00		1.050,00	Dinkes		
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	persen	90	90			100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	250,00	Dinkes		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	80	80			100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	375,00	Dinkes		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	100	100			100,00	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	100,00	425,00	Dinkes		
23.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan RSUD Majalengka									17,50		22,50		22,50		22,50		22,50	RSUD Majalengka		
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	Niali	CC	CC			B	7,5	BB	10,00	A	10,00	A	10,00	A	10,00	RSUD Majalengka		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	90	90			95	10,00	100	12,50	100	12,50	100	12,50	100	12,50	RSUD Majalengka		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH						
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.							
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.							
24.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan RSUD Cideres										17,50			22,50			22,50		22,50	102,50	RSUD Cideres				
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	Nilai	CC	CC				B			BB			A			A		A	RSUD Cideres			
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	90	90			100				100			100			100		100	RSUD Cideres			
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																									
1.	Program Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan	1. Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan	persen	n/a	5			7,04		227.415,00		9,04		234.924,00		10,54		242.643,00		11,74	250.752,00	1.151.697,84	Dinas BMCK	
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya Kelayakan Jalan	1. Tingkat Kelayakan Jalan	persen	n/a	83			83,52		175.560,00		84,11		182.150,00		84,86		189.060,00		85,29	196.330,00	895.590,00	Dinas BMCK	
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinarmargaan	1. Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinarmargaan	persen	n/a	100			100,00		2.855,00		100,00		2.908,00		100,00		2.911,00		100,00	2.914,00	12.392,61	Dinas BMCK	
4.	Program Database Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya Kelayakan Jalan	1. Tingkat Kelayakan Jalan	persen	n/a	83			83,52		5.770,00		84,11		5.876,00		84,86		5.882,00		85,29	5.888,00	25.085,23	Dinas BMCK	
5.	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Penataan Bangunan	1. Meningkatnya Persentase bangunan gedung yg memiliki IMB	1. Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB	persen	n/a	6			6,66		1.300,00		6,88		1.600,00		7,10		1.600,00		7,34	1.600,00	7,34	7,30	Dinas BMCK
6.	Program Penataan Taman Kota	Meningkatnya jumlah taman kota yang terbangun	1. Jumlah Taman Kota yang terbangun	unit	n/a	1			3,00		25.000,00		1,00		5.000,00		1,00		5.000,00		1,00	5.000,00	7,00	58.000,00	Dinas BMCK
7.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1. Meningkatnya Jaringan dalam kondisi baik	1. Persentase Jaringan dalam kondisi baik	persen	67,87	68,80			69,40		135.822,55		69,45		138.639,50		69,55		141.018,22		69,75	123.026,13	69,75	538.506,40	Dinas PPSDA
8.	Program Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya										25.280,60				85.514,19				52.538,00			30.218,10		193.550,89	Dinas PPSDA
		Meningkatnya Volume air tertampung, Debit Air Termanfaatkan dan Tertanganinya titik sungai kritis	1. Volume Air Tertampung	m3	n/a	n/a			238.700		9.550,10		495.000		19.600,00		450.000		17.900,00		450.000,00	18.000,00	1.633.700	65.050,10	Dinas PPSDA
			2. Debit Air Termanfaatkan	ltr/d	n/a	n/a			8.676,80		5.635,00		3.774,05		5.574,00		3.717,60		6.116,00		3.711,35	6.728,10	19.879,78	24.053,10	Dinas PPSDA
			3. Tertanganinya titik sungai kritis	persen	n/a	n/a			6,61		10.095,50		7,70		60.340,19		8,78		28.522,00		9,86	5.490,00	9,86	104.447,69	Dinas PPSDA
9.	Program perencanaan tata ruang	1. Meningkatnya Jumlah Pedoman Tata Ruang yang Disusun	1. Jumlah Pedoman Tata Ruang	persen	n/a	n/a			100,00		300,00		100,00		1.000,00		100,00		1.000,00		100,00	120,00	100,00	3.090,00	Dinas BMCK
10.	Program pengendalian Pemanfaatan tata ruang	1. Meningkatnya Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	n/a	n/a			100,00		125,00		100,00		1.100,00		100,00		200,00		100,00	200,00	100,00	1.625,00	Dinas BMCK
9.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Dinas BMCK										42.337,60				107.357,60				107.377,60			107.382,60		366.640,50	Dinas BMCK
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas BMCK	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas BMCK										1.915,00				1.965,00				2.015,00			2.065,00		9.023,00	Dinas BMCK
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH							
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.								
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.								
11.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas BMCK										120,00			120,00			120,00		135,00		630,00	Dinas BMCK				
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00		100,00	Dinas BMCK			
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas BMCK	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00		100,00	Dinas BMCK			
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas BMCK	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00		100,00	Dinas BMCK			
12.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Dinas PPSDA										1.683,17			1.309,26			2.036,50		2.240,15		7.269,08	-				
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100			100		757,34			290,97			100		916,38		1.008,01	100	2.972,70	Dinas PPSDA		
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA	Persen	100	100			100		925,83			1.018,29			100		1.120,13		1.232	100	4.296,38	Dinas PPSDA		
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PPSDA										1.361,78			1.429,96			1.504,95		1.587,45		5.884,14					
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100			100		1.226,78			1.289,46			100		1.358,40		1.434,24	100	5.308,89	Dinas PPSDA		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100			100		135,00			140,50			100		146,55		153,21	100	575,26	Dinas PPSDA		
14.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas PPSDA										90,00			90,00			90,00		90,00		360,00	Dinas PPSDA				
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100			100		50,00			50,00			100		50,00		100	50,00	100	200,00	Dinas PPSDA	
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas PPSDA			100	100			100		40,00			40,00			100		40,00		100	40,00	100	160,00	Dinas PPSDA
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																										
1.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Bersih	1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	1. Cakupan pelayanan Air Bersih	persen	76,73	80,16			80,67		7.525,00			80,98			7.850,00		81,31		8.700,00	81,65	6.950,00	81,65	31.025,00	Dinas PPSDA
2.	Program Peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin	1. Meningkatnya kualitas rumah masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1. Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persen	n/a	n/a			5,20		1.750,00			3,90			1.750,00		260,00		1.750,00	1,30	1.750,00	0	7.000,00	Dinas PPSDA
3.	Program Pemenuhan utilitas Sanitasi	1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi	1. Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	61,25	68,36			69,02		11.750,00			69,38			7.550,00		69,75		8.450,00	70,12	8.550,00	70,12	36.300,00	Dinas PPSDA
4.	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	1. Meningkatnya Persentase jalan desa dalam kondisi baik	1. Panjang Jalan Desa dalam kondisi baik	km	221,87	242,87			294,80		30.500,00			304,25			6.000,00		318,40		9.250,00	330,95	11.700,00	330,95	57.450,00	Dinas PPSDA
5.	Program pengembangan Perumahan	1. Meningkatnya Kualitas rumah masyarakat	1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	1,02	n/a			74,80		3.886,43			56,10			4.275,07		37,40		4.702,58	18,70	5.172,84	0	18.036,92	Dinas PPSDA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																			
1.	Program Pembinaan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Meningkatnya Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12	12			12,00	6.363,05	12,00	6.999,35	12,00	7.699,29	12,00	8.975,99	12,00	36.071,41	Satpol PP
2.	Program Pencegahan Potensi Gangguan Kamtibmas	1. Meningkatnya Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompeten	1. Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12	12			12,00	1.187,97	12,00	1.306,76	12,00	1.437,44	12,00	1.581,18	72,00	6.593,05	Kesbangpol
3.	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1. Meningkatnya Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	100	100			100,00	404,63	100,00	445,09	100,00	489,60	100,00	1.369,65	100,00	2.979,67	Satpol PP
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Satlinmas	1. Meningkatnya Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	1. Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	persen	100	100			100,00	2.553,90	100,00	2.809,29	100,00	3.090,22	100,00	3.459,24	600,00	11.970,15	Satpol PP
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pamong Praja	1. Meningkatnya Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompeten	1. Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompeten	orang	287	287			287,00	1.286,48	287,00	1.415,13	287,00	1.556,64	287,00	1.712,30	1.722,00	6.130,15	Satpol PP
6.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1. Meningkatnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	100	100			100,00	15.818,66	100,00	17.400,53	100,00	19.142,11	100,00	21.056,32	600,00	73.417,62	Satpol PP
7.	Program Manajemen Kebencanaan	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana	persen	100	100			100		100		100		100		100		BPBD
8.	Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Meningkatnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir korban jiwa, ekonomi dan lingkungan	1. Persentase tanggap bencana	persen	100				100,00	4.484,25	100,00	5.255,18	100,00	5.878,69	100,00	6.439,56	100,00	23.650,99	BPBD
9.	Program Kedaruratan dan logistik	1. Meningkatnya Penanganan darurat bencana	1. Tingkat Penanganan darurat bencana	persen	100	n/a			100,00	3.082,50	100,00	3.390,75	100,00	3.729,83	100,00	4.102,81	100,00	14.607,93	BPBD
10.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Meningkatnya Pemulihan pasca bencana	1. Tingkat Pemulihan pasca bencana	persen	10	n/a			100,00	14.907,00	100,00	16.397,70	100,00	18.037,47	100,00	19.841,22	100,00	70.060,19	BPBD
11.	Program kemitraan wawasan kebangsaan	Menurunnya jumlah isu/konflik SARA kebangsaan	1. Jumlah isu/konflik SARA	Kasus	n/a	18			5	170,10	7	170,40	9	170,70	11	171,00	14	682,20	Kesbangpol
12.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Satpol PP								100,00	586,77	100,00	645,44	100,00	713,22	100,00	940,76	100,00	3.274,62	Satpol PP
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satpol PP
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Satpol PP
13.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP									664,62		731,08		804,19		884,60		3.418,27	Satpol PP
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Satpol PP	persen	100	100			100,00	236,62	100,00	260,28	100,00	286,31	100,00	314,94	600,00	1.184,91	Satpol PP
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP	persen	100	100			100	428,00	100	470,80	100	517,88	100	569,66	100	2.233,35	Satpol PP
14.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satpol PP								1,00	103,66	1,00	114,03	1,00	125,43	1,00	137,98	1,00	537,05	Satpol PP
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Satpol PP	persen	100	100			100,00	52,01	100,00	57,21	100,00	62,93	100,00	69,23	500,00	259,58	Satpol PP
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP	persen	100	100			100,00	36,32	100,00	28,29	100,00	43,95	100,00	48,34	100,00	188,75	Satpol PP
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Satpol PP	persen	100	100			100,00	19,74	100,00	21,72	100,00	23,89	100,00	26,28	100,00	97,53	Satpol PP
15.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah									2.227,80		2.450,58		2.695,64		2.965,20		11.039,83	BPBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.					
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		100,00	BPBD
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		100,00	BPBD
16.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah							100,00	2.700,00	100,00	110,00	100,00	121,00	100,00	133,10		3.082,60	BPBD	
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPBD	
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100		100		100		100		100	BPBD	
17.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah							100,00	95,07	100,00	104,57	100,00	115,03	100,00	126,53		466,28	BPBD	
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPBD	
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPBD	
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	BPBD	
18.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kesatuan Bangsa dan Politik								1.130,74		1.250,00		1.373,50		1.511,50		5.265,74	Kesbangpol	
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kesbangpol	
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kesbangpol	
19.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik								737,16		141,50		146,50		151,50		1.176,66	Kesbangpol	
		Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kesbangpol	
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100			100		100		100		100		100	Kesbangpol	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH								
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.									
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.											
20.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik										20,00			30,00			40,00			55,00			145,00	Kesbangpol			
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100				100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Kesbangpol		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100				100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Kesbangpol		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100	100				100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Kesbangpol		
<b>SOSIAL</b>																											
1.	Program monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatnya efektifitas program penanggulangan kemiskinan	1. Persentase masyarakat miskin yang dimonev	persen	n/a	n/a				100,00			2.700,00	100,00		2.700,00	100,00		2.700,00	100,00		2.700,00	100,00	10.800,00	Dinsos		
2.	Program Jaminan Sosial												8.785,53			9.855,53			10.925,53			11.995,53		41.562,12	Dinsos		
		1. Meningkatnya jumlah RTS yang memperoleh program jaminan sosial	1. Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial	Rumah Tangga	3563	4213			307		874,40	307		874,40	307		874,40	307		874,40	307		874,40	307	3.497,60	Dinsos	
		2. Meningkatnya jumlah lansia yang mendapat bantuan "Rantang Kanyaah"	2. Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"	orang	n/a	n/a			500		3.300,00	670		4.370,00	840		5.440,00	1.010		6.510,00	1.010		19.620,00	1.010	19.620,00	Dinsos	
3.	Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin	1. Meningkatnya jumlah kelompok usaha bersama keluarga miskin yang mandiri	1. Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri	Kube	112	112			128		2.275,00	128		2.275,00	128		2.275,00	128		2.275,00	128		2.275,00	422	9.100,00	Dinsos	
4.	Program peningkatan produktivitas masyarakat	1. Meningkatnya jumlah PMKS yang dibantu	1. Jumlah PMKS yang dibantu	orang	5145	5945			270		1.110,13	270		1.110,13	270		1.110,13	270		1.110,13	270		1.110,13	100	4.440,52	Dinsos	
5.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	1. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial	1. Jumlah Kelembagaan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	lembaga					157,00		1.226,00	157,00		1.226,00	157,00		1.226,00	157,00		1.226,00	157,00		1.226,00	628,00	4.904,00	Dinsos	
6.	Program Penanganan Sosial Korban Bencana										3.488,26			3.488,26			3.488,26			3.488,26			3.488,26		13.953,04	Dinsos	
		1. Meningkatnya penanganan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	orang	100	100			100		2.000,00	100		2.000,00	100		2.000,00	100		2.000,00	100		2.000,00	100	8.000,00	Dinsos	
			2. Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana	orang	60	60			361		1.488,26	361		1.488,26	361		1.488,26	361		1.488,26	361		1.488,26	1.264	5.953,04	Dinsos	
7.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Dinas Sosial	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi LUT di IHT	1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin di lingkungan IHT	persen	n/a	n/a			7,3		1.500,00	7,3		1.500,00	7,3		1.500,00	7,3		1.500,00	7,3		1.500,00	7,3	7.300,00	Dinsos	
8.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Sosial										1.198,17			921,54			1.013,69			1.115,06			4.248,47		1.115,06	4.248,47	Dinsos
		1. Meningkatnya persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial	persen	100	100			100		396,87	100		35,00	100		38,50	100		42,35	100		42,35	100	512,72	Dinsos	
		2. Meningkatnya Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial	2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial	persen	100	100			100		801,30	100		886,54	100		975,19	100		1.072,71	100		1.072,71	100	3.137,62	Dinsos	
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Sosial										556,00			605,00			665,50			732,05			2.558,55		732,05	2.558,55	Dinsos
		1. Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial	persen	100	100			100		424,00	100		460,00	100		506,00	100		556,60	100		1.946,60		556,60	1.946,60	Dinsos
		2. Meningkatnya Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial	2. Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial	persen	100	100			100		132,00	100		145,00	100		159,50	100		175,45	100		611,95		175,45	611,95	Dinsos
10.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Sosial										82,00			91,50			100,65			119,72			393,87		119,72	393,87	Dinsos

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.					
		1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial	persen	100	100			100	52,00	100	55,50	100	61,05	100	67,16	100	235,71	Dinsos		
		2. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial	persen	100	100			100	22,50	100	27,00	100	29,70	100	41,67	100	120,87	Dinsos		
		3. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial	3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial	persen	100	100			100	7,50	100	9,00	100	9,90	100	10,89	100	37,29	Dinsos		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>TENAGA KERJA</b>																					
1.	Program peningkatan produktivitas masyarakat miskin	1. Meningkatnya Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	1. Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	RTS	n/a	n/a			500,00	2.880,00	500,00	3.024,00	500,00	3.175,20	500,00	3.333,96	2.000,00	12.413,16	Disnakerin		
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	n/a	24			22,72	2.342,63	22,72	2.440,00	22,72	2.500,00	22,72	2.600,00	90,88	9.882,63	Disnakerin		
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Meningkatnya pencari kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan	1. Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan	Persen	n/a	60			225,00	945,00	225,00	945,00	225,00	945,00	225,00	945,00	900,00	3.780,00	Disnakerin		
4.	Program Pembinaan Hubungan Industrial, Sayarat Kerja dan Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial	1. Meningkatnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	1. Persentase Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	n/a	n/a			75,00	541,50	75,00	778,00	75,00	861,00	75,00	963,00	75,00	3.143,50	Disnakerin		
5.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian									1.130,74		1.250,00		1.373,50		1.511,50		5.265,74	Disnakerin		
		1. Meningkatnya pemenuhan dasar perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disnakerin		
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Disnakerin	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian									737,16		141,50		146,50		151,50		1.176,66	Disnakerin		
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Disnakerin	
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100		100		100		100		100		100	Disnakerin	
7.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian									20,00		30,00		40,00		55,00		145,00	Disnakerin		
		1. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Disnakerin	
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Disnakerin	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH			
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.	
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		Target	Juta Rp.	
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		Disnakerin
<b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																				
1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin	1. Meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga miskin yang menjadi mandiri	1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	KK	n/a	n/a			600	1.708,19	675	1.853,42	700	2.036,35	725	2.217,69	3.250	8.403,90	Dinas P3AKB	
2.	Program Pemberdayaan Perempuan	1. Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam pemberdayaan gender	1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	n/a	n/a			40	816,75	60	943,75	80	1.083,81	100	1.173,53	100	4.199,09	Dinas P3AKB	
3.	Program Penguatan Pemenuhan Hak Anak	1. Meningkatnya capaian kabupaten anak	1. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	n/a	n/a			Pratama	4.575,55	Madya	1.125,75	Madya	1.151,50	Nindya	1.225,00	Nindya	8.177,80	Dinas P3AKB	
4.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak									2.640,00		2.574,00		2.626,10		2.700,00		10.841,98	Dinas P3AKB	
		1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	n/a	n/a			10	1.140,00	12,5	975,00	15	1.025,00	15,5	105,00	15,5	4.291,88	Dinas P3AKB	
		2. menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Persen	n/a	n/a			10	750,00	12,5	799,50	15	801,00	15,5	825,00	15,5	3.275,50	Dinas P3AKB	
5.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana									2.821,16		2.776,17		3.099,80		3.094,30		13.630,38	Dinas P3AKB	
		1. Meningkatnya Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100	100			100	529,30	100	416,80	100	601,80	100	436,80	100	2.224,85	Dinas P3AKB	
		2. Meningkatnya Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Persen	100	100			100	1.145,93	100	1.179,69	100	1.249,00	100	1.328.750,00	100	1.333.244,09	Dinas P3AKB	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana									2.497,81		916,69		950,00		977,75		5.566,24	Dinas P3AKB	
		1. Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100	100			100,00	2.108,11	100,00	515,00	100,00	525,00	100,00	530,00	100,00	3.678,11	Dinas P3AKB	
		2. Meningkatnya Persentase sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2. Persentase sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Unit	128	128			205	389,70	206	401,69	206	425,00	206	447,75	206	1.776,14	Dinas P3AKB	
7.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana									1.072,50		1.042,50		1.140,00		1.290,00		4.627,50	Dinas P3AKB	
		1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100	100			100,00	72,50	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	442,50	Dinas P3AKB	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
		2. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100	100			100,00	260,00	100,00	235,00	100,00	250,00	100,00	325,00	100,00	1.070,00	Dinas P3AKB
		3. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100	100			100,00	30,00	100,00	35,00	100,00	40,00	100,00	40,00	100,00	145,00	Dinas P3AKB
<b>PANGAN</b>																			
1.	Program Pengembangan Desa Pangan	1. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	1. Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	desa	n/a	18			4	484,00	4	500,00	4	550,00	4	600,00	38	2,57	Dinas Pangan
2.	Program pengembangan Pengankaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	1. Meningkatnya Kualitas konsumsi, pengawasan mutu dan keamanan pangan	1. Persentase Peningkatan skor PPH	persen	n/a	87			87,00	1.155,00	88,00	1.155,00	90,00	1.155,00	91,00	1.155,00	91,00	5.775,00	Dinas Pangan
			2. Persentase Keamanan Pangan Segar	persen	n/a	15			15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Dinas Pangan
3.	Program Pengembangan Kelembagaan Petani, Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Meningkatnya Jumlah Lembaga yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	1. Jumlah Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	kelompok	n/a	n/a			50,00	1.800,00	50,00	1.800,00	50,00	1.800,00	50,00	1.800,00	250,00	9.000,00	Dinas Pangan
4.	Program Penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Meningkatnya Jumlah Petani yang mendapatkan pelayanan penyuluhan	1. Jumlah Pusat Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Unit	n/a	80			25,00	3.221,00	25,00	3.221,00	25,00	3.221,00	26,00	3.471,00	126,00	16.355,00	Dinas Pangan
			2. Meningkatnya kualitas kinerja penyuluh pertanian	persen	n/a	85			85		85		85		85		85		Dinas Pangan
5.	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan pangan	1. Persentase peningkatan skor PPH ketersediaan	persen	n/a	83,4			83,6	1.145,00	83,8	1.145,00	84,00	1.145,00	84,2	1.145,00	84,2	5.725,00	Dinas Pangan
			2. Penguatan cadangan Pangan	Ton	n/a	40			20,00		20,00		20,00		20,00		140,00		Dinas Pangan
6.	Program Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Meningkatnya Angka Stabilitas Harga Pangan	1. Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10 dan pasokan pangan	Persen	n/a	99			100,00	755,00	100,00	755,00	100,00	755,00	100,00	755,00	100,00	3.775,00	Dinas Pangan
7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pangan									2.584,00		2.334,00		2.649,00		2.359,00		12.011,69	
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pangan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pangan									3.730,00		2.680,00		2.180,00		1.680,00		14.365,50	
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pangan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pangan
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pangan									4.775,00		1.890,00		1.890,00		2.745,00		11.690,00	
		1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pangan		persen	100	100			85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Dinas Pangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.					
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pangan	persen	100	100			85,00		85,00			85,00		85,00		85,00		Dinas Pangan	
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pangan	persen	100	100			85,00		85,00			85,00		85,00		85,00		Dinas Pangan	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
<b>PERTANAHAN</b>																			
1	Program Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah	1. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik	Persen	29	29 Lokasi			31,03	30.220,00	24,14	33.242	13,80	36.264,00	12,00	39.286,00	100,00	169.012	Setda
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																			
1.	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah									35.103,00		7.963,30		18.234,63		9.078,09		70.379,02	Dinas LH
		1. Meningkatnya Pengelolaan sampah dan limbah	1. Cakupan Pelayanan Persampahan	persen	1,83	1,83		1,91			1,99		2,07		2,15		2,15		Dinas LH
			2. Cakupan Pelayanan penanganan limbah	persen	n/a	n/a		7,17			10,67		16,66		16,66		16,66		Dinas LH
2.	Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh	1. Meningkatnya penanganan sampah di permukiman kumuh	1. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh	unit	n/a	n/a		535,00	1.590,00	535,00	1.749,00	535,00	1.923,90	642,00	2.492,96	2.247,00	7.755,86		Dinas LH
3.	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tingkat Kualitas Lingkungan	point	61	61		1,50	2.360,00	1,50	1.887,50	1,50	2.008,95	1,50	1.401,85	68,47	8.440,80		Dinas LH
4.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertata	persen	63	100		100,00	69.946,36	100,00	20.582,50	100,00	22.640,75	100,00	24.904,83	100,00	138.074,44		Dinas LH
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	1. Tingkat Pelayanan Persampahan	persen	10	10		3,50	10.294,19	3,50	11.323,61	3,50	12.455,97	3,50	13.701,57	28,00	47.775,34		Dinas LH
6.	Program Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Meningkatnya pelestarian, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1. Persentase Luas Tutupan Lahan	persen	31	31		0,01	1.205,00	0,01	1.375,50	0,01	1.513,05	0,01	1.664,36	31,09	5.757,91		Dinas LH
7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Lingkungan Hidup								1.337,28		1.471,01		1.618,11		1.779,92		6.206,32		Dinas LH
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	Persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Lingkungan Hidup								772,46		629,71		692,68		761,95		2.856,79		Dinas LH
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup								75,07		82,57		105,83		229,91		493,38		Dinas LH
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	persen	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas LH
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																			
1.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan								4.597,50		5.205,00		5.812,50		6.420,00		25.325,00		Disdukcapil
		1. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	71	77		81,60		83,80		85,00		88,30		8.830,00			Disdukcapil

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
		2. Meningkatkan Persentase distribusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia	2. Prosentase distribusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia	Persen	n/a	n/a			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
		3. Meningkatkan Persentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)	3. Prosentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
2.	Program Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan								200,00		250,00		275,00		325,00		1.150,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten	1. Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
		2. Meningkatkan Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	2. Prosentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
3.	Program Administrasi Pendaftaran Penduduk								1.125,00		1.250,00		1.375,00		1.450,00		6.230,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan Kepemilikan KK dan KTP	1. Prosentase Kepemilikan KK dan KTP	Persen	100	100			100		100		100		100		100		Disdukcapi
		2. Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2. Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	46,44	46,53			62,56		70,57		78,59		86,59		86,59		Disdukcapi
		3. Meningkatkan Pelayanan Pindah/Datang penduduk	3. Prosentase Pelayanan Pindah/Datang penduduk	Persen	100	100			100		100		100		100		100		Disdukcapi
4.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil								160,00		195,00		225,00		275,00		970,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	1. Persentasi Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	Persen	32	34			60,12		73,55		86,98		100,00		100,00		Disdukcapi
		2. Meningkatkan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	2. Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
5.	Program Peningkatan Pemanfaatan data kependudukan								175,00		195,00		225,00		255,00		941,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan	1. Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dok	n/a	9			13,00		15,00		17,00		19,00		19,00		Disdukcapi
		2. Meningkatkan Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dok	n/a	9			57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		Disdukcapi
		3. Meningkatkan Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	3. Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	n/a	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
6.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								904,00		1.009,00		1.041,00		1.105,00		4.741,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								9.871,00		2.010,00		845,00		1.015,00		14.703,00		Disdukcapi
		1. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapi

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.								
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.												
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		Disdukcapi						
8.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								150,00			185,00			225,00			260,00		910,00	Disdukcapi					
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Disdukcapi					
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Disdukcapi					
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	Disdukcapi					
<b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																										
1.	Program Pembinaan Peningkatan Kompetensi Lembaga dan Aparatur Desa											2.986,00			2.056,19			2.190,72		2.039,79	2.806.735,20	Dinas PMD				
		1. Meningkatnya jumlah pengurus BPD dan aparat desa yang telah mengikuti diklat	1. Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat	orang	n/a	n/a			180,00			160,00			160,00			160,00		160,00	660,00	Dinas PMD				
		2. Meningkatnya persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	2. Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	persen (%)	40	50			60,00			70,00			80,00			90,00		90,00	90,00	Dinas PMD				
2.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa											2.265,00			2.491,50			2.740,65		2.070,15	8.818,97	Dinas PMD				
		1. Meningkatnya persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes	persen	15	25			45,00			65,00			75,00			100,00		100,00	100,00	Dinas PMD				
		2. Meningkatnya persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa	2. Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa	Persen	45	50			55,00			60,00			65,00			70,00		80,00	80,00	Dinas PMD				
3.	Program Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa											1.932,50			1.660,15			2.178,73		2.231,60	8.602,47	Dinas PMD				
		1. Menurunnya jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif	1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif	Unit	n/a	43			60,00			60,00			55,00			55,00		330,00	330,00	Dinas PMD				
		2. Meningkatnya persentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	2. Prosentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	persen	n/a	n/a			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00	100,00	Dinas PMD				
4.	Program Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Desa								12,00			1.019,81			13,00			880,24		14,00	965,50	15,00	1.062,05	15,00	4.239,56	Dinas PMD
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan											8.427,03			9.536,49			8.590,00		11.263,00	44.859,03	44.859,03	Dinas PMD			
		1. Meningkatnya jumlah partisipasi swadaya masyarakat	1. Jumlah meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Rp. (000)	266.000	300.000			725.600			1.015.600			1.135.000			1.762.600		1.762.600	1.762.600	1.762.600	Dinas PMD			
		2. Meningkatnya jumlah infrastruktur posyandu yang dibangun	2. Jumlah infrastruktur posyandu yang di bangun	unit	n/a	5			5,00			5,00			5,00			5,00		5,00	30,00	30,00	Dinas PMD			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH				
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.		
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		Target	Juta Rp.		
6.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										804,00		884,40		972,84		1.070,12	200,00	4.475,45	Dinas PMD	
		1. Meningkatnya pemenuhan dasar perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										290,00		319,00		444,90		489,39		2.058,02	Dinas PMD	
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
8	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										79,00		86,90		95,59		125,15		425,71	Dinas PMD	
		1. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PMD
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																					
1.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Meningkatnya cakupan angka total fertility rate	1. Cakupan Angka Total Fertility Rate	Point	2	2			2,14	13.528,82	2,13	14.016,69	2,12	14.531,67	2,11	15.066,03	2,11	71.003,06	Dinas P3AKB		
2.	Program Keluarga Sejahtera									2.300,00		2.285,00		2.570,00		2.810,00		10.115,00	Dinas P3AKB		
		1. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan	1. Rata-rata Usia Perkawinan	Tahun	19	19			19,60	1.900,00	20,00	1.945,00	20,50	2.125,00	21,10	2.240,00	21,10	8.360,00	Dinas P3AKB		
		Meningkatnya ketahanan keluarga	2. Menurunnya Tingkat Perceraian	Kasus	4311	4652			2,50	250,00	2,50	225,00	3,00	280,00	3,00	345,00	3,00	1.100,00	Dinas P3AKB		
<b>PERHUBUNGAN</b>																					
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Sarana Perhubungan	1. Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan	persen	65	65			70,00	47.000,00	80,00	4.600,00	90,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	64.600,00	Dishub		
		Meningkatnya persentase pemasangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	2. Persentase Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	persen	25	37			41,64	1.250,00	43,87	12.820,00	46,10	13.327,00	48,34	13.643,00	48,34	49.444,00	Dishub		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	1. Meningkatnya Pelayann Angkutan Umum Trayek dalam kota/kabupaten	1. Prosentasi Capaian Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum	persen	50,4	50,4			70,00	3.005,00	80,00	2.860,00	90,00	2.770,00	100,00	2.880,00	100,00	13.515,00	Dishub
3.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Prosentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	persen	100	100			100,00	916,00	100,00	820,00	100,00	845,00	100,00	872,00	100,00	4.041,00	Dishub
4.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perhubungan									3.054,00		3.604,00		4.024,00		4.514,00		17.688,00	Dishub
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perhubungan									2.600,00		3.400,00		1.850,00		1.700,00		10.050,00	Dishub
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
6.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan									200,00		200,00		200,00		250,00		1.021,00	Dishub
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dishub
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																			
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi									38.148,00		25.282,40		27.432,55		14.891,95		103.616,50	
		1. Meningkatnya Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi	1. Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi	aplikasi	n/a	n/a			11,00		5,00		6,00		4,00		26,00		Diskominfo
		2. Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	2. Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	buah	n/a	n/a			159,00		154,00		157,00		145,00		615,00		Diskominfo
2.	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi	1. Meningkatnya sarana infrastruktur layanan informasi publik	1. Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	unit	n/a	n/a			82,00	16,20	79,00	22,50	80,00	102,25	82,00	122,50	81,00	263,45	Diskominfo
3.	Program Pengembangan Desa Teknologi, informasi dan komunikasi	1. Meningkatnya Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)	1. Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)	desa	n/a	n/a			61,00	5.200,00	61,00	5.200,00	61,00	5.200,00	45,00	4.950,00	228,00	20.550,00	Diskominfo
4.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Komunikasi dan Informatika									1.245,00		1.300,00		1.415,50		1.427,50		5.641,50	Diskominfo
		1. Meningkatnya Pemenuhan	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH										
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.											
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.											
		Pelayanan Dasar Perkantoran	2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		100,00		Diskominfo									
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Komunikasi dan Informatika								915,00		950,00		980,00		1.070,00		4.012,50		Diskominfo										
			1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo										
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo										
6.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika								41,00		44,00		67,35		98,00		269,35		Diskominfo										
			1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo										
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo										
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Diskominfo										
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																													
1.	Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Keluarga Miskin	1. Meningkatnya pendapatan usaha mikro keluarga miskin	1. Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin	persen	N/A	N/A			3,00		640,00		3,00		704,00		3,00		851,84		3,00		2.970,24		Dinas KUMKM				
2.	Program Pengembangan Usaha Mikro	1. Meningkatnya skala pelaku usaha Mikro	1. Peningkatan Volume pelaku Usaha Mikro	persen	N/A	N/A			5,00		2.334,40		5,00		961,40		5,00		1.057,54		5,00		1.163,29		5,00		5.516,63		Dinas KUMKM
3.	Program Pengembangan Produk Lokal berbasis Usaha Mikro										3.080,00				1.188,00				1.306,80				1.437,48				7.012,28		Dinas KUMKM
			1. Jumlah Produk berbahan baku lokal yang dikembangkan	produk	n/a	n/a			10,00		580,00		10,00		638,00		10,00		701,80		10,00		771,98		40,00		2.691,78		Dinas KUMKM
		1. Meningkatnya daya saing Produk lokal	2. Jumlah sarana prasarana penunjang pemasaran produk lokal usaha mikro	unit	N/A	N/A			1,00		2.500,00		1,00		550,00		1,00		605,00		1,00		665,50		4,00		4.320,00		Dinas KUMKM
4.	Program Optimalisasi Koperasi										95.347,10				202.379,41				202.617,35				202.879,09				703.222,95		Dinas KUMKM
		1	1. Persentase Koperasi Aktif	persen	n/a	280			2,00		5.137,10		2,00		2.148,41		2,00		2.363,25		2,00		2.599,58		304,00		12.248.337,00		Dinas KUMKM
		2.	2. Jumlah koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan	koperasi	n/a	133			10,00		210,00		10,00		231,00		10,00		254,10		10,00		279,51		173,00		974.610,00		Dinas KUMKM
		3.	3. Koperasi yang melaksanakan RAT	koperasi	164	164			164,00		90.000,00		164,00		200.000,00		164,00		200.000,00		164,00		200.000,00		164,00		690.000,00		Dinas KUMKM
5.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi										1.720.000,00				1.782.000,00				1.960.200,00				2.156.220,00				7.618.420,00		Dinas KUMKM
		1	1. Meningkatnya Jumlah Koperasi baru	Koperasi	n/a	12			10,00		1.670.000,00		10,00		1.727.000,00		10,00		1.899.700,00		10,00		2.089.670,00		52,00		7.386.370,00		Dinas KUMKM
		2	2. Jumlah peningkatan volume Usaha Koperasi	Koperasi	n/a	n/a			5,00		50.000,00		5,00		55.000,00		5,00		60.500,00		5,00		66.550,00		20,00		232.050,00		Dinas KUMKM

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH					
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.						
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.						
6.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										862.538,00		948.792,00		1.043.671,00		1.158.038,00		4.013.038,00	Dinas KUMKM				
		1. Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										166.000,00		182.800,00		200.860,00		220.948,00		770.406,00					
		1. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
8.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										64.000,00		70.400,00		77.440,00		95.184,00		307.024,00	Dinas KUMKM				
		1. Meningkatkan penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	Dinas KUMKM				
<b>PENANAMAN MODAL</b>																								
1.	Program Reformasi Birokrasi Perizinan										656.000,00		807.050,00		729.153,00		895.988,00		3.088.190,00	DPMPPTSP				
		1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Poin	79,74	80,05			82,92				85,40				87,96		90,60	DPMPPTSP				
			2. Regulasi Pelayanan Perizinan	Regulasi	6	6			2,00				2,00				2,00		8,00	DPMPPTSP				
			3. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu	persen	100	100			100,00				100,00				100,00		100,00	DPMPPTSP				
2.	Program Percepatan Investasi Daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan Daerah	1. Nilai Realisasi Investasi	milyar	629,364 M	1,288 T			380,00		1.147,50		399,00		1.244,13		419,00		1.349,51	440,00	1.464,47	1.638,00	5.205,61	DPMPPTSP
3.	Program Pengendalian Investasi	1. Meningkatnya Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	1. Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	persen	100	100			100,00		385,00		100,00		423,50		100,00		465,85	100,00	512,44	100,00	1.786,79	DPMPPTSP
4.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Penanaman Modal										1.524,85		1.332,94		1.609,55		1.500,06		5.967,39	DPMPPTSP				

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
		1. Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMPTSP		
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMPTSP		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Penanaman Modal									538,75		291,09		517,16		345,70		1.692,70	DPMPTSP		
		1. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00	468,00	100,00	212,30	100,00	433,53	100,00	256,88	100,00	1.370,71	DPMPTSP		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00	70,75	100,00	78,79	100,00	83,63	100,00	88,81	100,00	321,99	DPMPTSP		
6.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal									48,90		53,79		59,17		65,09		226,95	DPMPTSP		
		1. Meningkatkan penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00	26,50	100,00	29,15	100,00	32,07	100,00	35,27	100,00	122,99	DPMPTSP		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00	15,90	100,00	17,49	100,00	19,24	100,00	21,16	100,00	73,79	DPMPTSP		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	persen	100	100			100,00	6,50	100,00	7,15	100,00	7,87	100,00	8,65	100,00	30,17	DPMPTSP		
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>																					
1.	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	1. Meningkatnya Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga	1. Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga	prestasi	54	38			55	2.500,00	57	2.550,00	57	2.600,00	58	2.700,00	58	12.820,00	Dispora		
2.	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga									5.155,50		5.171,00		5.212,05		5.773,71		5.773,71	Dispora		
		1. Meningkatnya Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	1. Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Jiwa	650	700			1.200		1.300		1.400		1.500		1.500		Dispora		
		2. Meningkatnya Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlit yang dibina	2. Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlit yang dibina	Jiwa	13	13			58		70		90		110		373		Dispora		
		3. Meningkatnya Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	3. Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Kompetisi	12 jenis 25 cabang	12 jenis 26 cabang			17 jenis 30 cabang		18 jenis 31 cabang		20 jenis 32 cabang		22 jenis 33 cabang		22 jenis 33 cabang		Dispora		
3.	Program Pengembangan dan Keresian Kebijakan Pemuda									1.068,00		1.090,00		1.167,00		1.385,00		5.735,00	Dispora		
		1. Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi	1. Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi	Jiwa	1	1			3	310,00	3	310,00	4	335,00	5	350,00	17	1.605,00	Dispora		



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
		2. Meningkatnya Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	2. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	45	45			48	178,00	50	180,00	55	182,00	60	185,00	60	900,00	Dispora
4.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Meningkatnya Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra	1. Peningkatan Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra	Jiwa	34	34			68	580,00	68	600,00	68	650,00	68	850,00	68	3.230,00	Dispora
5.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda								935,00		955,00		970,00		980,00		4.765,00	Dispora	
		1. Meningkatnya Jumlah Pemuda Berwirausaha	1. Jumlah Pemuda Berwirausaha	Jiwa	20	20			50	655,00	100	670,00	150	680,00	200	685,00	300	3.340,00	Dispora
		2. Meningkatnya Pemahaman Pemuda Berwirausaha	2. Peningkatan Pemahaman Pemuda Berwirausaha	Jiwa	20	20			200	280,00	300	285,00	400	290,00	500	295,00	500	1.425,00	Dispora
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga								54.241,00		53.390,00		53.400,00		53.405,00		268.117,00	Dispora	
		1. Meningkatnya Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	1. Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	Unit	3	6			3	52.750,00	2	52.750,00	2	52.750,00	1	52.750,00	9	263.750,00	Dispora
		2. Meningkatnya Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	2. Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit	1	2			2	856,00	-		2	856,00	-		4	3.424,00	Dispora
		3. Meningkatnya Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga	3. Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga	Unit	7	7			5	635,00	4	640,00	2	650,00	7	655,00	28	3.205,00	Dispora
7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepemudaan dan Olahraga								783,00		790,00		800,00		810,00		3.800,00	Dispora	
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kepemudaan dan Olahraga								650,00		655,00		665,00		680,00		680,00	Dispora	
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga								101,50		103,50		106,00		108,00		108,00	Dispora	
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100	100			100		100		100		100		100	Dispora	
<b>STATISTIK</b>																			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								2.400,00		1.312,50		1.375,00		2.437,50		7.525,00	Diskominfo	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH											
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.														
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.														
		1. Meningkatnya Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik	1. Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik	unit	5,00	5,00			5,00		5,00			5,00		5,00		20,00		Diskominfo												
		2. Meningkatnya Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	2. Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	dokumen	10	10			10		10			10		10		41		Diskominfo												
<b>KEBUDAYAAN</b>																																
1.	Program Peningkatan Prestasi Seni Budaya	1. Meningkatnya Persentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya	1. Presentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya	persen	20	20			20,00		100,00		20,00		150,00		20,00		225,00		300,00		100,00		775,00		Disparbud					
2.	Program Pengembangan Pelestarian Nilai Budaya									1.200,00				1.410,00					1.650,00		1.900,00				6.920,00							
		1. Meningkatnya upaya pelestarian seni dan budaya	1. Jumlah event seni dan budaya	kali	2	2			37,00					41,00					45,00		50,00				189,00		Disparbud					
			2. Jumlah Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	100	100			125,00					150,00					175,00		200,00				750,00		Disparbud					
<b>PERPUSTAKAAN</b>																																
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun	1. Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun	poin	100	100			30.000,00		5.857,23		60.000,00		5.926,02		100.000,00		6.036,02		120.000,00				6.150,92		325.000,00		24.186,73		Diskapus	
<b>KEARSIPAN</b>																																
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	1. Meningkatnya Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	persen	100	100			100,00		691,000		100,00		829,200		100,00		856,840		1.028,208				100,00		3.511,048		Diskapus			
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Meningkatnya Persentase arsip statis yang diselamatkan	1. Persentase arsip statis yang diselamatkan	persen	100	100			100,00		1.541,100		100,00		1.571,000		100,00		1.697,000		1.720,000				100,00		6.663,990		Diskapus			
3.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kearsipan dan Perpustakaan									1.248,000				1.335,000					1.380,000		1.510,000					1.510,000		1.510,000		Diskapus		
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100	100			100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				Diskapus			
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	Persen	100	100			100				100				100				100				100				Diskapus			
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kearsipan dan Perpustakaan									500,000				5.560,000					1.660,000		560,000					8.330,000		8.330,000		Diskapus		
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	Persen	100	100			100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				Diskapus			
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100	100			100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				Diskapus			
5.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan									324,500				324,500					324,500		324,500					324,500		1.305,500		1.305,500		Diskapus
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100	100			100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00		Diskapus	
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100	100			100,00				100,00				100,00				100,00				100,00				100,00		Diskapus	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH								
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.									
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.									
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		Diskapus							
<b>URUSAN PILIHAN</b>																											
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																											
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan																										
		1. Meningkatnya produksi hasil perikanan	1. Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	1412	1243			24,86			24,86			24,86			24,86		1.367,09	Distankan						
			2. Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	4157	3868			77,36			77,36			77,36			77,36		4.254,95	Distankan						
			3. Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	1662	1427			28,55			28,55			28,55			28,55		1.570,13	Distankan						
			4. Jumlah Produksi Ikan Gurame	Ton	890	853			17,07			17,07			17,07			17,07		938,79	Distankan						
2.	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Perikanan																				4.600						
		1. Meningkatnya ekonomi masyarakat	1. Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	kelompok	21	23			3			3			3			3		38	Distankan						
			2. Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Rupiah	n/a	23312000			466.240			466.240			466.240			466.240		466.240,00	Distankan						
<b>PARIWISATA</b>																											
1.	Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata layak kunjung	1. Meningkatnya Jumlah destinasi wisata layak kunjung	1. Jumlah destinasi wisata layak kunjung	unit	2	2			2,00			4.338,00			1,00			39.930,00		15.880,00	1,00	10.130,00	8,00	77.690,58	Disparbud		
2.	Program Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif																										
		1. Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif	1. Jumlah Kunjungan Event	orang	N/A	N/A			5.000,00			5.000,00			5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00	Disparbud	
			2. Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya	unit	N/A	N/A			1,00			1,00			1,00			1,00		1,00					4,00	Disparbud	
			3. Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner	unit	N/A	N/A			2,00			2,00			2,00			2,00		2,00					8,00	Disparbud	
3.	Program Pengembangan Desa Wisata	1. Meningkatnya Jumlah Desa Wisata	1. Jumlah Desa Wisata	desa	1	1			1,00			334,88			1,00			368,37		405,21	1,00	445,73	4,00	1.777,45	Disparbud		
4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																										
		1. Meningkatnya jumlah daya tarik yang dipromosikan	1. Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan	persen	n/a	n/a			5,00			5,00			5,00			5,00		5,00					5,00	Disparbud	
			2. Peningkatan PAD	persen	n/a	n/a			15,00			15,00			15,00			15,00		15,00					15,00	Disparbud	
5.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata																										
		1. Meningkatnya Jumlah Pokdarwis	1. Jumlah Pokdarwis	kelompok	4	5			15,00			18,00			20,00			22,00		85,00					85,00	Disparbud	
		2. Meningkatnya Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan	2. Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan	MOU	1	2			2,00			2,00			2,00			2,00		8,00					8,00	Disparbud	
		3. Meningkatnya Standarisasi/Sertifikasi Pariwisata	3. Sertifikasi/standarisasi Pariwisata	buah	n/a	n/a			1,00			1,00			1,00			1,00		4,00					4,00	Disparbud	
6.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pariwisata dan Kebudayaan																										
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00						100,00	Disparbud
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	Persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00						100,00	Disparbud
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pariwisata dan Kebudayaan																										
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00		100,00						100,00	Disparbud

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00			100,00			100,00			Disparbud
8.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata dan Kebudayaan									96,70		111,30		128,00		147,10		567,10			
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			Disparbud
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			Disparbud
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100	100			100,00			100,00		100,00		100,00		100,00			Disparbud
<b>PERTANIAN</b>																					
1.	Program Pemberdayaan Petani Miskin	1. Meningkatnya jumlah keluarga petani miskin penerima manfaat yang meningkat pendapatannya	1. Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	N/A	N/A			275	1.094.375,00	275	1.109.500,00	275	1.194.625,00	275	1.249.750,00	1.250	5.548.250			Distankan
2.	Program Peningkatan Produksi Hortikultura									3.602,40		3.977,10		4.405,81		5.066,26		20.341,57			Distankan
		1. Meningkatnya produksi hasil tanaman hortikultura	1. Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)	%	37705	31981			1,50		1,50		1,50		1,50		8			Distankan	
			2. Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)	%	12452	13053			1,50		1,50		1,50		1,50		8			Distankan	
			3. Persentase peningkatan produksi Kentang (Ton)	%	2607	3601			1,00		1,00		1,00		1,00		5			Distankan	
			4. Persentase peningkatan produksi Mangga (Ton)	%	60008	44755			1,50		1,50		1,50		1,50		8			Distankan	
			5. Persentase peningkatan produksi Jambu Biji (Ton)	%	5369	3618			1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			Distankan	
			6. Persentase peningkatan produksi Durian (Ton)	%	5151	11263			1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			Distankan	
			7. Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Hortikultura	Unit	211	371			15,00		15,00		15,00		15,00		446,00			Distankan	
			8. Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura	meter	N/A	N/A			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		7.500,00			Distankan	
			9. Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura	meter	N/A	N/A			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		5.000,00			Distankan	
3.	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan									20.754,47		14.540,60		8.012,91		7.760,59		71.261,36			Distankan
		1. Meningkatnya produksi hasil tanaman hortikultura	1. Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)	%	151.646	117.598			3		2		1		1		10,00			Distankan	
			2. Persentase peningkatan produksi Padi (Ton)	%	672.294	667.110			3		2		1		1		10,00			Distankan	
			3. Persentase peningkatan produksi Kedelai (Ton)	%	916	2264			3		2		1		1		9,99			Distankan	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.				
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.				
			4. Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	Unit	120	195			25,00		25,00		25,00		25,00		320,00		Distankan			
			5. Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	meter	8750	9500			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		17.000,00		Distankan			
			6. Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	meter	N/A	3000			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		8.000,00		Distankan			
4.	Program Peningkatan Produksi Perkebunan									1.665,75		1.692,10		1.792,30		1.924,73		8.359,88	Distankan			
		1. Meningkatnya produksi hasil tanaman hortikultura	1. Persentase peningkatan produksi Kopi (Ton)	%	831	218			2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		Distankan			
			2. Persentase peningkatan produksi Cengkeh (Ton)	%	662	453			2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		Distankan			
			3. Persentase peningkatan produksi Teh (Ton)	%	1261	341			1,50		1,50		1,50		1,50		7,50		Distankan			
			4. Persentase peningkatan produksi Tembakau (Ton)	%	1107	839			2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		Distankan			
			5. Persentase peningkatan produksi Tebu (Ton)	%	39334	149			1,50		1,50		1,50		1,50		7,50		Distankan			
			6. Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Perkebunan	Unit	1	2			10,00		10,00		10,00		10,00		52,00		Distankan			
			7. Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi perkebunan	meter	N/A	N/A			500,00		500,00		500,00		500,00		2.500,00		Distankan			
5.	Program Peningkatan Produksi Peternakan									1.882,50		1.882,50		1.882,50		1.882,50		9.413	Distankan			
		1. Meningkatnya produksi hasil peternakan	1. Persentase peningkatan produksi daging sapi (Ton)	%	2159	2210			2,50		2,50		2,50		2,50		12,50		Distankan			
			2. Persentase peningkatan produksi daging domba (Ton)	%	1535	1535			2,50		2,50		2,75		2,75		13,00		Distankan			
			3. Persentase peningkatan produksi daging ayam pedaging (Ton)	%	24352	24358			2,50		2,50		2,75		2,75		13,00		Distankan			
			4. Persentase peningkatan produksi telur (Ton)	%	3367	3370			2,50		2,50		2,50		2,50		12,50		Distankan			
			5. Persentase peningkatan produksi susu sapi (Ribu liter)	%	1388	1392			2,50		2,50		2,50		2,50		12,50		Distankan			
6.	Program Peningkatan Mutu Hasil Pertanian									1.878,00		1.930,80		1.988,88		2.052,77		9.680	Distankan			
		1. Meningkatnya mutu hasil dan daya saing produk pertanian	1. Jumlah Pelaku Usaha Tanaman Pangan penerima manfaat	Kelompok	198	198			50,00		50,00		50,00		50,00		448,00		Distankan			
			2. Jumlah Pelaku Usaha Hortikultura dan Perkebunan penerima manfaat	Kelompok	201	221			4,00		4,00		4,00		4,00		241,00		Distankan			
			3. Jumlah Pelaku Usaha Peternakan penerima manfaat	Kelompok	43	43			13,00		13,00		13,00		13,00		108,00		Distankan			
7.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1. Meningkatnya jumlah kelompok tani tembakau yang mendapat fasilitasi dari dana DBCHT	1. Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang mendapat Fasilitasi dari Sumber dana DBCHT	Kelompok	n/a	n/a			10		5.000,00		10,00		1.000,00		10,00		1.000,00	46,00	9.200,00	Distankan
8.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pertanian										2292673		1609054		1659054		1609054		8.383.524	Distankan		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.								
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.								
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pertanian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pertanian									520.363		603.981		648.961		1.265.439		3.211.186		Distankan						
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pertanian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
			2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
10.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pertanian									161.000		125.100		134.610		144.571		670.281		Distankan						
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pertanian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pertanian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pertanian	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Distankan					
<b>PERDAGANGAN</b>																										
1.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan	1. Meningkatnya infrastruktur perdagangan yang dibangun	1. Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	unit	44	44			4,00		31.400,00		5,00		100,50		5,00		97.600,00		4,00	109,45	64,00	136.309,95	Dinas Perdagangan	
2.	Program Peningkatan Kualitas sarana Perdagangan	1. Meningkatnya nilai ekspor	1. Meningkatnya nilai ekspor	persen	20	30			20,00		2.970,00		20,00		2.870,00		20,00		2.870,00		20,00	2.870,00	100,00	12.772,01	Dinas Perdagangan	
3.	Program Pengembangan Kemitraan pengelolaan pasar	1. Meningkatnya pertumbuhan dan kemitraan pasar modern/desa	1. Persentase pertumbuhan pasar modern dan desa	persen	3	12			5,00		1.675,00		5,00		1.475,00		5,00		1.475,00		5,00	1.475,00	37,00	7.375,00	Dinas Perdagangan	
4.	Program pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan perdagangan	1. Pengendalian dan pengawasan perdagangan	kali	96	96			96,00		4.481,42		96,00		3.981,39		96,00		3.981,39		96,00	3.981,39	480,00	21.757,00	Dinas Perdagangan	
5.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perdagangan									1.286,00		1.286,00		1.286,00		1.286,00		1.286,00		1.286,00		1.286,00		6.480,00		
		1. Meningkatnya pemenuhan dasar perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perdagangan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perdagangan
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Perdagangan
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perdagangan									800,00		800,00		800,00		800,00		2.400,00		800,00		800,00		2.400,00		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.					
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perdagangan	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00			Dinas Perdagangan		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan	unit	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00			Dinas Perdagangan		
7.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan								135,00		135,00			135,00		135,00		675,00			
		1. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perdagangan	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00			Dinas Perdagangan		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00			Dinas Perdagangan		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00			Dinas Perdagangan		
<b>PERINDUSTRIAN</b>																					
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										934,60		1.084,05		1.130,87		1.306,24		4.455,76	Disnakerin	
		1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persen	9,34	2,64			2,50		2,50			2,50		2,50		10,00		Disnakerin	
		2. Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya	2. Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya saing	Unit IKM	N/A	N/A			320,00		320,00			320,00		320,00		1.280,00		Disnakerin	
		3. Meningkatnya kompetensi Pelaku IKM	3. Meningkatnya kompetensi Pelaku IKM	orang	N/A	N/A			30,00		50,00			30,00		50,00		160,00		Disnakerin	
2.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial										824,87		2.600,00		-	-	-	-	3.424,87		
		1. Meningkatnya Jumlah jumlah sentra IKM	1. Jumlah Sentra IKM	unit	1	1			-		1,00		-	-	-	-	-	1,00		Disnakerin	
		2. Meningkatnya jumlah Dokumen Rencana Pengembangan	2. Dokumen Rencana Pengembangan	dokumen	1	1			2,00		-		-	-	-	-	-	2,00		Disnakerin	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																			
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>																			
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	1. Persentase program strategis RPJMD yang terjabarkan dalam RENSTRA	persen	100	100												Bappelitbangda	
			2. Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan RENJA	persen	100	100			100,00	708,00	100,00	850,00	100,00	1.020,00	100,00	1.223,00	100,00	433,00	Bappelitbangda
			3. Persentase program RPJMD yang selaras dengan RKPD	persen	100	100			67,00	280,00	67,00	336,00	67,00	403,00	100,00	584,00	100,00	1.903,00	Bappelitbangda
			Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100			100	216,00	100	259,00	100	311,00	100	373,00	100	1.339,00	Bappelitbangda
		1. Meningkatnya Pencapaian target Pembangunan	1. Rata-rata Capaian IKU Pemerintah Daerah	persen	n/a	100				100		100		100		100		Bappelitbangda	
2.	Program Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah koordinasi bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase program strategis RPJMD yang terjabarkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang	persen	100	100												Bappelitbangda	
			2. Persentase Kegiatan RKPD yang selaras dengan RENJA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda
			3. Persentase program RPJMD yang selaras dengan RKPD Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda
			4. Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda
		2. Meningkatnya target pembangunan Perangkat daerah koordinasi bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	5. Rata-rata Capaian IKU Perangkat Daerah koordinasi bidang Perencanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat	persen	n/a	100				100		100		100		100		Bappelitbangda	
3.	Program Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah koordinasi bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur							927,00		630,00		250,00		300,00		2.107,00		
			1. Persentase program strategis RPJMD yang terjabarkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	Persen	100	100			100	1.440,00	100	1.005,00	100	1.005,00	100	550,00	100	4.760,00	Bappelitbangda
		2. Persentase Kegiatan RKPD yang selaras dengan RENJA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
			3. Persentase program RPJMD yang selaras dengan RKPD Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
		2. Meningkatnya target pembangunan Perangkat daerah koordinasi bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	4. Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
			5. Rata-rata Capaian IKU Perangkat Daerah koordinasai bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur	persen	n/a	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
4.	Program Perencanaan Ekonomi Daerah									368,00		300,00		360,00		435,00		1.673,00		Bappeitbangda	
		1. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah koordinasi bidang perencanaan ekonomi	1. Persentase program strategis RPJMD yang terjabarkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian	Persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
			2. Persentase Kegiatan RKPD yang selaras dengan RENJA Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian	Persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
			3. Persentase program RPJMD yang selaras dengan RKPD Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian	persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
			4. Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
		2. Meningkatnya target pembangunan Perangkat daerah koordinasi bidang Perencanaan Perekonomian	5. Rata-rata Capaian IKU Perangkat Daerah koordinasai bidang Perencanaan Perekonomian	Persen	n/a	100			100			100			100			100		Bappeitbangda	
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	1. Meningkatnya jumlah kajian dan inovasi yang dimanfaatkan	1. Persentase dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan	persen	100	100			100,00	2.779,00	100,00	4.330,00	100,00	4.535,00	100,00	3.781,00	100,00	17.260,00		Bappeitbangda	
6.	Program perencanaan Penataan ruang	1. Meningkatnya Persentase dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	1. Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti	persen	n/a	100			100,00	500,00	100,00		100,00		100,00		800,00		Bappeitbangda		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
7.	Program pengendalian Pemanfaatan penataan ruang	1. Meningkatnya Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang	1. Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang	persen	n/a	100			100,00	70,00	60,00	1.100,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	1.570,00	Bappelitbangda		
8.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi	1. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100			100,00	180,00	100,00	216,00	100,00	259,00	100,00	311,00	100,00	1.116,00	Bappelitbangda		
9.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									1.667,00		1.816,00		1.987,00		2.182,00		9.079,00	Bappelitbangda		
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda		
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda		
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									348,00		365,00		384,00		403,00		1.708,00	Bappelitbangda		
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100		100		100		100		100		Bappelitbangda		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bappelitbangda		
11.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									68,00		102,00		98,00		118,00		440,00	Bappelitbangda		
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bappelitbangda		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bappelitbangda		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bappelitbangda		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			
<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																			
1.	Program pembinaan dan penegakan disiplin ASN																		
		1. Meningkatnya Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	1. Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	persen	100	100													
		2. Meningkatnya Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%	2. Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%	persen	93	93													
		3. Meningkatnya Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%	3. Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%	persen	90	90													
2.	Program peningkatan kompetensi Manajerial ASN																		
		1. Meningkatnya Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	1. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	persen	62,24	71,10													
3.	Prorgam pengembangan karier ASN																		
		1. Meningkatnya Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu	1. Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu	persen	100	100													
4.	Program pengelolaan gaji dan kesejahteraan aparaturn																		
		1. Meningkatnya Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	1. Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	n/a	n/a													
5.	Program peningkatan kompetensi ASN																		
		1. Meningkatnya Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	63	70													
6.	Program Pengelolaan Data Informasi Kepegawaian ASN																		
		1. Meningkatnya Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN	1. Tingkat Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN	persen	90	90													
7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100	100			100,00	850,00	100,00	900,00	100,00	950,00	100,00	1.100,00	100,00	4.538,60	BKPSDM
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100			100,00	1.400,00	100,00	1.600,00	100,00	1.750,00	100,00	2.000,00	100,00	8.042,36	BKPSDM
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unit	138	138			140,00	180,00	145,00	200,00	150,00	220,00	150,00	250,00	150,00	9.340,00	BKPSDM
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									300,00		400,00		450,00		480,00		1.793,50	BKPSDM
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100	100			100,00	300,00	100,00	400,00	100,00	450,00	100,00	480,00	100,00	1.793,50	BKPSDM
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									31,50		35,50		40,25		45,70		176,64	BKPSDM
		1. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100	100			100,00	6,50	100,00	7,50	100,00	8,50	100,00	9,50	100,00	37,78	BKPSDM
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100	100			100,00	16,00	100,00	17,50	100,00	19,25	100,00	21,50	100,00	88,72	BKPSDM
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100	100			100,00	2,50	100,00	3,00	100,00	3,50	100,00	4,20	100,00	15,00	BKPSDM
			4. Tingkat Akurasi, Kecamatan dan Kecamatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100	100			100	6,50	100	7,50	100	9,00	100	10,50	100	35,15	
<b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>																			
1.	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Meningkatnya opini BPK terhadap LKPD	1. Opini BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WTP			WTP	3.265,98	WTP	3.973,00	WTP	4.743,00	WTP	1.474,00	WTP	17.281,00	BKAD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		Target	Juta Rp.
2.	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	1. Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	persen	2	2			2,00	1.051,68	2,00	2.457,00	2,00	2.923,00	2,00	3.400,00	2,00	9.831,00	BKAD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	1. Meningkatnya persentase kenaikan total pendapatan daerah	1. Persentase Kenaikan total pendapatan daerah	persen	100	100			100,00	10.434,95	100,00	7.083,00	100,00	7.320,00	100,00	8.067,00	100,00	24.374,00	BKAD
4.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Keuangan dan Aset Daerah								4.208,01			3.109,00		3.419,00		3.761,00		13.548,00	BKAD
		1. Meningkatnya Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	1.186,74	100,00	1.306,00	100,00	1.436,00	100,00	1.580,00	100,00	5.508,00	BKAD
		2. Meningkatnya Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	100	100			100,00	1.638,72	100,00	1.803,00	100,00	1.983,00	100,00	2.181,00	100,00	8.040,00	BKAD
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Keuangan dan Aset Daerah									1.382,55		1.247,00		1.371,00		1.509,00		5.700,00	BKAD
			1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	716,61	100,00	514,00	100,00	565,00	100,00	622,00	100,00	2.416,00	BKAD
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan	2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	665,94	100,00	733,00	100,00	806,00	100,00	887,00	100,00	3.284,00	BKAD
6.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Keuangan dan Aset Daerah									68,70		90,00		90,00		99,00		351,00	BKAD
			1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	28,88	100,00	32,00	100,00	35,00	100,00	39,00	100,00	135,00	BKAD
		1. Meningkatnya integritas dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	39,82	100,00	52,00	100,00	49,00	100,00	53,00	100,00	193,00	BKAD
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100	100			100,00	0,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	23,00	BKAD
<b>FUNGSI LAINNYA</b>																			
<b>SETDA</b>																			
1.	Program Peningkatan Nilai Nilai Keagamaan									4.211		4.643		5.094		5.570		22.744	
			1. Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif	persen	16	16			30,00		35,00		40,00		45,00		45,00		Sosmas
			2. Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi	Persen	31	31			45,00		50,00		55,00		60,00		60,00		Sosmas
			3. Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi	persen	62	65			71,00		74,00		77,00		80,00		80,00		Sosmas
			4. Persentase tokoh agama yang terfasilitasi	persen	32	32			71,00		74,00		77,00		80,00		80,00		Sosmas
2.	Program Peningkatan Kualitas Kabupaten Sehat	1. Meningkatnya predikat kabupaten sehat	1. Tingkat Capaian Kabupaten Sehat	Predikat	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Padapa			Swasti Saba Padapa	2.233,00	Swasti Saba Padapa	2.456,30	Swasti Saba Wiwirda	2.695,60	Swasti Saba Wiwirda	2.952,50	100	12.057	Sosmas
3.	Program Peningkatan Nilai Nilai Sosial Budaya									3.567,75		3.925		4.295,98		4.683,58		19.907	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					KONDISI AWAL		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.	
					2017	2018	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	
			1. Hari Jadi Pemerintah Daerah dan Nasional yang diperingati	Event	3	3			3		3		3		3		100		Sosmas
		1. Meningkatnya kesadaran terhadap nilai kebangsaan dan sosial budaya	2. Kebijakan Lingkup PMKS	jumlah	4	4			1 Regulasi 4 Stimulan PMKS		4 Stimulan PMKS		4 Stimulan PMKS		4 Stimulan PMKS		100		Sosmas
4.	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	1. Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	ST	ST	ST			ST	1.753,20	ST	1.928,52	ST	2.121,37	ST	2.333,51	ST	8.411	Tapem
5.	Program Pembinaan Kewilayahan									2.061,30		2.267,43		1.893,02		2.077,42		9.370	
		1. Meningkatnya kinerja kecamatan dan desa	1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persen	100	100			100		100		100		100		100		Tapem
			2. Meningkatnya Kinerja Desa	Persen	100	100			100		100		100		100		100		Tapem
6.	Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah	1. Tingkat Kepuasan Publik	Persen	n/a	51 OPD Nilai B			92,98	803,50	94,74	884	96,49	966,87	100,00	1.052,81	100	4.207	Organisasi
7.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan									739,56		814		887,47		960,43		4.296	
		1. Meningkatnya kesesuaian penataan organisasi dan kelembagaan	1. Tingkat Kesesuaian Penataan Organisasi dengan Peraturan	Persen	n/a	81			7.60		11.40		15.20		19,00		100,00		Organisasi
			2. Persentase Kelembagaan Menunjang Visi dan Misi	Persen	n/a	90.70			3.73		5.58		7.44		9.30		100,00		Organisasi
8.	Program Penataan dan Regulasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya kesadaran terhadap tatanan hukum dan peraturan	1. Jumlah Peraturan Daerah yang di Undangkan	peraturan	n/a	n/a			352,00	435,20	352,00	479	352,00	526,59	352,00	579,25	352,00	2.020	Hukum
			2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum dan Ham	Persen	n/a	n/a			60,00	524,70	63,00	577	66,00	634,89	69,00	698,38	69,00	2.435	Hukum
			3. Persentase layanan informasi peraturan perundang-undangan melalui website dan sosialisasi	Persen	n/a	n/a			100,00	781,45	100,00	860	100,00	945,55	100,00	1.040,11	100,00	3.627	Hukum
			4. Persentase penanganan masalah hukum litigasi dan Litigasi	Persen	n/a	n/a			60,00	524,70	63,00	577	66,00	634,89	69,00	698,38	69,00	2.435	Hukum
9.	Program Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	1. Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa	1. Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan	Persen	70	80			100,00	2.373,00	100,00	2.511,30	100,00	2.747,60	100,00	2.992,70	100,00	11.305	LPBJ
10.	Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan	1. Meningkatnya kinerja BUMD	1. Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD	Persen	n/a	4,03 Milyar			10,00		10,00		10,00		10,00		50,00		Ekbang
		2. Meningkatnya keberhasilan pembangunan	2. Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Ekbang
11.	Program Fasilitas Pimpinan Daerah	1. Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan	1. Tingkat Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Persen	100	100			100,00	6.002,56	100,00	6.107,81	100,00	6.663,07	100,00	7.218,32	100,00	29.121	Setda
12.	Program Keprotokolan	1. Meningkatnya layanan keprotokolan	1. Tingkat Kesuksesan Acara Pimpinan	persen	100	100			100,00	650,25	100,00	715,28	100,00	780,30	100,00	845,33	100,00	3.641	Protokolier
13.	Program Pengelolaan Informasi Daerah	1. Meningkatnya pengelolaan informasi daerah	1. Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasikan dan Terpublikasikan	persen	100	100			100,00	2.111,30	100,00	2.322,45	100,00	2.533,56	100,00	2.762,62	100,00	10.295	Protokolier
14.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Lingkup Sekretariat Daerah									7.139,13		7.843,87		8.548,61		9.163,35		34.542	
		1. Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Umum
			3. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	50	50			70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		Umum
15.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah									3.584,10		3.584,10		3.584,10		3.584,10		3.584	
		1. Meningkatnya kinerja aparatur lingkup sekretariat daerah	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah	persen	50	50			70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		Keuangan

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.						
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		Umum				
16.	Program Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Lingkup Sekretariat Daerah										212,50		234		255,00		276,25	1.227				
		1. Meningkatnya pengelolaan perencanaan evaluasi dan pelaporan	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		Keuangan				
			3. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		Keuangan				
			4. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00			100,00		100,00		Keuangan				
<b>INSPEKTORAT</b>																						
1	Program Pembinaan dan Pengawasan										5.025		5.157		5.373		5.730	22.029				
		1. Meningkatnya Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A	1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A	persen	n/a	n/a			25		65,00		50		75,50		83,05	80	366,41	Inspektorat		
		2. Meningkatnya Persentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti	2. Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti	persen	n/a	60			80		1.005,00		85		1.106,00		1.217,00	100	1.339,00	100	4.786,55	Inspektorat
		3. Meningkatnya Level Maturitas SPIP	3. Level maturitas SPIP	Level	n/a	1,8			3,00		600,00		4,00		600,00		600,00	4,00	600,00	5,00	2.586,45	Inspektorat
		4. Meningkatnya Efektivitas fungsi pengawasan	4. Efektivitas fungsi pengawasan	Level	n/a	1,8			3,00		3354,62		4,00		3375,08		3472,59	4	3699,85	4,00	14.289,84	Inspektorat
2	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Inspektorat Kabupaten										2.078,05		2.275,86		2.503,44		2.753,78	10.481,75				
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Kabupaten	persen	100	100			100,00		888,85		100,00		977,74		1.075,51	100,00	1.183,06	100,00	4.463,58	Inspektorat
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00		1.189,20		100,00		1.298,12		1.427,93	100,00	1.570,72	100,00	6.018,17	Inspektorat
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Kabupaten										6.136,04		1.754,50		1.929,95		2.122,95	11.988,30				
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00		6.106,04		100,00		1.721,50		1.893,65	100,00	2.083,02	100,00	11.824,52	Inspektorat
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00		30,00		100,00		33,00		36,3	100,00	39,93	100,00	163,78	Inspektorat
4	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten										180,00		198,00		217,80		239,58	839,33				
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00		60,00		100,00		66,00		72,60	100,00	79,86	100,00	280,16	Inspektorat
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00		90,00		100,00		99,00		108,90	100,00	119,79	100,00	419,94	Inspektorat

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target	Juta Rp.
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		Target	Juta Rp.
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten	Persen	100	100			100,00	30,00	100,00	33,00	100,00	36,30	100,00	39,93	100,00	139,23	Inspektorat
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																			
1.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									15.638,69		20.330,30		26.430,22		34.358,21		108.787,19	Sekretariat DPRD
		1. Meningkatnya Persentase Perda yang disahkan	1. Persentase Perda yang disahkan	persen	45	64			75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Sekretariat DPRD
		2. Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Kajian ditata	2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian	dokumen	1	1			4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		Sekretariat DPRD
		3. meningkatkan Jumlah Cetakan dokumentasi hukum yang ditata	3. Jumlah Cetakan dokumentasi hukum	buku	39	39			39,00		39,00		39,00		39,00		195,00		Sekretariat DPRD
		4. Meningkatnya Frekuensi Fasilitasi Sosialisasi Perda	4. Frekuensi Fasilitasi Sosialisasi Perda	lokasi	5	5			5,00		5,00		5,00		5,00		25,00		Sekretariat DPRD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Derah									18.920,95		24.597,24		31.976,41		41.569,33		131.618,50	Sekretariat DPRD
		1. Meningkatnya Frekuensi Fasilitasi Tugas DORD Bidang Anggaran	1. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Anggaran	kali	5	5			5,00		5,00		5,00		5,00		25,00		Sekretariat DPRD
		2. Meningkatnya Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perd	2. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perda	bulan	12	12			12,00		12,00		12,00		12,00		60,00		Sekretariat DPRD
		3. Meningkatnya Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pengawasan	3. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Pengawasan	bulan	12	12			12,00		12,00		12,00		12,00		60,00		Sekretariat DPRD
		4. Meningkatnya Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	4. Frekuensi Fasilitasi Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	kali	3	3			3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		Sekretariat DPRD
3.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Lingkup Sekretariat DPRD									13.216,70		17.181,71		22.336,22		29.037,09		91.938,42	Sekretariat DPRD
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lingkup Sekretariat DPRD									2.843,11		3.696,04		4.804,85		6.246,30		19.777,30	Sekretariat DPRD
		1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pendukung Pelayanan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
5.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Lingkup Sekretariat DPRD									555,74		722,47		939,21		1.220,97		3.865,89	Sekretariat DPRD
		1. Meningkatkan penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Juta Rp.			
							Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.							
<b>KECAMATAN</b>																					
1.	Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Menurunnya Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	1. Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	persen	n/a	n/a			1,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	Kecamatan		
2.	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum								4.355,00			780,00		806,00		832,00		6.773,00	Kecamatan		
		1. Meningkatnya Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	1. Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	kali	n/a	n/a			26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		Kecamatan		
		2. Meningkatnya Jumlah Edukasi kebencanaan skala kecamatan	2. Jumlah Edukasi kebencanaan skala kecamatan	kali	n/a	n/a			26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		Kecamatan		
		3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak	3. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak	persen	n/a	n/a			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
3.	Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	1. Meningkatnya Jumlah potensi unggulan kecamatan	1. Jumlah potensi unggulan kecamatan	jenis	n/a	n/a			52,00	325,00	52,00	325,00	78,00	325,00	78,00	325,00	78,00	1.300,00	Kecamatan		
4.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	1. Meningkatnya Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	1. Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	n/a	n/a			26,00	260,00	26,00	260,00	26,00	260,00	26,00	260,00	104,00	1.040,00	Kecamatan		
5.	Program Peningkatan Peran Kecamatan	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	n/a	n/a			85,00	650,00	85,00	650,00	85,00	650,00	85,00	650,00	85,00	2.600,00	Kecamatan		
6.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	n/a	n/a			100,00	390,00	100,00	390,00	100,00	390,00	100,00	390,00	100,00	1.560,00	Kecamatan		
7.	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kecamatan								11.960,00		11.960,00		11.960,00		11.960,00		47.840,00		Kecamatan		
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
			2. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	Persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan								1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		7.200,00		Kecamatan		
		1. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Perkantoran	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kecamatan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
			2. Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
9.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan								1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		5.200,00		Kecamatan		
		1. Meningkatnya penyelenggaraan Penatausahaan administrasi perkantoran	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
			2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		
			3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah	persen	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan		

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka periode 2018-2023. IKU Kabupaten Majalengka disajikan pada Tabel 8.2. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini sebagaimana table 8.1.

Lalu untuk indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat IKU daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 8.3.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) pada RPJMD Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja



program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Secara umum, indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

1. **Aspek kesejahteraan masyarakat**, diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, Rasio Penduduk yang Bekerja, Indeks Gini, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.
2. **Aspek pelayanan umum**, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan (Urusan Wajib dan Pilihan) yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Pertanian, Pariwisata dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
3. **Aspek daya saing daerah**, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: pendapatan perkapita, Paritas Daya Beli, Ketaatan Terhadap RTRW, Jenis dan Jumlah per Bankan, Rasio lulusan S1/S2/S3, dan lain-lain.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 8.4.

Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka.

**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka  
Tahun 2018-2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	65,92	66,72	67,19	67,58	67,95	68,285	68,84	68,84
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,39	69,68	69,75	69,89	70,08	70,22	70,40	70,40
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,18	12,19	12,49	12,66	12,81	12,97	13,17	13,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,90	6,91	7,01	7,11	7,19	7,27	7,39	7,39
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.833	9.416	9.422	9.431	9.443	9.454	9.547	9.547
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,02	4,95	4,89	4,78	4,68	4,49	4,19	4,19
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	12,6	10,79	10,48	10,08	9,68	9,09	8,48	8,48
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,81	6,23	6,035	6,035	6,035	6,035	6,035	6,035
5.	Indeks Gini	poin	0,351	0,350	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328



**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2018-2023**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5	5
2.	Indeks Gini	poin	0,351	0,337	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328
3.	Angka Kemiskinan	%	12,6	10,79	10,48	10,08	9,675	9,09	8,48	8,48
4.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10	10
5.	Nlai SAKIP	nilai	CC	B	BB	A	A	A	A	A
6.	Opini BPK RI	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	IKM	poin	B	B	B	B	B	B	B	B
8.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	88	88	89	89	90	90	90	90
9.	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	0	0	30	40	45	45	50	50
10.	Indeks Pengetahuan	poin	56,83	56,89	58,03	58,84	59,55	60,23	61,19	61,19
11.	Indeks Kesehatan	poin	75,98	76,43	76,53	76,75	77,04	77,26	77,54	77,54
12.	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	80,22	80,37	80,52	80,67	80,98	81,31	81,65	81,65
13.	Nilai Tukar Petani	persen	n/a	99,67	100,49	101,31	102,12	102,94	103,76	103,76
14.	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	200.000	515.391	15.000	681.269	749.395	824.335	906.769	3.781.103
15.	Jumlah industri baru	unit	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16.	Jumlah desa tematik	desa	-	-	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
17.	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	N/A	109	36	51	52	41	41	41



**Tabel 8.3.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
1.	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	persen	N/A	N/A	5	5	5	5	5	5	IKU Daerah
2.	Indeks Gini	poin	0,351	0,337	0,33475	0,3325	0,33025	0,328	0,328	0,328	IKU Daerah
3.	Angka Kemiskinan	%	12,6	10,79	10,475	10,08	9,675	9,09	8,48	8,48	IKU Daerah
4.	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	persen	N/A	20	10	10	10	10	10	10	IKU Daerah
5.	Nlai SAKIP	nilai	CC	B	BB	A	A	A	A	A	IKU Daerah
6.	Opini BPK RI	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Daerah
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	B	B	B	B	B	B	B	B	IKU Daerah
8.	Indeks Profesionalitas ASN	poin	88,25	88,25	88,5	89	89,5	89,8	90	90	IKU Daerah
9.	Persentas Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	persen	0	0	30	40	45	45	50	50	IKU Daerah
10.	Indeks Pengetahuan	poin	56,83	57	58	59	60	60	61	61	IKU Daerah
11.	Indeks Kesehatan	poin	75,98	76	77	77	77	77	78	78	IKU Daerah
12.	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	80,22	80,37	80,52	80,67	80,98	81,31	81,65	81,65	IKU Daerah
13.	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan	200.000	515391	15.000	681269	749395	824335	906769	3.781.103	IKU Daerah
14.	Jumlah industri baru	unit	3	4	5	5	5	5	5	5	IKU Daerah
15.	Jumlah desa tematik	desa	0	0	26	26	26	26	26	26	IKU Daerah
16.	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	N/A	109	36	51	52	41	41	41	IKU Daerah
17.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,91	7,01	7,11	7,19	7,27	7,39	7,39	IKU Disdik
18.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,19	12,485	12,655	12,81	12,97	13,17	13,17	IKU Disdik
19.	APK SD/MI	persen	103,9	104,3	104,6	104,9	105,3	105,6	105,9	105,9	IKU Disdik
20.	APK SMP/MTs	persen	99,92	99,92	99,92	101,2	101,6	101,7	101,9	101,9	IKU Disdik
21.	APK PAUD	persen	63,91	64,79	65,02	65,49	66,04	66,64	66,9	66,9	IKU Disdik
22.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,39	69,68	69,75	69,89	70,08	70,22	70,40	70,40	IKU Dinkes

**Tabel 8.4.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome**  
**Kabupaten majalengka Tahun 2018-2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
1	Nilai Tukar Petani	Persen	n/a	99,67	100,49	101,31	102,12	102,94	103,76	103,76	Distankan
2	Angka Kriminalitas yang tertangani	Poin	2,15	1,86	1,93	1,90	1,88	1,85	1,83	1,83	Satpol PP
3	Rasio Ketergantungan	Persen	n/a	43,19	45,81	46,72	47,66	48,61	49,58	49,58	Disdukcapil
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>											
<b>1. PELAYANAN URSAN WAJIB</b>											
<b>1.1. PENDIDIKAN</b>											
1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin	Persen	n/a	45,46	44,22	41,73	37,9	35,48	32,74	32,74	Disdik
1.1.2.	APK SD/MI	persen	103,9	104,3	104,6	104,9	105,3	105,6	105,9	105,9	Disdik
1.1.3.	APK SMP/MTs	persen	99,92	99,92	99,92	101,2	101,6	101,7	101,9	101,9	Disdik
1.1.4.	APK PAUD	persen	63,91	64,79	65,02	65,49	66,04	66,64	66,9	66,9	Disdik
1.1.5.	Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C	persen	24,11	37,43	37,98	38,53	39,08	39,63	40,18	40,18	Disdik
1.1.6.	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	lembaga	5	2	3	5	6	8	9	9	Disdik
1.1.7.	Terpenuhinya Ruang Guru	persen	97,025	93,49	93,75	93,875	93,875	93,875	93,875	93,88	Disdik
1.1.8.	Terpenuhinya Ruang Kelas	persen	82,325	81,715	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	Disdik
1.1.9.	Terpenuhinya Ruang Laboratorium	persen	31,73	30,84	32	32	32	32	32	32	Disdik
1.1.10.	Persentase Pendidik yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	persen	92,7	92,86	93,7	93,9	94,4	94,7	94,9	94,9	Disdik

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.1.11.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	persen	n/a	n/a	20	20	20	20	20	20	20	Disdik
1.1.12.	Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi	persen	n/a	n/a	50	50	50	50	50	50	50	Disdik
1.1.13.	Persentase Satuan Pendidikan Berstandar Nasional	persen	91,47	96,36	96,4	96,75	96,92	97,12	97,24	97,24	97,24	Disdik
1.1.14.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.1.15.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.1.16.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.1.17.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.1.18.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pendidikan	persen	94,7	92,95	96	97	98	98,5	99	99	99	Disdik



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.1.19.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
1.1.20.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
<b>1.2.</b>	<b>KESEHATAN</b>											
1.2.1.	Infrastruktur Rumah Sakit Baru yang dibangun	unit	0	0	0	0	1	0	0	1	1	Dinkes
1.2.2.	Infrastruktur Puskesmas Baru yang dibangun	unit	1	0	2	2	2	2	1	9	9	Dinkes
1.2.3.	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	keluarga	n/a	n/a	74140	75140	76140	77140	78140	78140	78140	Dinkes
1.2.4.	Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar	persen	75,51	78,65	80,00	82,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinkes
1.2.5.	Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda	persen	27,27	30,30	39,39	63,64	63,64	90,91	100	100	100	Dinkes
1.2.6.	Terpenuhinya SPM Kesehatan poin 1-5, 7	persen	0	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.6.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Majalengka	nilai	n/a	78	79	80	81	82	83	83	83	RSUD Majalengka
1.2.7.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Cideres	nilai	n/a	72	74	75	76	78	81	81	81	RSUD Cideres

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.9.	Terpenuhinya standar sarana prasarana fasilitas kesehatan dasar	persen	82,5	93,75	21,21	42,42	63,64	84,85	100	100	Dinkes
1.2.9.	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	persen	87,5	87,5	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.10.	Tersedianya Regulasi Kesehatan	persen	3	1	2	1	1	1	1	1	Dinkes
1.2.11.	Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin esensial Puskesmas	persen	66,12	45,08	82,50	85	85	85	85	85	Dinkes
1.2.12.	Terpenuhinya alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	persen	25,1	23,3	30,30	42,42	60,61	78,79	100	100	Dinkes
1.2.13.	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	persen	0	-	15,15	30,30	45,45	60,61	100	100	Dinkes
1.2.13.	Terselenggaranya SJSN dengan dengan peserta mencapai UHC	persen	0	41,41	75,04	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinkes
1.2.15.	Terselenggaranya peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan pengembangan tingkat primer dan sekunder	persen	0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinkes

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.15.	menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) dan persentase ibu hamil kurang energi kronik	persen	0	1,97	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	Dinkes
1.2.16.	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	persen	0	5,50	70,00	73,00	76,00	80,00	85,00	85,00	Dinkes
1.2.17.	Terpenuhinya SPM Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	persen	0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinkes
1.2.18.	Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengamatan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) dan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit tidak menular	persen	0	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinkes
1.2.20.	Meningkatnya indeks Keluarga Sehat	persen	50	56,00	62,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Dinkes
1.2.21.	Meningkatnya PHBS di semua Tatanan	persen	54,58	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Dinkes

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.21.	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	persen	0	-	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	24,00	Dinkes
1.2.23.	Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	persen	n/a	n/a	87,00	86,00	61,00	41,00	36,00	311,00	RSUD Majalengka
1.2.24.	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Orang	n/a	n/a	166	174	180	187	194	901	RSUD Majalengka
1.2.25.	Jumlah Tenaga Dokter Spesialis, Sub Spesialis, tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai standar	Orang	n/a	n/a	93	62	43	41	6	245	RSUD Cideres
1.2.26.	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Orang	n/a	N/A	377	482	636	741	846	3082	RSUD Cideres
1.2.28.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.29.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.30.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100	100	90	100	100	100	100	Dinkes
1.2.31.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kesehatan	persen	100	100	100	90	100	100	100	100	Dinkes
1.2.32.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Majalengka	persen	0	65	10	9	3	10	7	100	RSUD Majalengka
1.2.32.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja RSUD Cideres	persen	0	65	59	15	29	13	10	126	RSUD Cideres
1.2.34.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	persen	90	90	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.35.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	80	80	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.36.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
1.2.37.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	Niali	CC	CC	C	B	BB	A	A	A	RSUD Majalengka

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.2.38.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	90	90	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Majalengka
1.2.39.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kesehatan	Nilai	CC	CC	C	B	BB	A	A	A	A	RSUD Cideres
1.2.40.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	persen	90	90	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Cideres
<b>1.3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1.3.1.	Cakupan Pelayanan Jalan dan Jembatan	persen	0	5	6,24	7,04	9,04	10,54	11,74	11,74	11,74	Dinas BMCK
1.3.2.	Tingkat Kelayakan Jalan	persen	0	83	82,94	83,52	84,11	84,86	85,29	85,29	85,29	Dinas BMCK
1.3.3.	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebinamargaan	persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.3.	Tingkat Kelayakan Jalan	persen	0	83	82,94	83,52	84,11	84,86	85,29	85,29	85,29	Dinas BMCK
1.3.4.	Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB	persen	0	6,26	6,46	6,66	6,88	7,10	7,34	7,34	7,34	Dinas BMCK
1.3.5.	Jumlah Taman Kota yang terbangun	unit	0	1,00	-	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	Dinas BMCK
1.3.6.	Persentase Jaringan dalam kondisi baik	persen	67,87	68,80	0,00	69,4	69,45	69,55	69,75	69,75	69,75	Dinas PPSDA

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.7.	Volume Air Tertampung	m3	0	0	-	238.700	495.000	450.000	450.000	1.633.700	Dinas PPSDA
1.3.8.	Debit Air Termanfaatkan	ltr/d	0	0	0	8.676,80	3.774,05	3.717,60	3.711,35	19.879,78	Dinas PPSDA
1.3.9.	Tertanganinya titik sungai kritis	persen	0	0	0	6,61	7,70	8,78	9,86	9,86	Dinas PPSDA
1.3.9.	Jumlah Pedoman Tata Ruang	persen	0	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK
1.3.10.	Persentase Kesesuaian Peruntukan Fungsi Lahan	persen	0	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas BMCK
1.3.11.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.12.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.13.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.14.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.15.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.16.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.17.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas BMCK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas BMCK
1.3.18.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA
1.3.19.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA
1.3.21.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA
1.3.21.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA
1.3.23.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Dinas PPSDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.24.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas PPSDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PPSDA
<b>1.4.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
1.4.1.	Cakupan pelayanan Air Bersih	persen	76,73	80,16	-	80,67	80,98	81,31	81,65	81,65	Dinas PPSDA
1.4.2.	Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin	Persen	-	-	-	5,20	3,90	260,00	1,00	0	Dinas PPSDA
1.4.3.	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	persen	61,25	68,36	-	69,02	69,38	69,75	70,12	70,12	Dinas PPSDA
1.4.3.	Persentase Kawasan Kumuh	km	221,87	242,87	-	294,80	304,25	318,40	330,95	330,95	Dinas PPSDA
1.4.4.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	1,02	-	-	74,80	56,10	37,40	18,70	0	Dinas PPSDA
<b>1.5.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
1.5.1.	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Satpol PP
1.5.2.	Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kali	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	72,00	Kesbangpol
1.5.3.	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	Satpol PP
1.5.5.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terdidik dan berkompeten	orang	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	1.722,00	Satpol PP

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.5.6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	Satpol PP
1.5.7.	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.8.	Persentase tanggap bencana	persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.9.	Tingkat Penanganan darurat bencana	persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.10.	Tingkat Pemulihan pasca bencana	persen	10,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.11.	Jumlah isu/Konflik SARA	Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
1.5.12.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.13.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.14.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	Satpol PP
1.5.15.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.16.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	Satpol PP

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.5.17.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.18.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Satpol PP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
1.5.19.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.20.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.21.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.22.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.5.23.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.24.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.25.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
1.5.26.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
1.5.27.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
1.5.28.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.5.29.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
1.5.30.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
1.5.31.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
1.5.32.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesbangpol
<b>1.6.</b>	<b>SOSIAL</b>											
1.6.1.	Persentase masyarakat miskin yang dimonev	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.2.	Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial	Rumah Tangga	3.563,00	4.213,00	301,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	Dinsos
1.6.3.	Jumlah Lansia yang mendapatkan "Rantang Kanyaah"	orang	-	-	200,00	500,00	670,00	840,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	Dinsos
1.6.4.	Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri	Kube	112,00	112,00	8,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	422,00	Dinsos

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.6.5.	Jumlah PMKS yang dibantu	orang	5.145,00	5.945,00	70,00	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	Dinsos
1.6.6.	Jumlah Kelembagaan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	lembaga	-	-	-	157,00	157,00	157,00	157,00	628,00	Dinsos
1.6.7.	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.8.	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana	orang	60,00	60,00	60,00	361,00	361,00	361,00	361,00	1.264,00	Dinsos
1.6.9.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.10.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.11.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.12.	Persentase Sasaran dan Prasaran Yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin Pada Perangkat Daerah Dinas Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.13.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.6.14.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
1.6.15.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos
<b>1.7.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>										
1.7.1.	Jumlah peserta bimbingan Rumah tangga miskin yang menjadi mandiri	RTS	n/a	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	Disnakerin
1.7.2.	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	n/a	23,65	24,00	22,72	22,72	22,72	22,72	90,88	Disnakerin
1.7.3.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	n/a	60,00	60,00	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00	Disnakerin
1.7.4.	Persentase Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	n/a	n/a	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Disnakerin
1.7.5.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.7.6.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin
1.7.7.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin
1.7.8.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin
1.7.9.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin
1.7.10.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin
1.7.11.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerin



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.8.</b>	<b>PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
1.8.1.	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	KK	n/a	n/a	550,00	600,00	675,00	700,00	725,00	3.250,00	Dinas P3AKB
1.8.2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	n/a	n/a	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB
1.8.3.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	n/a	n/a	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Dinas P3AKB
1.8.4.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	n/a	n/a	5,00	10,00	12,50	15,00	15,50	15,50	Dinas P3AKB
1.8.5.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Persen	n/a	n/a	5,00	10,00	12,50	15,00	15,50	15,50	Dinas P3AKB
1.8.6.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB
1.8.7.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.8.8.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB
1.8.9.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Unit	128,00	128,00	128,00	205,00	206,00	206,00	206,00	206,00	Dinas P3AKB
1.8.10.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB
1.8.11.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB
1.8.12.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas P3AKB

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.9.</b>	<b>PANGAN</b>										
1.9.1.	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	desa	-	18,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	38,00	Dinas Pangan
1.9.2.	Persentase Peningkatan skor PPH	persen	-	87,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	92,33	Dinas Pangan
1.9.3.	Jumlah Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	kelompok	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	Dinas Pangan
1.9.4.	Jumlah Pusat Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Unit	-	80,00	25,00	25,00	25,00	25,00	26,00	126,00	Dinas Pangan
1.9.5.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	persen	-	62,58	63,26	63,94	64,62	65,30	65,98	65,98	Dinas Pangan
1.9.6.	Persentase Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq$ 10 dan pasokan pangan	Persen	-	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan
1.9.7.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan
1.9.8.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan
1.9.9.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan
1.9.10.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.9.11.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pangan	persen	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Pangan
1.9.12.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pangan	persen	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Pangan
1.9.13.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pangan	persen	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Pangan
<b>1.10.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										
1.10.1.	Cakupan Pelayanan Persampahan	persen	1,83	1,83	1,91	1,91	1,99	2,07	2,15	2,15	Dinas LH
1.10.2.	Cakupan Pelayanan penanganan limbah	persen	0,17	0,17	3,67	7,17	10,67	16,66	16,66	16,66	Dinas LH
1.10.3.	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di permukiman kumuh	unit	-	-	-	535,00	535,00	535,00	642,00	2.247,00	Dinas LH
1.10.4.	Tingkat Kualitas Lingkungan	poin	60,97	60,97	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	68,47	Dinas LH
1.10.5.	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertata	persen	63,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.6.	Tingkat Pelayanan Persampahan	persen	10,40	10,40	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	28,00	Dinas LH
1.10.7.	Persentase Luas Tutupan Lahan	persen	31,04	31,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	31,09	Dinas LH

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.10.8.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.9.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.10.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.11.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.12.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.13.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH
1.10.14.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas LH

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.11.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII</b>										
1.11.1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70,70	77,22	79,40	81,60	83,80	85,00	88,30	8.830,00	Disdukcapil
1.11.2.	Prosentase distrinbusi dok kependudukan melalui PT. Pos Indonesia	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.3.	Prosentase sinergitas Sistem Administrasi kependudukan (SAK)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.4.	Persentase Pengelolaan SIAK tingkat Kecamatan/ Kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.5.	Prosentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.6.	Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	46,44	46,53	54,54	62,56	70,57	78,59	86,59	86,59	Disdukcapil
1.11.7.	Prosentase Pelayanan Pindah/Datang penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.8.	Prosentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.9.	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dok	-	9,00	11,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	Disdukcapil
1.11.10.	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.11.11.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.12.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.13.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
1.11.14.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
<b>1.12.</b>	<b>PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
1.12.1.	Jumlah Pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat	orang	-	-	-	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	660,00	Dinas PMD
1.12.2.	Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan	persen (%)	40,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00	Dinas PMD

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.12.3.	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes	persen	15,00	25,00	35,00	45,00	65,00	75,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.4.	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan desa	Persen	45,00	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	80,00	Dinas PMD
1.12.5.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang kurang aktif	Unit	-	43,00	57,00	60,00	60,00	55,00	55,00	330,00	Dinas PMD
1.12.6.	Prosentase pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.7.	Persentase PADes terhadap APBDes	Persen	20,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	Dinas PMD
1.12.8.	Jumlah meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat	Rp. (000)	266.000,00	300.000	488.100	725.600	1.015.600	1.135.000	1.762.600	1.762.600	Dinas PMD
1.12.9.	Jumlah infrastruktur posyandu yang di bangun	unit	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00	Dinas PMD
1.12.10.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.11.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.12.12.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.13.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.14.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.15.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
1.12.16.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PMD
<b>1.13.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
1.13.1.	Cakupan Angka Total Fertility Rate	Point	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,11	Dinas P3AKB
1.13.2.	Rata-rata Usia Perkawinan	Tahun	18,50	18,70	19,50	19,60	20,00	20,50	21,10	21,10	21,10	Dinas P3AKB
1.13.3.	Menurunnya Tingkat Perceraian	Kasus	4.311,00	4.652,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas P3AKB
<b>1.14.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>											

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.14.1.	Cakupan Pelayanan Sarana Perhubungan	persen	65,00	65,00	68,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.2.	Persentase Pemasangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	persen	25,00	37,20	39,51	41,64	43,87	46,10	48,34	48,34	Dishub
1.14.3.	Prosentasi Capaian Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum	persen	50,4	50,4	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.4.	Prosentasi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.5.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.6.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.7.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.8.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.14.9.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.10.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
1.14.11.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dishub
<b>1.15.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
1.15.1.	Jumlah Aplikasi Layanan informasi publik yang terintegrasi	aplikasi	-	-	2,00	11,00	5,00	6,00	4,00	26,00		Diskominfo
1.15.2.	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	buah	n/a	n/a	154,00	159,00	154,00	157,00	145,00	615,00		Diskominfo
1.15.3.	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	unit	n/a	n/a	82,00	82,00	79,00	80,00	82,00	81,00		Diskominfo
1.15.4.	Jumlah Desa Teknologi, informasi dan komunikasi (Destika)	desa	-	-	61,00	61,00	61,00	61,00	45,00	228,00		Diskominfo
1.15.5.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Diskominfo

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.15.6.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
1.15.7.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
1.15.8.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
1.15.9.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
1.15.10.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
1.15.11.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskominfo
<b>1.16.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>											
1.16.1.	Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin	persen	N/A	N/A	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas KUMKM

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.16.2.	Peningkatan Volume pelaku Usaha Mikro	persen	N/A	N/A	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas KUMKM
1.16.3.	Jumlah Produk berbahan baku lokal yang dikembangkan	produk	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	Dinas KUMKM
1.16.4.	Terbangunnya sarana prasarana penunjang pemasaran produk lokal usaha mikro	unit	N/A	N/A	-	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	Dinas KUMKM
1.16.5.	Persentase Koperasi Aktif	persen	n/a	133,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Dinas KUMKM
1.16.6.	Jumlah koperasi yang dapat menyusun laporan keuangan	koperasi	n/a	133,00	n/a	10,00	10,00	10,00	10,00	147,00	Dinas KUMKM
1.16.7.	Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti pelatihan pengawasan	orang	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	Dinas KUMKM
1.16.8.	Koperasi yang melaksanakan RAT	koperasi	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	Dinas KUMKM
1.16.9.	Jumlah Koperasi baru	Koperasi	1,00	12,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	Dinas KUMKM
1.16.10.	Jumlah Bidang Usaha Koperasi	Koperasi	2,00	2,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	Dinas KUMKM
1.16.11.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.16.12.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
1.16.13.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
1.16.14.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
1.16.15.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
1.16.16.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
1.16.17.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KUMKM
<b>1.17.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>										
1.17.1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	nilai	79,74	80,05	80,50	82,92	85,40	87,96	90,60	91,00	DPMPTSP

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.17.2.	Regulasi Pelayanan Perizinan	Regulasi	6,00	6,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	DPMPTSP
1.17.3.	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.4.	Nilai Realisasi Investasi	milyar	629,364 M	1,288 T	362,00	380,00	399,00	419,00	440,00	2.000,00	DPMPTSP
1.17.5.	Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.6.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.7.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.8.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	140.000,00	421.500,00	161.150,00	377.265,00	194.991,50	DPMPTSP
1.17.9.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.10.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.17.11.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
1.17.12.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
<b>1.18.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>											
1.18.1.	Jumlah prestasi masyarakat di bidang Olahraga	prestasi	54,00	38,00	55,00	55,00	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	Dispora
1.18.2.	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Jiwa	650,00	700,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dispora
1.18.3.	Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlet yang dibina	Jiwa	13,00	13,00	45,00	58,00	70,00	90,00	110,00	373,00	373,00	Dispora
1.18.4.	Jumlah Kompetisi Olahraga yang diikuti dan Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Kompetisi	12 jenis 25 cabang	12 jenis 26 cabang	15 jenis 29 cabang	17 jenis 30 cabang	18 jenis 31 cabang	20 jenis 32 cabang	22 jenis 33 cabang	22 jenis 33 cabang	22 jenis 33 cabang	Dispora
1.18.5.	Jumlah Pemuda Pelopor Terpilih dan yang mengikuti even di tingkat provinsi	Jiwa	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00	17,00	17,00	Dispora
1.18.6.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	45,00	45,00	47,00	48,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	Dispora
1.18.7.	Peningkatan Pemahaman Baris-Berbaris dan Cakupan Penjaringan Calon Paskibra	Jiwa	34,00	34,00	34,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	Dispora



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.18.8.	Jumlah Pemuda Berwirausaha	Jiwa	20,00	20,00	20,00	50,00	100,00	150,00	200,00	300,00	Dispora
1.18.9.	Peningkatan Pemahaman Pemuda Berwirausaha	Jiwa	20,00	20,00	20,00	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00	Dispora
1.18.10.	Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	Unit	3,00	6,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	9,00	Dispora
1.18.11.	Jumlah Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit	1,00	2,00	3,00	2,00	-	2,00	-	4,00	Dispora
1.18.12.	Jumlah Pengadaan Sarana Olahraga	Unit	7,00	7,00	10,00	5,00	4,00	2,00	7,00	28,00	Dispora
1.18.13.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
1.18.14.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
1.18.15.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
1.18.16.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.18.17.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
1.18.18.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
1.18.19.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dispora
<b>1.19.</b>	<b>STATISTIK</b>											
1.19.1.	Jumlah Sarana Pelayanan Data Statistik	unit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	Diskominfo
1.19.2.	Jumlah dokumen dan Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	41,00	Diskominfo
<b>1.20.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>											
1.20.1.	Presentase prestasi masyarakat di bidang Seni Budaya	persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Disparbud
1.20.2.	Jumlah event seni dan budaya	kali	2,00	2,00	16,00	37,00	41,00	45,00	50,00	189,00	189,00	Disparbud
1.20.3.	Jumlah Benda Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	100,00	100,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	750,00	750,00	Disparbud
<b>1.21.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>											
1.21.1.	Rasio Kunjungan perpustakaan per tahun	poin	100,00	100,00	15.000	30.000,00	60.000,00	100.000,00	120.000,00	325.000,00	325.000,00	Diskapus

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>1.22.</b>	<b>KEARSIPAN</b>										
1.22.1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.2.	Persentase arsip statis yang diselamatkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.3.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.4.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.5.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.6.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.7.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.22.8.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
1.22.9.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Diskapus
<b>2.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>											
<b>2.1.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
2.1.1.	Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	1.412,22	1.242,79	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	1.367,09	Distankan
2.1.2.	Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	4.157,09	3.868,15	77,36	77,36	77,36	77,36	77,36	77,36	4.254,95	Distankan
2.1.3.	Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	1.662,23	1.427,38	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	1.570,13	Distankan
2.1.4.	Jumlah Produksi Ikan	Ton	890,47	853,44	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	938,79	Distankan
2.1.5.	Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan	kelompok	21,00	23,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	38,00	Distankan
2.1.6.	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Rupiah	n/a	23.312.000	466.240	466.240	466.240	466.240	466.240	466.240	466.240	Distankan
<b>2.2.</b>	<b>PARIWISATA</b>											
2.2.1.	Jumlah destinasi wisata layak kunjung	unit	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	Disparbud
2.2.2.	Jumlah Kunjungan Event	orang	N/A	N/A	5.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	215.000,00	Disparbud
2.2.3.	Jumlah Industri Kreatif sub sektor kriya	unit	N/A	N/A	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	45,00	3,00	Disparbud
2.2.4.	Jumlah Industri Kreatif sub sektor kuliner	unit	N/A	N/A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	3,00	Disparbud

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.2.5.	Jumlah Desa Wisata	desa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Disparbud
2.2.6.	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan	persen	n/a	n/a	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	Disparbud
2.2.7.	Peningkatan PAD	persen	285,00	46,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Disparbud
2.2.8.	Jumlah Pokdarwis	kelompok	4,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	22,00	85,00	Disparbud
2.2.9.	Jumlah Kerjasama Pariwisata yang dilakukan	MOU	1,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	Disparbud
2.2.10.	Sertifikasi/standarisasi Pariwisata	buah	-	8,00	15,00	50,00	75,00	100,00	150,00	390,00	Disparbud
2.2.11.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
2.2.12.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
2.2.13.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
2.2.14.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
2.2.15.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
2.2.16.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
2.2.17.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pariwisata dan Kebudayaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disparbud
<b>2.3.</b>	<b>PERTANIAN</b>											
2.3.1.	Jumlah keluarga Petani miskin yang menjadi mandiri	Rumah Tangga Sasaran (RTS)	N/A	N/A	150,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	1.250,00	Distankan
2.3.2.	Persentase peningkatan produksi Bawang Merah (Ton)	%	37.705,00	31.981,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.3.3.	Persentase peningkatan produksi Cabai Besar (Ton)	%	12.452,00	13.053,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.3.4.	Persentase peningkatan produksi Kentang (Ton)	%	2.607,00	3.601,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Distankan
2.3.5.	Persentase peningkatan produksi Mangga (Ton)	%	60.007,50	44.754,69	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.3.6.	Persentase peningkatan produksi Jambu Biji (Ton)	%	5.369,30	3.618,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Distankan
2.3.7.	Persentase peningkatan produksi Durian (Ton)	%	5.150,60	11.263,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	Distankan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.3.8.	Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Hortikultura	Unit	211,00	371,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	446,00	Distankan
2.3.9.	Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura	meter	N/A	N/A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	Distankan
2.3.10.	Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Hortikultura	meter	N/A	N/A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	Distankan
2.3.11.	Persentase peningkatan produksi Jagung (Ton)	%	151.646,00	117.598,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	10,00	Distankan
2.3.12.	Persentase peningkatan produksi Padi (Ton)	%	672.294,00	667.110,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	10,00	Distankan
2.3.13.	Persentase peningkatan produksi Kedelai (Ton)	%	916,00	2.264,00	3,00	3,00	2,00	1,02	0,97	9,99	Distankan
2.3.14.	Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	Unit	120,00	195,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	320,00	Distankan
2.3.15.	Panjang Irigasi yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	meter	8.750,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.000,00	Distankan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.3.16.	Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi Tanaman Pangan	meter	N/A	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	Distankan
2.3.17.	Persentase peningkatan produksi Kopi (Ton)	%	830,87	217,74	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	Distankan
2.3.18.	Persentase peningkatan produksi Cengkeh (Ton)	%	662,45	452,53	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	Distankan
2.3.19.	Persentase peningkatan produksi Teh (Ton)	%	1.261,11	340,72	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.3.20.	Persentase peningkatan produksi Tembakau (Ton)	%	1.106,85	839,19	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	Distankan
2.3.21.	Persentase peningkatan produksi Tebu (Ton)	%	39.333,63	148,58	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	Distankan
2.3.22.	Jumlah Bantuan Alat dan mesin pertanian mendukung peningkatan produksi Perkebunan	Unit	1,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	52,00	Distankan
2.3.23.	Panjang Jalan pertanian yang direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya mendukung peningkatan produksi perkebunan	meter	N/A	N/A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	Distankan
2.3.24.	Persentase peningkatan produksi daging domba (Ton)	%	1.534,94	1.535,00	2,50	2,50	2,50	2,75	2,75	13,00	Distankan
2.3.25.	Persentase peningkatan produksi daging ayam pedaging (Ton)	%	24.352,44	24.358,49	2,50	2,50	2,50	2,75	2,75	13,00	Distankan
2.3.26.	Persentase peningkatan produksi telur (Ton)	%	3.367,28	3.369,74	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	12,50	Distankan
2.3.27.	Persentase peningkatan produksi susu sapi (Ribuk Liter)	%	1.388,44	1.392,42	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	12,50	Distankan



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.3.28.	Jumlah Pelaku Usaha Hortikultura dan Perkebunan penerima manfaat	Kelompok	201,00	221,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	241,00	Distankan
2.3.29.	Jumlah Pelaku Usaha Perternakan penerima manfaat	Kelompok	43,00	43,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	108,00	Distankan
2.3.30.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Distankan
2.3.31.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Distankan
2.3.32.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Distankan
2.3.33.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Distankan
2.3.34.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Pertanian	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Distankan
<b>2.4.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>										
2.4.1.	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	unit	44,00	44,00	2,00	4,00	5,00	5,00	4,00	64,00	Dinas Perdagangan
2.4.2.	Meningkatnya nilai ekspor	persen	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.3.	Persentase pertumbuhan pasar modern dan desa	persen	3,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	37,00	Dinas Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.4.4.	Pengendalian dan pengawasan perdagangan	kali	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	480,00	Dinas Perdagangan
2.4.5.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.6.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.7.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.8.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perdagangan	unit	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.9.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
2.4.10.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.4.11.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan
<b>2.5.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>										
2.5.1.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persen	9,34	2,64	n/a	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	Disnakerin
2.5.2.	Jumlah Industri Pengolahan yang berdaya saing	Unit IKM	N/A	N/A	N/A	320,00	320,00	320,00	320,00	1.280,00	Disnakerin
2.5.3.	Meningkatnya kompetensi Pelaku IKM	orang	N/A	N/A	N/A	30,00	50,00	30,00	50,00	160,00	Disnakerin
2.5.4.	Jumlah Sentra IKM	unit	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	Disnakerin
2.5.5.	Dokumen Rencana Pengembangan	dokumen	1,00	1,00	-	2,00	-	-	-	2,00	Disnakerin
<b>3.</b>	<b>URUSAN PENUNJANG</b>										
<b>3.1.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>										
3.1.1.	Tingkat Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terhadap Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	persen	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.2.	Tingkat Keselarasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.3.	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.1.4.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.5.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.6.	Persentase dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.7.	Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang ditindaklanjuti	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.8.	Persentase Kesesuaian Peruntukan Pola ruang	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.9.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.10.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.11.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.1.12.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.13.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.14.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.15.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda
3.1.16.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bappelitbangda

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>3.2..</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
3.2.1.	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.2.	Persentase Pegawai yang mencapai SKP diatas 76%	persen	93,00	93,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.3.	Persentase Pegawai ASN yang mencapai target Perkin diatas 80%	persen	90,00	90,00	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.4.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	persen	62,24	71,10	71,10	71,66	77,66	83,79	90,02	90,02	BKPSDM
3.2.5.	Persentase kenaikan yang naik pangkat tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.6.	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemennan RB	persen	-	-	30,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00	BKPSDM
3.2.7.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	63,00	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	76,00	BKPSDM
3.2.8.	Tingkat Pemenuhan Data Informasi Kepegawaian ASN	persen	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.9.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3.2.10.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.11.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.12.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.13.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
3.2.14.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDM
<b>3.3.</b>	<b>KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>											
3.3.1.	Opini BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.3.2.	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	BKAD
3.3.3.	Persentase Kenaikan total pendapatan daerah	persen	2.685,00	2.816,00	17,00	6,75	10,93	10,97	15,72	16,00	BKAD
3.3.4.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
3.3.5.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
3.3.6.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
3.3.7.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
3.3.8.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD



NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3.3.9.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
3.3.10.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
<b>4.</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>											
<b>4.1.</b>	<b>SETDA</b>											
4.1.1.	Persentase jumlah Rumah Ibadah yang aktif	persen	16,00	16,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	Sosmas
4.1.2.	Persentase sarana prasarana ibadah yang terfasilitasi	Persen	31,00	31,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	Sosmas
4.1.3.	Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi	persen	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	80,00	Sosmas
4.1.4.	Persentase tokoh agama yang terfasilitasi	persen	32,00	32,00	42,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	80,00	Sosmas
4.1.5.	Tingkat Capaian Kabupaten Sehat	Predikat	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Padapa	Swasti Saba Wiwirda	Swasti Saba Wiwirda	100,00	100,00	Sosmas
4.1.6.	Hari Jadi Pemerintah Daerah dan Nasional yang diperingati	Event	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	Sosmas
4.1.7.	Kebijakan Lingkup PMKS	jumlah	4,00	4,00	4 Stimulan PMKS	1 Regulasi 4 Stimulan PMKS	4 Stimulan PMKS	4 Stimulan PMKS	4 Stimulan PMKS	100,00	100,00	Sosmas

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.1.8.	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Tapem
4.1.9.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tapem
4.1.10.	Meningkatnya Kinerja Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tapem
4.1.11.	Tingkat Kepuasan Publik	Persen	n/a	51 OPD Nilai B	91,23	92,98	94,74	96,49	100,00	100,00	Organisasi
4.1.12.	Tingkat Kesesuaian Penataan Organisasi dengan Peraturan	Persen	n/a	81,00	3,80	7.60	11.40	15.20	19,00	100,00	Organisasi
4.1.13.	Persentase Kelembagaan Menunjang Visi dan Misi	Persen	n/a	90.70	1.86	3.73	5.58	7.44	9.30	100,00	Organisasi
4.1.14.	Persentase Peraturan Daerah yang di Undangkan	Persen	100,00	60,00	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	100,00	Hukum
4.1.15.	Persentase Jumlah Paket yang berhasil Dilelangkan	Persen	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	LPBJ
4.1.16.	Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD	Persen	n/a	4,03 Milyar	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	Ekbang
4.1.17.	Persentase Kegiatan Pembangunan yang Berhasil	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ekbang
4.1.18.	Tingkat Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Setda
4.1.19.	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik	Persen	29,00	29 Lokasi	31.03	31.03	24.14	13.80	12,00	100,00	Setda
4.1.20.	Tingkat Kesuksesan Acara Pimpinan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Protokoler

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
4.1.21.	Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasikan dan Terpublikasikan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Protokoler
4.1.22.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Umum
4.1.23.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Umum
4.1.24.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat Daerah	persen	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
4.1.25.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
4.1.26.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
4.1.27.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan
<b>4.2.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>											
4.2.1.	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP A	persen	-	-	5,00	25,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00	Inspektorat
4.2.2.	Prosentase temuan APIP dan BPK RI yang	persen	-	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.2.3.	Level maturitas SPIP	Level	-	1,8	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00	Inspektorat
4.2.4.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.5.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.6.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.7.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.8.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.9.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
4.2.10.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten	Persen	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>4.3.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
4.3.1.	Persentase Perda yang disyahkan	persen	45,45	63,64	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Sekretariat DPRD
4.3.2.	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	dokumen	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	Sekretariat DPRD
4.3.3.	Jumlah Cetakan dokumentasi hukum	buku	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	195,00	Sekretariat DPRD
4.3.4.	Frekuensi Fasilitas Sosialisasi Perda	lokasi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	Sekretariat DPRD
4.3.5.	Frekuensi Fasilitas Tugas DPRD Bidang Anggaran	kali	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	Sekretariat DPRD
4.3.6.	Frekuensi Fasilitas Tugas DPRD Bidang Pembentukan Perda	bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00	Sekretariat DPRD
4.3.7.	Frekuensi Fasilitas Tugas DPRD Bidang Pengawasan	bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00	Sekretariat DPRD
4.3.8.	Frekuensi Fasilitas Tugas DPRD Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	kali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	Sekretariat DPRD
4.3.9.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4.3.10.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
4.3.11.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4.3.12.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4.3.13.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4.3.14.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4.3.15.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
<b>4.4.</b>	<b>KECAMATAN</b>											
4.4.1.	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	persen	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Kecamatan
4.4.2.	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	kali	n/a	n/a	n/a	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	Kecamatan
4.4.3.	Jumlah Edukasi kebencanaan skala kecamatan	kali	n/a	n/a	n/a	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	Kecamatan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.4.4.	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak	persen	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.5.	Jumlah potensi unggulan kecamatan	jenis	n/a	n/a	n/a	52,00	52,00	78,00	78,00	78,00	Kecamatan
4.4.6.	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	n/a	n/a	n/a	26,00	26,00	26,00	26,00	104,00	Kecamatan
4.4.7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	n/a	n/a	n/a	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Kecamatan
4.4.8.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.10.	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.11.	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.12.	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.13.	Persentase Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	persen	100,00	100,00	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan

NO.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.4.14.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.15.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan
4.4.16.	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan





BAB IX  
PENUTUP



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini merupakan kerangka perumusan visi, misi, dan program Bupati, yang akan digunakan sebagai acuan dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2018-2023. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan sinergitas, keterpaduan dan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang masih berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, DPRD Kabupaten Majalengka, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta tidak menutup kemungkinan dengan kalangan akademisi (*fourth helix*).

Selaras dengan hal itu, ketercapaian indikator kinerja daerah harus menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Sebagaimana yang telah ditargetkan pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018 - 2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya. Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya kedalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
3. RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Melalui pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 yang ditopang dengan berbagai program prioritas, diharapkan pada akhir tahap pembangunan keempat nanti, Kabupaten Majalengka akan berhasil mencapai visi pembangunan jangka panjang, yaitu: *"Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa"*, semoga seluruh harapan dan upaya tersebut dapat terwujud secara nyata.